

**PEMANFAATAN JARINGAN POLITIK CALON DAN ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)  
UNTUK MERAH KEMENANGAN DALAM PEMILIHAN UMUM  
DI SUMATERA UTARA**

**TESIS**

Oleh :

**ROSRAMADHANA**

**NIM : 025050082**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan  
Dalam Memperoleh Gelar Magister Sains  
Program Studi Antropologi Sosial*



MILIK PERPUSTAKAAN  
**UNIMED**

TOL TERIMA	Ap 07
ASAL :	
PENERBIT :	
NO. INDUK :	07/0202

**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN  
MEDAN  
2005**

TESIS

PEMANFAATAN JARINGAN POLITIK CALON DAN  
ANGGOTA DPD (DEWAN PERWAKILAN DAERAH)  
UNTUK MERAHI KEMENANGAN DALAM PEMILIHAN UMUM  
DI SUMATERA UTARA

Disusun dan Diajukan Oleh :

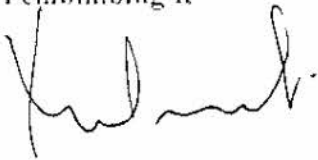
Nama Mahasiswa : Rosramadhana  
Nim : 025050082

Telah dipertahankan di Depan Panitia Ujian Tesis  
Pada Tanggal 18 Agustus Dan Dinyatakan Telah Memenuhi  
Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Sains  
Program Studi Antropologi Sosial

Medan, 18 Agustus 2005

Menyetujui  
Tim Pembimbing

Pembimbing I.



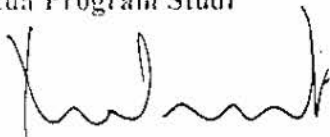
Prof. Dr. Bungaran A. Simanjuntak

Pembimbing II.



Dr. Jongkers Tampubolon, M.A.

Ketua Program Studi



Prof. Dr. Bungaran A. Simanjuntak

Direktur Program Pasca Sarjana

Belferik Manullang

**Persetujuan Komisi ujian Tesis Program Studi Antropologi Sosial**

1. **Prof. Dr. Bungaran A. Simanjuntak** (.....)  
(Ketua/Pembimbing)
2. **Dr. Jongkers Tampubolon, M.A.** (.....)  
(Sekretaris/Pembimbing)
3. **Prof. Dr. Nur A.Fadhil Lubis, M.A.** (.....)  
(Anggota/Penguji)

---

4. **Prof. Dr. Usman Pelly, M.A.** (.....)  
(Anggota/Penguji)
5. **Prof. Dr. Chalida Fachruddin** (.....)  
(Anggota/Penguji)

## ABSTRAK

**Rosramadhana, Pemanfaatan Jaringan Politik Calon Dan Anggota DPD ( Dewan Perwakilan Daerah ) Untuk Meraih Kemenangan Dalam Pemilihan Umum Di Sumatera Utara. Program Studi Antropologi Sosial. Pasca Sarjana Universitas Negeri Medan. Agustus 2005.**

Penelitian ini menganalisis jaringan politik calon dan anggota DPD pada pemilihan umum tahun 2004 di Sumatera Utara. Seperti diketahui pesta demokrasi pemilihan umum pada tanggal 5 April 2004 sangat berbeda dengan pemilu sebelumnya. Adapun perbedaannya adalah pada pemilu 1955 sampai dengan 1999 partai politik merupakan kendaraan elit politik untuk duduk di lembaga legislatif dan eksekutif. Sedangkan pada pemilu 2004 sistem yang digunakan dalam pemilu adalah proporsional terbuka yaitu rakyat langsung memilih wakil-wakilnya untuk duduk di lembaga legislatif (DPR) melalui partai politik. Selain itu, pada pemilu 2004 rakyat juga memilih langsung anggota DPD (Dewan Perwakilan Daerah) sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2003 dengan tujuan memperjuangkan aspirasi rakyat maupun kepentingan daerah berdasarkan perorangan artinya bukan melalui kendaraan partai politik.

Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian dan analisis lebih jauh tentang jaringan politik calon dan anggota DPD pada pemilu 2004. Adapun yang menjadi masalah utama dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana pemanfaatan jaringan politik calon dan anggota DPD untuk meraih dukungan berdasarkan hubungan kekerabatan. (2) Sejauhmana peranan agama didalam jaringan politik yang dilakukan calon dan anggota DPD tersebut. (3) Sejauhmana usaha yang dilakukan calon dan anggota DPD untuk mensosialisasikan diri dengan melibatkan Tim Sukses mereka.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan memakai analisis jaringan. Adapun obyek penelitian ini adalah anggota DPD yang berhasil dan yang tidak berhasil duduk di lembaga negara. Sampel penelitian digunakan adalah Purposive Sampling (Teknik Sampling Bertujuan) yang diambil sebagian dari mereka yang terlibat langsung dengan masalah dan tujuan penelitian. Tahap penelitian ini langsung dimulai dari interview (wawancara dengan informan) antar lain calon yang berhasil dan yang belum berhasil menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah. Kemudian untuk mendapatkan kejelasan data-data dilakukan studi dokumen dengan mengumpulkan data-data yang diperoleh dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Dari hasil penelitian diperoleh bahwa jaringan politik calon dan anggota DPD ini dilakukan melalui strategi yang berbeda yaitu calon anggota DPD yang gagal pada umumnya melakukan sosialisasi diri kepada masyarakat tidak banyak melibatkan Tim Sukses (TS), selain itu cara yang digunakan dalam pengumpulan dukungan suara hanya sebatas sosialisasi politik, partisipasi politik dan komunikasi politik kepada masyarakat umum. Berbeda halnya dengan anggota DPD yang berhasil. Langkah yang dilakukan dalam menjaring dukungan rakyat pada umumnya melibatkan Tim Sukses (TS) yang benar-benar solid dalam memperjuangkan mereka. Selain itu, strategi yang digunakan dalam proses pendudukan suara juga sangat terorganisir seperti sosialisasi politik, partisipasi politik, komunikasi politik, dan rekrutmen politik yang dibantu oleh Tim Sukses mereka masing-masing baik di tingkat Propinsi sampai ke Daerah Kabupaten/Kota. Disamping itu jaringan politik anggota DPD yang berhasil ini tidak hanya melibatkan masyarakat umum namun organisasi-organisasi politik dan keagamaan ikut berperan dalam mendukung anggota DPD yang berhasil tersebut.

## ABSTRACT

**Rosramadhana, The using of political network candidate and Regional Representative Council (DPD) members to get a win in general election in North Sumatra. Social Anthropology Study Program. Post Graduation Program of State University of Medan. August 2005.**

This research analyses political network candidate and DPD members in the 2004 general election in North Sumatra. In fact, that democracy party of general election on 5 April 2004 is very different with the previous election. The difference both of them are, in the 1955 general election until 1999 shows that the political party is a tool of political elite to sit in legislative and executive institution. Meanwhile, in the 2004 it use an open proportional system, it means that peoples elected their representative directly to sit in the house representatives should be through political party. Beside, in the 2004 general election, the people also elected DPD member directly according to Indonesian Republic law No. 12/2003 with aim to fight the people's aspiration and region base on person. It means that general election is not through political party.

Therefore, it needs to examination and analyses more about political network candidate and DPD members in the 2004 general election. There are a few problems to be a main problem in this research. Firstly, how the using political network candidate and DPD member. Secondly, how far the role of region in political network who's done by candidate and DPD members. Thirdly, what the effort was done candidate and DPD member to socialization their self with involve their success team.

This research use a qualitative approach with analyses net. The object of it, is DPD members who success or not sit in the state institution. The research sampling is purposive sampling, which taken from them who involve directly with the case and purpose of research. The step of this research is began from interview with informants of DPD member. Then, to get a complete data the writer do a document study with collect some data from General Election Commission.

As the result from research get that the political network candidate and DPD member use a different strategy, namely, in fact, candidate and DPD member who fail do socialization their self to the public doesn't involve a lot of their success team. Furthermore, the way is used to collect the vote just a political socialization, political participation, and political communication to the public. Meanwhile, DPD member who win in election involve their success team who really solid to get a vote of the public. Beside that, the strategy which used in setting vote up process is very organize such as political socialization, political participation, political communication and political recruitment which help by their success team even in province until regency city. Beside that, the political network DPD member who success not only involve the public but also political and region organization has a role in support them

## Ucapan Terimakasih

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Mang Maha Esa, atas berkat rahmat dan karunianya tesis yang berjudul, **“PEMANFAATAN JARINGAN POLITIK CALON DAN ANGGOTA DPD (DEWAN PERWAKILAN DAERAH) UNTUK MERAH KEMENANGAN DALAM PEMILIHAN UMUM DI SUMATERA UTARA”**, ini telah selesai disusun. Penulis menyadari bahwa selesainya tesis ini berkat adanya bantuan moril maupun materil dari berbagai pihak. Untuk hal ini penulis menyampaikan rasa terimakasih kepada, Bapak Prof Dr. B.A Simanjuntak dan Bapak Jongkers Tampubolon sebagai pembimbing yang tak henti-hentinya memberikan pengarah-an dan bimbingan.

Selanjutnya penulis juga menyampaikan terimakasih kepada informan yang telah membantu penulis mengumpulkan data. Penulis juga tak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada saudara dan teman-teman sekalian yang telah banyak memberikan masukan pada draft awal tesis ini.

Akhirnya penulis tidak lupa menyampaikan terimakasih kepada Almarhum Ayahanda dan Ibunda, Mertua, Suami, dan saudara-saudara yang telah memberi semangat dan dorongan sehingga tesis ini selesai disusun. Tak lupa penulis ucapkan

banyak terima kasih kepada adinda Dewi Kesuma yang telah banyak membantu dalam pengetikan dan penyusunan tesis ini.

Medan, Agustus 2005

**Rosramadhana**

# DAFTAR ISI

	Hal
ABSTRAK.....	i
ABSTRACT.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR LAMPIRAN.....	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	4
1.3. Perumusan Masalah.....	4
1.4. Tujuan Penelitian.....	5
1.5. Manfaat Penelitian.....	6
1.6. Kajian Pustaka.....	7
1.6.1. Kajian Teoritis.....	7
1.6.1.1. Politik dan Kekuasaan.....	7
1.6.1.2. Jaringan Politik Hubungan Kekerabatan.....	9
1.6.1.3. Peranan Agama dalam Politik.....	11
1.6.1.4. Political Cost.....	14
1.6.1.5. Kelompok-Kelompok Strategis.....	17
1.7. Kerangka Konseptual.....	20
1.8. Metode Penelitian.....	22
1.8.1. Jenis Penelitian.....	22
1.8.2. Objek Penelitian.....	22
1.8.3. Sampel Penelitian.....	22
1.8.4. Fokus Penelitian.....	23
1.8.5. Teknik Pengumpulan Data.....	23
1.8.6. Teknik Analisa Data.....	25



1.8.7. Lokasi Penelitian.....	25
1.8.8. Jadwal Penelitian.....	26
 <b>BAB II. GAMBARAN LOKASI PENELITIAN</b>	
2.1. Latar Belakang Sejarah Sumatera Utara.....	27
2.2. Keberadaan Organisasi Politik.....	32
2.3. Pemilu 1987 dan 1992.....	44
 <b>BAB III. PROSES PENYELENGGARAAN SERTA PEMANFAATAN</b>	
<b>JARINGAN POLITIK CALON DAN ANGGOTA DPD DALAM</b>	
<b>MERAH KEMENANGAN PEMILU 2004</b> .....	47
3.1. Pemilu 2004 dan Keberadaan DPD.....	47
3.1.1. Pengertian.....	48
3.1.2. Ketentuan Menjadi Calon Anggota DPD.....	50
3.2. Jaringan Politik Calon dan Anggota DPD.....	54
3.2.1. Jaringan Politik Calon dan Anggota DPD yang belum berhasil.....	56
3.2.2. Jaringan Politik Anggota DPD Yang Berhasil.....	65
 <b>BAB IV. ANALISIS JARINGAN POLITIK ANGGOTA DPD BERDASARKAN</b>	
<b>HUBUNGAN KEKERABATAN DAN AGAMA PADA</b>	
<b>KABUPATEN/KOTA DI SUMATERA UTARA</b> .....	
4.1. Jaringan Politik Anggota DPD Di Kota Medan.....	72
4.2. Jaringan Politik Anggota DPD Di Kabupaten Deli Serdang.....	77
4.3. Jaringan Politik Anggota DPD Di Kota Tebing Tinggi.....	79
4.4. Jaringan Politik Anggota DPD Di Kabupaten Asahan.....	82
4.5. Jaringan Politik Anggota DPD Di Kabupaten Tapsel.....	83
4.6. Jaringan Politik Anggota DPD Di Kabupaten Taput.....	86
4.7. Jaringan Politik Anggota DPD Di Kabupaten Simalungun.....	88
4.8. Jaringan Politik Anggota DPD Di Kabupaten Karo.....	90

<b>BAB V. PEMBAHASAN</b> .....	93
5.1. Jaringan Politik Calon Dan Anggota DPD Berdasarkan Hubungan Kekerabatan .....	95
5.2. Jaringan Politik Calon Dan Anggota DPD Melalui Peranan Agama .....	97
5.3. Jaringan Politik Calon Dan Anggota DPD Dalam Mensosialisasikan Diri Dengan Pembiayaan Politik (Political Cost).....	100
5.4. Jaringan Politik Calon Dan Anggota DPD Melalui Pelibatan Tim Sukses .....	101

---

<b>KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN</b> .....	104
<b>KESIMPULAN</b> .....	104
<b>IMPLIKASI</b> .....	106
<b>SARAN</b> .....	108
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	109
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Peta Propinsi Sumatera Utara.....	112
Lampiran 2 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota Dewan Perwakilan Daerah Propinsi Sumatera Utara .....	113
Lampiran 3 Laju Pertumbuhan Penduduk Propinsi Sumatera Utara Menurut Kab/Kota 1961-2002.....	114
Lampiran 4 Persentase Penduduk Propinsi Sumatera Utara Menurut Agama Dan Kab/Kota Tahun 2000 .....	115
Lampiran 5 Persentase Penduduk Propinsi Sumatera Utara Menurut Suku Bangsa Dan Kab/Kota Tahun 2000.....	116

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Perolehan Suara Ketiga OPP Pada Pemilu 1987 Dan 1992 .....	44
Tabel 2 Jumlah Penduduk Propinsi Sumatera Utara Tahun 1961-2000.....	53
Tabel 3 Jumlah Calon Pemilih Menurut Jenis Kelamin.....	55
Tabel 4 Rekapitulasi Penghitungan Suara Anggota DPD.....	72
Tabel 5 Jumlah Penduduk Kota Medan Menurut Suku Bangsa Dan Agama.....	74
Tabel 6 Jumlah Penduduk Kab. Deli Serdang Menurut Suku, Bangsa, Agama ...	78
Tabel 7 Jumlah Penduduk Kota Tebing Tinggi Menurut Suku Bangsa, Agama..	80
Tabel 8 Jumlah Penduduk Kab. Asahan Menurut Suku Bangsa, Agama .....	82
Tabel 9 Jumlah Penduduk Kab. Tapsel Menurut Suku Bangsa, Agama .....	84
Tabel 10 Jumlah Penduduk Kab. Taput Menurut Suku Bangsa, Agama.....	86
Tabel 11 Jumlah Penduduk Kab. Simalungun Menurut Suku Bangsa, Agama ...	88
Tabel 12 Jumlah Penduduk Kab. Karo Menurut Suku Bangsa, Agama .....	91

## BAB I PENDAHULUAN

MILIK PERPUSTAKAAN  
UNIMED

### 1.1. Latar belakang masalah

Masyarakat sekarang ini pada umumnya sudah mengetahui apa itu politik, namun untuk terjun ke dunia politik masih enggan, karena untuk memasuki dunia politik harus masuk ke dalam partai politik. Hal inilah yang begitu berat dalam pandangan masyarakat terlebih bagi kaum perempuan yang masih terikat ke dalam budaya patriarki.

Oleh sebab itu pada pesta demokrasi ditahun 2004, persepsi masyarakat untuk terjun ke dunia politik harus melalui partai politik ternyata telah berubah sehubungan dibentuknya DPD ( Dewan Perwakilan Daerah ).

Perihal pembentukan DPD ini tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 Tahun 2003. Keberadaan DPD sebagai lembaga Negara adalah unsur resmi realisasi perwujudan Lembaga Permusyawaratan Rakyat, yang terdiri dari Lembaga Perwakilan Rakyat (DPR) dan Lembaga Perwakilan Daerah (DPD) untuk melaksanakan kedaulatan rakyat atas dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, dengan mencerminkan nilai-nilai demokrasi dan bisa menyerap serta memperjuangkan aspirasi rakyat, maupun kepentingan daerah sesuai perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam menjawab tantangan perjalanan hidup dan kehidupan rakyat serta pemerintahan sesuai tuntutan kebutuhan zamannya.

Berbicara mengenai politik sangat menarik, karena tidak terlepas dari kekuasaan (Power). Akan tetapi kekuasaan itu diperoleh karena adanya hubungan pihak tertentu untuk dapat menduduki posisi yang strategis dalam lembaga negara

Hubungan itu dilakukan dengan berbagai cara misalnya karena adanya hubungan kekerabatan (Genealogis) yang sama, sebab faktor kekerabatan dengan politik begitu erat kaitannya. Faktor lain yang dilakukan adalah melalui jaringan politik yang kuat sehingga mampu memperoleh kekuasaan yang diinginkan.

Demikian juga halnya dengan calon dan anggota DPRD ( Dewan Perwakilan Daerah ) akan melakukan langkah politik berdasarkan faktor-faktor diatas dalam memperoleh dukungan suara

Jaringan politik berdasarkan hubungan kekerabatan memang merupakan modal awal bagi setiap calon dan anggota DPRD, sebab kekerabatan menjadi wadah perolehan suara yang relatif rendah dalam mengeluarkan biaya, karena keterikatan hubungan yang telah terbina selama ini adalah merupakan kunci penyampaian dan pengembangan informasi kepada pemilih untuk dukungan bagi seorang calon.

Ada hal lagi yang ingin dilihat dalam penelitian ini yaitu adanya peranan agama dalam jaringan politik yang dilakukan calon dan anggota DPRD tersebut, sebab lewat peran agama para calon umumnya berada pada suasana kebersamaan yang amat mendukung minat seseorang untuk menetapkan pilihannya.

Biasanya, peran agama akan melekat dalam mempengaruhi kejiwaan seorang pemilih untuk berbalik arah dari ketetapan pilihannya semula. Istilah "Seiman" adalah pendorong kuat yang memudahkan bagi seorang calon dalam memperoleh dukungan suara.

Satu hal lagi yang ingin dilihat dalam penelitian ini adalah adanya political cost, sebab untuk duduk menjadi anggota DPD ada tahapan-tahapan yang ditentukan oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum).

Salah satunya adalah harus melakukan kampanye untuk menyampaikan visi dan misi si calon apabila duduk menjadi anggota DPD (Dewan Perwakilan Daerah). Hal ini dilakukan dari tingkat provinsi sampai ke daerah-daerah. Oleh sebab itu calon dan anggota DPD ini akan mengeluarkan biaya-biaya operasional dalam melakukan kampanye tersebut.

Selain itu, dalam penelitian ini juga yang ingin dilihat adalah keterlibatan kelompok tim sukses diluar keberadaan calon anggota DPD, karena jaringan ini menjadi sesuatu yang tak bisa luput dari sasaran calon, sebab terkondisi semacam keinginan kuat untuk bisa mendulang suara dan sekaligus mengurangi gerak calon lain dalam menarik dukungan suara atas pelibatan kelompok diluar keberadaan calon.

Lazimnya, pelibatan kelompok diluar keberadaan calon adalah langkah yang penuh perhitungan baik dari segi pembagian waktu pendekatan, penggunaan dana, pendekatan terhadap simbol-simbol masa atau dengan komunitas pemilih tertentu, misalnya kelompok pemuda, kelompok seni, kelompok pemuka agama, dan lain-lain.

Dari uraian diatas, dapat dikatakan bahwa jaringan politik calon dan anggota DPD di era pemilu tahun 2004 hingga bisa berhasil dan tidak berhasil duduk di Lembaga Negara disebabkan faktor diatas perlu diteliti kebenarannya, karena menurut peneliti hal ini penting dan menarik.

## 1.2. Identifikasi masalah

Dari uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut :

1. Adanya jaringan hubungan kekerabatan dan asal daerah yang sama untuk mendapatkan kursi jabatan anggota DPD di parlemen
2. Adanya kemungkinan faktor agama berperan didalam jaringan politik yang dilakukan calon dan anggota DPD.
3. Adanya kemungkinan political cost untuk biaya yang akan dikeluarkan dalam pemilihan umum.
4. Adanya jaringan politik yang kuat dengan melibatkan kelompok tim sukses masing-masing.

## 1.3. Perumusan masalah

Pada dasarnya masalah yang akan diteliti dalam suatu penelitian sangat luas, namun dengan memperhatikan uraian latar belakang masalah dan identifikasi masalah, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut

1. Bagaimana pemanfaatan jaringan politik calon dan anggota DPD untuk meraih dukungan berdasarkan hubungan kekerabatan
2. Sejauhmanakah peranan agama di dalam jaringan politik yang dilakukan calon dan anggota DPD tersebut.



3. Sejahterama usaha-usaha yang dilakukan calon dan anggota DPD untuk mensosialisasikan diri dengan mengeluarkan biaya (political cost) pada pemilihan umum.
4. Sejahterama hubungan jaringan politik calon dan anggota DPD dengan kelompok tim sukses masing-masing dalam memperoleh dukungan suara pada pemilihan umum.

#### 1.4. Tujuan penelitian

Tujuan dari suatu penelitian merupakan pedoman dan langkah awal yang sangat menentukan pada suatu penelitian, maka tujuan dari penelitian ini adalah,

1. Untuk mengetahui jaringan kekerabatan yang digunakan calon dan anggota DPD di Sumut.
2. Untuk mengetahui adanya keterlibatan agama didalam jaringan politik calon dan anggota DPD tersebut.
3. Untuk mengetahui adanya political cost dalam Pemilihan Umum
4. Untuk mengetahui sejahterama keterlibatan kelompok tim sukses untuk meraih dukungan suara dalam pemilihan umum

### 1.5. Manfaat penelitian

Dari keseluruhan hasil penelitian, diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Penelitian ini bermanfaat untuk mengetahui jaringan politik calon dan anggota DPD yang digerakkan berdasarkan hubungan kekerabatan
2. Penelitian ini berguna sebagai bahan informasi kepada masyarakat apabila terjun ke dunia politik.
3. Penelitian ini berguna untuk mengetahui sistem jaringan politik calon dan anggota DPD dengan kelompoknya atau tim sukses masing-masing dalam memperoleh dukungan.
4. Penelitian ini berguna dalam kajian atau pengembangan ilmu Antropologi khususnya Antropologi politik.

## 1.6. KAJIAN PUSTAKA

### 1.6.1. Kajian Teoritis

#### 1.6.1.1. Politik dan Kekuasaan

Menurut Miriam Budiarto (2003:8) politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam sistem politik atau negara yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Untuk melaksanakan itu perlu ditentukan kebijaksanaan-kebijaksanaan umum (*public policies*) yang menyangkut pengaturan dan pembagian (*division*).

Biasanya politik itu selalu diidentikkan dengan kekuasaan (*power*) karena menurut Robert Dahl dalam Rusadi (1983:11), setiap kali kita berhadapan dengan politik, kita menemukan adanya suatu hubungan khusus antara manusia yang hidup bersama, hubungan ini diberi berbagai sebutan seperti aturan (*rule*), kewenangan (*authority*), atau kekuasaan.

Sedangkan Kantaprawira (1983:45) mengatakan bahwa kekuasaan diberi arti sebagai suatu kapasitas, kapabilitas atau kemampuan untuk mempengaruhi, menaklukkan, mengendalikan, menguasai dan memerintah orang lain. Kapasitas demikian erat hubungannya dengan wewenang (*authority*), hak (*right*), dan kekuatan fisik (*naked power*).

Akan tetapi Max Weber dalam Sockanto (1990:296) mengemukakan pandangan yang berbeda dengan mengatakan bahwa kekuasaan adalah kesempatan seseorang atau sekelompok orang untuk menyadarkan masyarakat akan kemauan-kemauan sendiri dengan sekaligus menerapkannya terhadap tindakan-tindakan perlawanan dari orang-orang atau golongan tertentu.

Berbeda halnya dengan pandangan diatas. Moctar Mas'ood dan Colin Macandrews (1978:74) mengartikan kekuasaan sebagai probabilitas untuk mempengaruhi kebijaksanaan dan kegiatan negara atau probabilitas untuk mempengaruhi alokasi nilai-nilai secara otoritatif

Politik dan kekuasaan tidak dapat dipisahkan namun kekuasaan itu biasanya berbentuk hubungan (relationship). Oleh karena itu Miriam Budiarjo (2003:35) mengatakan bahwa kekuasaan itu berbentuk hubungan berarti ada satu pihak yang memerintah dan ada yang diperintah (The Ruler and The Ruled), satu pihak yang memberi perintah, satu pihak yang memahami perintah. Dengan kata lain tidak ada persamaan martabat, selalu yang satu lebih tinggi daripada yang lain dan selalu ada unsur paksaan dalam hubungan kekuasaan

Selanjutnya Miriam Budiarjo (2003:37) mengatakan bahwa kekuasaan politik adalah kemampuan untuk mempengaruhi kebijaksanaan umum (pemerintah) baik terbentuknya maupun akibat-akibatnya sesuai dengan tujuan-tujuan pemegang kekuasaan sendiri.

Dalam hal ini dapat dikatakan pula bahwa kekuasaan itu dapat diperoleh karena adanya hubungan (relationship) dengan pihak tertentu seperti halnya karena adanya hubungan kekerabatan (genealogis).

### *1.6.1.2. Jaringan Politik Hubungan Kekerabatan*

Menurut Koentjaraningrat (1985:132) tiap individu yang hidup dalam suatu masyarakat secara biologis dapat menyebut kerabat semua orang sesamanya yang mempunyai hubungan darah melalui Ibu maupun ayahnya. Dengan demikian salah satu usaha yang dilakukan dalam jaringan politik adalah melalui hubungan kekerabatan (genealogis).

Dalam menjalankan usaha untuk berhasil duduk calon dan anggota DPD (Dewan Perwakilan Daerah) tersebut harus melakukan sosialisasi politik dalam konteks hubungan kekerabatan. Menurut Mochtar (1978:32) sosialisasi politik adalah bagian dari proses sosialisasi yang khusus membentuk nilai-nilai politik yang menunjukkan bagaimana seharusnya masing-masing anggota masyarakat berpartisipasi dalam sistem politiknya.

Proses memasyarakatkan atau sosialisasi politik harus merata kedalam segenap lapisan masyarakat secara vertikal dan horizontal. Dengan demikian, pengetahuan politik tidak lagi merupakan monopoli kaum elit (Upper Class) saja, walaupun kaum ini sering merupakan elemen penggerak yang vital.

Selanjutnya Koentjaraningrat (1980:213) mengatakan bahwa masyarakat bersahaja biasanya didominasi oleh sistem kekerabatan, dan warga-warganya berinteraksi didalamnya berdasarkan sistem simbolik yang menentukan sikap mereka terhadap paling sedikit tiga kelas kerabat, yaitu kerabat karena hubungan darah, karena hubungan kawin, dan karena hubungan keturunan.

Dari uraian diatas dapat dijelaskan bahwa hubungan kekerabatan tersebut dimulai dari sebuah keluarga. Menurut Moelhat (1978:110) keluarga adalah alat sosialisasi pertama yang membentuk sikap-sikap politik seseorang.

Dalam hal ini hubungan kekerabatan adalah modal bagi calon dan anggota DPD (Dewan Perwakilan Daerah) untuk meraih dukungan suara, sehingga mampu membentuk jaringan politik yang kuat. Menurut Georges Balandier (2002:42) kekerabatan sebagai keseluruhan memiliki pengertian-pengertian dan fungsi-fungsi politik, seperti dalam formasi jaringan-jaringan persekutuan berlandaskan atas keturunan unilineal, dan atas landasan external, seperti pembentukan jaringan-jaringan persekutuan berlandaskan matrimonial, yang disusun dengan melibatkan hubungan-hubungan politik-politik itu.

Berbicara mengenai fungsi politik tidak terlepas dari struktur politik. Menurut Kantaprawira (1983:58) fungsi politik adalah pemenuhan tugas dan tujuan dan struktur politik. Jadi suatu struktur politik dapat dinyatakan berfungsi apabila sebahagian atau seluruh tugasnya terlaksana dan tujuan tercapai.

Dengan demikian, adanya jalinan hubungan kekerabatan yang dilakukan oleh calon anggota DPD mampu melaksanakan fungsi politik seperti sosialisasi politik, komunikasi politik dan rekrutmen politik agar bisa mempertahankan struktur jaringan politik yang telah ada melalui hubungan kekerabatan.

### *1.6.1.3. Peranan Agama Dalam Politik*

Sudah menjadi suatu kelaziman dalam sejarah manusia, bahwa berbicara tentang politik dalam hal ini politik praktis, maka mau tidak mau kita berbicara tentang perjuangan kepentingan individu dan kelompok.

Pada tahun 1970-an, Nurcholis Madjid melakukan suatu terobosan politik dalam pengembangan Islam di Indonesia pada masa awal Orde Baru, dengan mengumandangkan slogan "Islam Yes, Partai Islam No". Menurut Tanja (2000) Cak Nur ingin memberikan sumbangan positif agar umat Islam di Indonesia yang masih

dicurigai oleh pihak penguasa sebagai sebuah kekuatan politik alternatif terhadap Ideologi Pancasila dapat dibebaskan dari beban sejarah tersebut dan dengan demikian dapat diterima sebagai kekuatan agama dan budaya yang dapat memberi sumbangan positif terhadap cita-cita politik pembangunan Orde Baru.

Lebih lanjut Tanja (2000:202) mengatakan bahwa negara agama dan partai agama tidak mampu berbuat adil kepada siapapun. Hal ini dibuktikan di negara Barat dimana gereja-gereja Kristen pernah melakukan kesalahan sejarah dengan membentuk negara Kristen dan partai-partai Kristen.

Dengan demikian slogan "Islam Yes, Partai Islam No", menurut Tanja kandungan ideologisnya merujuk kepada cita-cita yang usang dan ketinggalan zaman dan akan bertabrakan dengan nilai-nilai modern yang lebih terbuka, sejuk, toleran dan pluralistis.

Selanjutnya Tanja (2000:205) mengatakan bahwa manusia menggunakan agama untuk melayani kepentingan pribadinya dan membuat agama yang sifatnya universal menjadi eksklusif.

Pada dasarnya agama sering sekali dijadikan tolak ukur untuk mencapai keberhasilan dari seseorang yang berkuasa. padahal kegagalan tokoh-tokoh agama yang terjun ke dunia politik pada masa lalu dengan membawa nama agama tidak menjadi pembelajaran

Dalam pengalaman Islam, kajian tentang hubungan agama dan politik sebenarnya memunculkan beberapa klaim. Memang diantaranya, muncul klaim menyatakan tidak ada pemisahan antara agama dan politik. ( Maliki, 2000:9 )

Mietzner sebagaimana yang disebut Maliki (2000:44), mengatakan bahwa elit politik dinegeri ini lebih merepresentasikan agama sebagai persona, tidak jauh dari maksud menyesuaikan diri dengan realitas kolektif yang ada pada saat dimana ia berinteraksi.

Dalam konsep Maliki (2000:45), banyak jumlah symbol kekuasaan yang dikenakan oleh elit politik yang bersumber dari agama tidak otomatis menggambarkan tingkat kesadaran spritual atau religiusitas masyarakatnya. Fenomena ini memperkuat tesis Anderson, yang melihat bahwa sesudah abad ke-15 kekuasaan bersumber dari Islam. Mereka bersama para pengiringnya mempergunakan gelar-gelar ke-Islaman dan menambahkan " Islam " dalam perbendaharaan benda-benda yang mereka sakralkan.

Hal ini dibenarkan oleh Weber sebagaimana yang disebut Maliki (2000:45), dalam kerangka dominasi elit politik mempunyai dua langkah, yang pertama dominasi dimunculkan ketika seorang atau sekelompok elit memaksa kelompok lain (massa) melalui penggunaan secara langsung ancaman dan kekuatan.



Dengan demikian jelaslah bahwa peranan agama begitu penting dalam perjalanan kendaraan elit politik untuk mendapat kekuasaan. Agama juga merupakan modal bagi pengejar kekuasaan itu.

Seperti juga halnya yang dijelaskan oleh Siandres (2004:4), hiruk pikak bermuatan politik dalam tubuh Muhammadiyah itu terus berjalan seperti air yang mengalir dan baru kemudian reda setelah lahirnya Khittah Muhammadiyah yang disusun tahun 1969 yang mendorong agar Muhammadiyah mengambil jarak dengan kegiatan kepartaian. Dengan mengambil posisi seperti itu Muhammadiyah lebih memfokuskan dirinya kepada gerakan pengembangan amal usaha dibidang tabligh, pendidikan social, ekonomi dan lain-lain.

Baru kemudian pada tahun 1998 melalui sidang Tanwir di Semarang, Muhammadiyah mendorong sekaligus mengizinkan Ketua PP Muhammadiyah Amien Rais untuk melakukan Ijtihad politiknya dengan mendirikan PAN (Partai Amanat Nasional). Meski didirikan oleh Tokoh nomor satu di Muhammadiyah, tetapi ditegaskan bahwa partai tersebut tidak memiliki hubungan organisasional dengan Muhammadiyah.

Namun demikian, disadari atau tidak kehadiran PAN dalam tubuh Muhammadiyah itu telah membawa pengaruh yang sangat besar bagi terhangunnya semangat baru terhadap para aktivis dan elit Muhammadiyah untuk terjun ke kancah politik praktis.

Hal ini mencerminkan bahwa peranan politik dalam agama begitu penting padahal banyak organisasi dan kaum elit politik berusaha untuk tidak membawa pengaruh agama kedalam pergolakan politik. Dalam tulisannya Purdy mengkaji

hubungan antara agama dan politik. Dalam kajian ini lebih difokuskan kepada persoalan legitimasi. Memakai pengertian operasional dari apa yang dikemukakan Bellah yakni legitimasi sebagai suatu pengetahuan yang diobjektifikasikan secara sosial sehingga memungkinkan untuk menjelaskan dan menjustifikasi tertib sosial yang ada. Analisis legitimasi ini kemudian dikaitkan dengan agama. Asumsi yang dipakai adalah bahwa meski agama bukan satu-satunya sumber legitimasi, namun dalam sejarah ia merupakan instrumen legitimasi yang efektif dan menyebar (Purdy dalam Maliki, 2000:97).

Didalam berbagai pendapat dan penelitian yang telah disebutkan diatas dapat dilihat bahwa nilai-nilai agama dapat mendorong semangat elite politik untuk menjangkau massa dalam kaneah pertarungan memperebutkan kekuasaan.

#### *1.6.1.4. Political Cost*

Dalam politik kata "pengorbanan" sudah tidak asing lagi kita dengar. Pengorbanan itu diantaranya berupa uang, sebab dalam mengejar kekuasaan yang diinginkan memerlukan biaya yang tidak sedikit. Hal ini bisa kita lihat pada pesta demokrasi pemilihan umum, terlebih halnya pada pemilu 2004 dimana pelaksanaannya secara langsung diselenggarakan. Oleh sebab itu calon legislatif yang bertarung dalam mengumpulkan dukungan suara harus bisa mensosialisasikan diri terhadap masyarakat. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan menarik simpati masyarakat melalui pemberian hadiah.

Dalam tulisannya Mauss (1992) mengkaji tentang Bangsa Melanisia, di Fiji, mengidentifikasi adanya Potlatch, terdapat pranata-pranata yang patut untuk

disebutkan dalam sistem pemberian hadiah. Lebih lanjut Mauss melihat ada satu musim, Kerekere, yang pada waktu musim tersebut orang-orang dilarang untuk menolak apapun yang diminta oleh siapapun. Pemberian hadiah saling dipertukarkan diantara keluarga-keluarga pada waktu perkawinan-perkawinan dan sebagainya. Selanjutnya Mauss mengatakan kewajiban untuk memberi hadiah adalah esensi dari Potlatch. Seorang kepala suku harus memberikan potlatch bagi dirinya sendiri, anak laki-lakinya, menantu laki-lakinya atau anak perempuannya dan untuk yang sudah meninggal. Ia akan tetap mempertahankan kekuasaan atas suku, desa dan keluarganya, dan tetap menduduki posisinya sebagai kepala dalam lingkungan bangsanya maupun di luar. Didalam tulisannya Mauss juga mengatakan tembaga merupakan benda-benda yang paling penting dalam potlatch sebab keyakinan keagamaan dan kultus melekat pada tembaga-tembaga tersebut. Menurutnya jika sekiranya kita memperhatikan bahwa tembaga-tembaga dalam bentuk harta kekayaan yang lain merupakan benda-benda untuk dikumpulkan dan untuk potlatch seperti topeng-topeng, jimat-jimat dan sebagainya. Kita menemukan bahwa kesemuanya itu membingungkan dalam hal penggunaannya maupun pengaruh-pengaruhnya. Melalui ini semua kedudukan diperoleh karena seseorang memperoleh kekayaan.

Akan tetapi berbeda halnya dengan kenyataan sekarang ini bahwa pemberian hadiah seperti hal tersebut merupakan suatu kegiatan yang dianggap menyuap rakyat untuk kepentingan politik, sehingga memunculkan istilah politik uang atau money politic yang belakangan menjadi populer, seiring dengan meningkatnya rasa khawatir masyarakat terhadap penggunaan uang untuk memenangkan kepentingan politik

tertentu secara tidak adil dan jujur. Bagi Komite Independen Pemantau Pemilu ada lima jenis perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai politik uang

1. Setiap bentuk perbuatan penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang berupa penggunaan keuangan negara yang bertujuan untuk secara langsung atau tidak langsung menguntungkan partai politik tertentu, atau dilakukan dalam rangka memfasilitasi calon legislatif tertentu. Ini berbeda dengan bantuan yang secara resmi yang diberikan oleh Pemerintah untuk partai politik peserta Pemilu. Jenis perbuatan tersebut akan digolongkan sebagai kejahatan dalam jabatan (occupational crime) atau kejahatan korupsi yang dapat dipidana berdasarkan pasal-pasal pidana tentang kejahatan jabatan dalam KUHP maupun Undang-Undang No. 3/1971 tentang Tindak Pidana Korupsi.
2. Money politic yang dilakukan dalam konteks pengembangan jaring penyelamat politik (political safety net), yakni penggunaan uang atau penyaluran uang yang berasal dari kekuatan politik dan ekonomi dengan tujuan untuk memelihara kepentingan-kepentingan mereka.
3. Praktek-praktek bujukan politik (Political seduction) berupa pemberian uang (dan disisi lain penggunaan uang) yang bertujuan untuk secara tidak syah mempengaruhi proses penentuan calon legislatif, pemungutan dan perhitungan suara, serta penetapan hasil-hasil Pemilu.
4. Praktek yang dilakukan dengan melanggar ketentuan tentang sumbangan dan pelaporannya, baik kepada calon legislatif, maupun partai politik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Partai Politik.

5. Money politic yang terjadi ketika calon legislatif, partai politik, atau pihak lain yang terkait dengan penyelenggaraan menerima pemberian barang atau uang yang bersumber dari bisnis ilegal atau terbukti berasal dari money laundering atau pencucian uang. (sumber : [Http ://www.Transparansi.or.id/majalah/Humla](http://www.Transparansi.or.id/majalah/Humla))

Dari penjelasan diatas bila dihubungkan dengan jaringan politik calon dan anggota DPD dalam Pemilihan Umum Tahun 2004 adalah merupakan suatu kewajiban bagi calon untuk mengeluarkan biaya (Political Cost) dalam mencari dukungan suara di setiap Kabupaten Kota yang ada di Sumatera Utara. Proses

pembiayaan politik itu bukan untuk menyuap rakyat namun dalam rangka mensosialisasikan diri melalui alat dan prasarana kampanye juga membutuhkan biaya yang besar disamping tujuan politik tertentu dari masing-masing calon anggota DPD itu.

#### ***1.6.1.5. Kelompok-Kelompok Strategis***

Menurut Evers (1992:12), kelompok strategis merupakan lahan untuk mengerahkan pemimpin-pemimpin politik dan sekaligus merupakan Pressure Group (yang berkuasa). Dalam penelitian tentang analisis pembentukan kelompok strategis di Asia Tenggara, Persyaratan penting untuk terbentuknya kelompok strategis adalah kenaikan yang tiba-tiba jumlah anggota suatu kuasai kelompok. Pertumbuhan jumlah akan mengakibatkan penekanan terhadap anggota, sehingga mereka berusaha mendapatkan bagian kekayaan yang sesuai dan kekuasaan yang dapat dicapai dalam suatu masyarakat.

Selanjutnya dikatakan bahwa, kerangka politik dari konflik kelompok semakin ditentukan dengan rangkaian yang muncul didalam kelompok strategis.

Dalam masyarakat yang telah dimodernisasi, dengan dihapuskannya tatanan politik dan tatanan social yang lama, maka harus dibangun norma-norma baru untuk kegiatan politik. Kelompok strategis modern yang pertama muncul akan mempunyai pengaruh penting terhadap budaya politik yang baru. ( Evers, 1992:13 )

Dalam penelitiannya mengenai sejarah social sebuah kota di Jawa, Geertz menggambarkan terjadinya kelompok strategis dari kelompok-kelompok profesi. Ia lalu menganalisis, bagaimana kelompok yang dinamakannya sebagai pengelompokan-pengelompokan sosio-kultural tingkat pertama, mengalami perubahan, terpecah dan menjadi aliran semasa revolusi, ketidakstabilan politik dan depresi ekonomi.

Dengan demikian, dapat dilihat bahwa kelompok strategis mempunyai peranan dalam menghubungkan masyarakat, antara lain masyarakat perkotaan dengan masyarakat pedesaan. Kelompok ini kebanyakan terdiri dari orang-orang dengan profesi tradisional seperti ahli keagamaan, Kepala Desa dan begitu juga profesi modern seperti guru, penyuluh pertanian, polisi, dan pegawai administrasi local. ( Evers, 1992:24 )

Merujuk dari penelitian diatas, kelompok-kelompok strategis tersebut bisa dikatakan sebagai kelompok primer. Menurut Cooley dalam Sukanto (1990:136), kelompok primer adalah kelompok-kelompok yang ditandai ciri-ciri kenal mengenal antara anggota-anggotanya serta kerjasama erat yang bersifat pribadi. Sebagai salah satu hasil hubungan yang erat dan bersifat pribadi tadi adalah peleburan individu-individu kedalam kelompok-kelompok, sehingga tujuan individu menjadi juga tujuan kelompok.

Dari apa yang dikemukakan oleh Cooley, dua hal yang penting yaitu pertama-tama bahwa dia bermaksud untuk menunjukkan pada suatu kelas yang terdiri dari kelompok-kelompok yang konkrit seperti misalnya keluarga.

Yang kedua adalah istilah saling kenal mengenal dimana Cooley menekankan pada sifat hubungan antar individu seperti simpati dan kerjasama yang spontan.

Hasil hubungan timbal balik antara anggota-anggota kelompok tersebut secara psikologis, sehingga tujuan dan cita-cita individu menjadi tujuan serta cita-cita kelompok. ( Sukarto, 1990:127 )

Dari penjelasan diatas dapat dilihat bahwa kelompok strategis merupakan kelompok yang bekerja untuk mencapai tujuan yang diharapkan oleh individu. Pada jaringan calon dan anggota DPD, kelompok ini disebut dengan kelompok Tim Sukses, karena kelompok tim sukses ini bekerja guna kepentingan seorang calon dalam memperoleh dukungan suara pada pemilihan umum supaya bisa duduk menjadi anggota DPD (Dewan Perwakilan Daerah)

## 1.7. Kerangka Konseptual

Jaringan politik calon anggota DPD (Dewan Perwakilan Daerah) dapat digambarkan sebagai berikut:



Keterangan :

- a. Kekerabatan dekat dan luas menentukan kesuksesan calon dan anggota DPD (Dewan Perwakilan Daerah)
- b. Jaringan agama kuat dan luas cenderung sukses calon dan anggota DPD (Dewan Perwakilan Daerah).
- c. Dukungan dana menentukan kemenangan anggota Dewan Perwakilan Daerah.
- d. Tim sukses bekerja keras dan sistematis cenderung menghasilkan kesuksesan.

Jaringan politik yang melibatkan hubungan kekerabatan (geneologis), asal satu daerah dan membawa nama agama serta political cost merupakan usaha keberhasilan dalam memperoleh kekuasaan (power)

Realitas pelaksanaan kegiatan para calon dan anggota DPD dalam memasuki proses pemilihan pada Pemilu tahun 2004, belumlah menghasilkan usaha-usaha maksimal, karena keluwesan dan keluasan pergaulan melalui hubungan kekerabatan adalah suatu pendekatan yang tidak membutuhkan penekanan-prinsip maupun visi maupun misi, karena secara psikologis hubungan kekerabatan hanya membutuhkan kesempatan waktu menyampaikan pemberitahuan tentang harapan calon dan tanpa menuntut kesadaran untuk pengembangan pendekatan



Melalui agama tidak dilewatkan seorang calon dan anggota DPD dalam mengumpulkan suara dan menjadi tolak ukur yang menguntungkan dalam memperoleh suara. Justru tidak mustahil seorang calon meraih sukses disuatu daerah yang pemilihnya mayoritas seiman dengan si calon.

Seperti diketahui, dalam melakukan kampanye pada pesta demokrasi itu, calon dan anggota DPD ini akan mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan kampanye dalam rangka memperkenalkan diri kepada pemilih, diantaranya membuat spanduk-spanduk, gambar, baju dan lain-lain. Adapun tujuan yang dilakukan kegiatan diatas

untuk mempopulerkan si calon agar mudah dikenal masyarakat, sebab dalam pemilihan umum di tahun 2004 berbeda dengan pemilihan sebelumnya.

Pelibatan kelompok diluar keberadaan calon dan anggota DPD adalah langkah awal yang penuh perhitungan waktu pendekatan, penggunaan dana dan lain-lain. Artinya melibatkan sekaligus menggalang suara dipemilu melalui kelompok tim sukses adalah langkah yang patut diambil seorang calon untuk memperoleh dan menyebarkan sumber-sumber suara pendukung. Biasanya, usaha pelibatan kelompok tim sukses terkait dengan posisi, fungsi dan profesionalisme.

## 1.8. METODE PENELITIAN

### 1.8.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif dengan memakai jaringan analisis ( web of interconnection). Didalam penelitian ini, setelah data-data diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif, dan di dalam penelitian ini peneliti sebagai instrumen dan dianalisa menggunakan kualitatif deskriptif yang dikategorikan atau dihubungkan satu sama lain berdasarkan keterangan para informan.

### 1.8.2. Objek Penelitian

Adapun objek penelitian ini adalah anggota DPD yang telah berhasil dan yang tidak berhasil duduk di lembaga negara, tim sukses, dan Ketua KPU Sumut. Peneliti ingin melihat jaringan politik dengan melibatkan hubungan kekerabatan dan daerah asal yang sama. Peneliti juga ingin melihat peranan agama dalam jaringan politik tersebut. Demikian juga halnya dengan adanya political cost untuk biaya operasional masa kampanye pada pemilihan umum. Disamping itu peneliti ingin melihat keterlibatan kelompok tim sukses dalam jaringan politik calon dan anggota DPD untuk memperoleh dukungan.

### 1.8.3. Sampel Penelitian

Teknik sampel yang digunakan adalah Purposive Sampling (Teknik sampling Bertujuan). Sebagai sample dalam penelitian ini ditetapkan sebanyak 10 orang (4 diantaranya anggota DPD yang berhasil dan 6 orang lainnya tidak berhasil)

Selanjutnya untuk menentukan jumlah tim sukses masing-masing calon dan anggota DPD ditentukan dari tim sukses sampel penelitian yaitu berkedudukan sebagai Ketua dan Sekretaris (Koordinator Tim Sukses Calon dan Anggota DPD di Wilayah Provinsi Sumatera Utara).

Teknik sampel ini digunakan sesuai dengan tujuan penelitian dan untuk menjaga sifat representatif sampel dan populasi.

#### **1.8.4. Fokus Penelitian**

Penelitian ini difokuskan kepada jaringan politik calon dan anggota DPD ( Dewan Perwakilan Daerah ) dalam meraih dukungan pada pesta Demokrasi Pemilihan Umum. Penelitian ini ingin melihat jaringan calon dan anggota DPD yang dibangun berdasarkan faktor kekerabatan, agama, political cost dan keterlibatan kelompok tim sukses.

#### **1.8.5. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun yang menjadi teknik pengumpulan data dari penelitian ini adalah

##### **1.8.5.1. Interview**

Interview dikenal dengan istilah wawancara. Menurut Sukandarrumidi (2002:88) wawancara adalah suatu proses tanya jawab lisan, dimana dua atau lebih berhadapan secara fisik, yang satu dapat melihat muka yang lain dan mendengar dengan telinga dari suaranya. Wawancara ini dilakukan dengan para anggota DPD (Dewan Perwakilan Daerah) yang telah berhasil dan tidak berhasil duduk dilembaga negara untuk mewakili Sumatera Utara.

Wawancara juga dilakukan dengan tim sukses masing-masing anggota DPD. Wawancara akan difokuskan kepada pemanfaatan jaringan politik anggota DPD tersebut dengan melibatkan hubungan kekerabatan dan daerah asal yang sama.

Selain itu, wawancara akan difokuskan terhadap adanya keterlibatan agama dalam jaringan politik anggota DPD itu dan dengan wawancara yang mendalam akan difokuskan kepada seberapa besar biaya yang diperlukan ( *political cost* ) dalam pemilihan umum.

Kemudian, wawancara juga difokuskan kepada usaha-usaha calon dan anggota DPD dalam melibatkan kelompok tim sukses masing-masing calon dan anggota DPD dalam mengumpulkan dukungan suara.

#### *1.8.5.2. Studi Dokument*

Menurut Irawan dalam Sukandarrumidi (2002:100) studi dokument merupakan teknik pengumpulan data yang ditujukan kepada subyek penelitian. Dalam penelitian ini data-data akan dikumpulkan berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilakukan KPU (Komisi Pemilihan Umum). Disamping itu juga mengumpulkan dan menganalisa data dari pemberitahuan surat kabar tentang pemilihan para anggota DPD. disamping itu juga mengumpulkan data dari selebaran dan brosur kampanye para anggota DPD tersebut.

#### **1.8.6. Teknik Analisa Data**

Teknik menganalisa data merupakan suatu langkah yang sangat kritis dalam penelitian. Peneliti harus memastikan pola analisa mana yang digunakan. Data-data penelitian ini akan dianalisa secara kualitatif dengan memakai analisis jaringan (web of interconnection) berdasarkan kategorial. Data-data yang terkumpul akan terus dianalisa dan diinterpretasikan. dalam interpretasi data, data yang didapat akan dihubungkan dengan keterangan para informan. Untuk menemukan kebenaran yang objektif dan keakuratan interpretasi data peneliti akan menyesuaikan data yang didapat di lapangan dengan konsep-konsep yang berkaitan dengan jenis penelitian.

#### **1.8.7. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di kota Medan. Penetapan lokasi penelitian ini disesuaikan dengan keterbatasan geografis dan supaya lebih efisien seperti waktu, biaya, dan tenaga sehingga perlu dijadikan pertimbangan dalam menentukan lokasi penelitian ini.

### 1.8.8. Jadwal Penelitian

Penelitian ini dijadwalkan dengan kegiatan dan bulan sebagai berikut .

NO.	KEGIATAN	BULAN KE -							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Penyusunan proposal	■							
2	Persetujuan proposal dan seminar proposal		■	■					
3	Pelaksanaan penelitian lapangan				■	■			
4	Penganalisaan data						■	■	
5	Pembuatan laporan tesis								■
6	Ujian tesis meja hijau								■
7	Perbaikan								■

## BAB II GAMBARAN LOKASI PENELITIAN

MILIK PERPUSTAKAAN  
UNIMED

### 2.1. Latar Belakang Sejarah Sumatera Utara

Berdasarkan dari buku profil Sumatera Utara, maka latar belakang sejarah Sumatera Utara dapat diuraikan bahwa di zaman pemerintahan kolonial Belanda, Sumatera merupakan satu wilayah pemerintahan yang bernama Gouvernement Van Sumatera yang meliputi seluruh Sumatera. Wilayah ini dikepalai oleh seorang Gouverneur berkedudukan di Medan. Sumatera dibagi dalam daerah-daerah administratif yang dinamakan keresidenan. Bentuk susunan pemerintahan itu tidak banyak berubah dalam masa penjajahan Jepang. Setelah Indonesia merdeka dan diundangkan UU NO. 1 Tahun 1945 diaturlah tata Pemerintahan Daerah Sumatera tetap menjadi satu propinsi dengan Gubernur pertamanya ditetapkan Mr. T.M. Hasan.

Pada tanggal 12 April 1946 Gubernur Sumatera mengeluarkan Maklumat No. 8/MGS tentang pembentukan Komite Nasional Daerah (KND) sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1945. KND ini kemudian menjadi Dewan perwakilan Rakyat Daerah dan bersama-sama dengan Gubernur mengatur rumah tangga daerahnya. Jumlah anggota KND itu pertama sekali adalah 100 orang yang mewakili Keresidenan-Keresidenan menurut perbandingan jumlah penduduk.

Sidang pertama KND berlangsung di Bukit Tinggi tanggal 17-19 April 1946. Pada sidang pertama itu dibahas tentang kesulitan perhubungan yang ditinjau dari segi pertahanan antara Ibu kota dan daerah-daerah di kawasan ini. Oleh sebab itu diputuskan untuk membagi Propinsi Sumatera menjadi 3 sub propinsi yang masing-

masing dipimpin oleh seorang Gubernur Muda. Ketiga sub propinsi itu adalah Sumatera Utara (wilayahnya meliputi Keresidenan Aceh, Sumatera Timur dan Tapanuli), Sumatera Tengah dan Sumatera Selatan.

Dalam perkembangan selanjutnya ternyata kepemimpinan Gubernur Muda disetiap Sub Propinsi pada prakteknya telah bertindak mengatur rumah tangga sendiri. Memperhatikan kenyataan inilah kemudian diundangkan UU No 10 Tahun 1948 tentang pembagian Propinsi Sumatera menjadi tiga Propinsi yakni :

- Propinsi Sumatera Utara yang meliputi Keresidenan Aceh, Sumatera Timur dan Tapanuli.
- Propinsi Sumatera Tengah yang meliputi Keresidenan Sumatera Barat, Riau, Jambi.
- Propinsi Sumatera Selatan yang meliputi Keresidenan Bengkulu, Palembang, Lampung dan Bangka-Belitung.

Sejalan dengan pembagian Propinsi Sumatera menjadi tiga Propinsi, pemerintah telah menetapkan bekas Gubernur Propinsi Sumatera sebagai Komisaris Pemerintah Pusat di Sumatera. Tugas Komisaris ini terutama adalah menyempurnakan pembentukan ketiga propinsi baru itu hingga tuntas. Komisaris yang tetap dipegang oleh T.M. Hasan berkedudukan di Bukit Tinggi.

Gubernur Sumatera Utara yang pertama ditetapkan Mr. S.M. Amin Beliau dilantik Presiden R.I. di Kutaraja (Banda Aceh), pada tanggal 19 Juni 1948. Pemerintah Daerah Sumatera Utara kemudian dilengkapi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilantik pada tanggal 13 Desember 1948 di Tapak Tuan, Aceh



Anggota DPRD yang dilantik ini umumnya adalah anggota Dewan Propinsi Sumatera berasal dari Keresidenan yang kini menjadi wilayah Propinsi Sumatera Utara.

Tetapi bersamaan dengan terbentuknya propinsi-propinsi ini situasi keamanan bertambah memburuk. Serangan-serangan Belanda kian gencar setelah agresi militernya yang ke-2. Untuk menghadapi serangan Belanda ini dan memimpin serta mengatur perlawanan rakyat terhadap penjajah, disusunlah pemerintahan militer yang dipimpin oleh seorang Gubernur Militer. Propinsi Sumatera Utara disusun menjadi dua Daerah Militer. Wilayah Aceh dan sebahagian Keresidenan Sumatera Timur (Langkat dan Tanah Karo) menjadi satu Daerah Militer dengan Gubernur militernya T.M. Daud Beureueh. Keresidenan Tapanuli dan Sumatera Timur bagian Selatan menjadi Daerah Militer dengan Gubernur Militernya Dr. J.L. Tobing.

<sup>2</sup>Selanjutnya dengan ketetapan Pemerintah Darurat RI dalam bentuk Peraturan Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah NO. 8/Des W.K.P.M. tanggal 17 Desember 1949 dibentuklah Propinsi Aceh dan Propinsi Tapanuli Sumatera Timur. Ketetapan Pemerintah Daerah R.I. ini dicabut oleh Pemerintah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 5 Tahun 1950 sehingga kembalilah Propinsi Sumatera Utara kepada wilayahnya semula yang meliputi Keresidenan Aceh, Sumatera Timur dan Tapanuli

Pembentukan pemerintah Propinsi Sumatera Utara mengalami ganjalan dengan adanya Negara Sumatera Timur sebagai Negara Bagian Republik Indonesia Serikat. Negara Sumatera Timur dibentuk berdasarkan beslit Letnan Gubernur Jenderal H.J. Van Mook tanggal 25 Desember 1947. Pembentukan NST ini tidak disetujui oleh rakyat dan setelah Konperensi Meja Bundar terjadilah reaksi-reaksi

terbuka. Aksi-aksi rakyat berupa demonstrasi dan rapat umum menuntut pembubaran NST dan menggabungkan Sumatera Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia pecah dimana-mana seperti Tanah Karo, Langkat, Deli Serdang, Asahan dan Labuhan Batu. Puncak dari aksi ini adalah berlangsungnya Kongres Rakyat se-Sumatera Timur di Medan tanggal 27 April sampai 1 Mei 1950. Hasil perjuangan rakyat yang bukan saja terjadi di Sumatera Timur, tetapi juga di negara-negara bagian itu ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pembubaran negara bagian itu disambut dengan sukacita di Medan dengan penyerahan wewenang dan kekuasaan Negara Sumatera Timur kepada Panitia Persiapan Negara Kesatuan untuk Sumatera Timur (PPNKST) yang diketuai oleh Sarimin Reksodiharjo. Dengan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 15 April 1950 Sumatera Utara menjadi satu daerah propinsi yang bersifat administratif dan akan menuju bentuk daerah otonom. Persiapan pembentukan daerah otonom itu dilakukan oleh Panitia Penyelenggara Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (P4SU) yang diketuai oleh Sarimin Reksodiharjo juga. Ketua P4SU ini sekaligus memegang jabatan Acting Gubernur Propinsi Sumatera Utara.

Gubernur Sumatera Utara yang definitif ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Presidenan No. 4 Tahun 1951 tanggal 16 Januari 1951 dengan mengangkat A. Hakim. Pelantikan dilaksanakan tanggal 25 Januari 1951. Pengganti A. Hakim adalah Mr. S.M. Amin yang memegang jabatan Gubernur Propinsi Sumatera Utara dari tanggal 29 Nopember 1953 sampai 23 Oktober 1955. Setelah

beliau ditetapkan Gubernur berikutnya yang dipangku oleh Sutan Komala Pontas yang dilantik tanggal 21 Maret 1956.

Pada tanggal 7 Desember 1956 diundangkan UU No. 24 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara. Pada pasal-1 undang-undang itu disebutkan .

- 1) Daerah Aceh yang melingkupi Kabupaten-Kabupaten : 1. Aceh Besar, 2. Aceh Pidie, 3. Aceh Utara, 4. Aceh Timur, 5. Aceh Tengah, 6. Aceh Barat, 7. Aceh Selatan, 8. Kota Besar Kutaraja, dipisahkan dari

lingkungan Daerah Otonom Propinsi Sumatera Utara dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 5 Tahun 1950 dan dibentuk menjadi Daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan nama Propinsi Aceh.

- 2) Propinsi Sumatera Utara tersebut dalam ayat (1) yang wilayahnya telah dikurangi dengan bagian-bagian yang terbentuk sebagai Daerah Otonom Propinsi Aceh, tetap disebut Propinsi Sumatera utara.

Penerus Sutan Komala Pontas ditetapkan Raja Junjungan Lubis sebagai Gubernur Propinsi Sumatera Utara. Beliau dilantik tanggal 1 April 1960 Beliau diganti oleh Pejabat Gubernur Eny Karim pada tanggal 23 April 1963. Tanggal 12 Juli 1963 Eny Karim menyerahkan jabatan Gubernur Sumatera Utara kepada Ulung Sitepu. Ternyata Ulung Sitepu terlibat dalam Peristiwa G.30.S. PKI dan dijatuhi hukuman mati oleh Mahmilub. Sebagai pengganti beliau ditetapkan PR. Talaumbanua sebagai Gubernur. Beliau dilantik pada tanggal 8 Oktober 1965.

Jabatan Gubernur Sumatera Utara diserahkan oleh P.R. Telaumbanua kepada Marah Hafim menyerahkan jabatan Gubernur Sumatera Utara kepada E.W.P. Tambunan

Setelah bertugas selama lima tahun E.W.P. Tambunan menyerahkan jabatan Gubernur Sumatera kepada Kaharudin Nasution pada tanggal 13 Juni 1983. Dalam menelusuri Hari Jadi Propinsi Sumatera Utara, Gubernur Kepala Daerah Sumatera Utara dengan suratnya No. 4585/25 tanggal 16 Februari 1973 mengusulkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat-I Sumatera Utara untuk menetapkan Hari Jadi Propinsi Sumatera Utara tanggal 15 April 1948 yakni tanggal ditetapkannya UU No. 10 Tahun 1948. usul tersebut telah disetujui DPRD Tk I Sumatera Utara dengan Keputusannya tertanggal 13 Agustus 1973 No. 19/K/1973.

## **2.2. Keberadaan Organisasi Politik**

Menyimak latar belakang Sejarah politik dan kondisi sosial masyarakatnya, sesungguhnya tidaklah terlalu sukar menduga seperti apa wajah kehidupan politik di Sumatera Utara. Dalam hal latar belakang sejarahnya, Sumatera Utara adalah daerah yang terkenal memiliki dinamika politik yang tinggi. Bahkan dapat dikatakan masyarakat Sumatera Utara pada umumnya adalah masyarakat yang memiliki tingkat pengetahuan politik yang memadai dimana praktek berpolitik adalah hal yang lazim dialami dalam kehidupan sehari-hari. Disisi lain, peranan yang dimainkan daerah ini dalam percaturan politik ditingkat Nasional, juga termasuk besar. Sementara itu, dalam hal latar belakang sosialnya, Sumatera Utara merupakan daerah yang sangat heterogen. Dari aspek keagamaan saja, misalnya, cenderung terlihat adanya polarisasi

yang cukup tinggi. Memang, jumlah masyarakat yang memeluk agama Islam paling banyak, yakni 62,2% dari keseluruhan jumlah penduduk. Namun, di pihak lain, jumlah masyarakat yang memeluk agama Kristen ternyata juga tidak kecil, yakni sebanyak 33,5% atau lebih dari separuh jumlah penduduk yang beragama Islam.

Dengan latar belakang seperti itu, jelas bahwa kehidupan politik di Sumatera Utara memang kemudian berkembang agak khas. Dalam hal ini, maka setidaknya ada dua ciri umum yang tampak sangat menonjol. Pertama, adanya kecenderungan pengaruh agama yang kuat dengan tarik menarik yang ketat antara kelompok Islam

dan non-Islam, serta kedua, adanya sikap inovatif yang kental dan dinamika politik yang tinggi dengan diwarnai sentuhan nasionalisme dalam perspektif fanatisme kelompok yang cukup tinggi. Karena itu, tidak terlalu mengherankan jika dalam segala aspek yang berkaitan dengan kehidupan politik di Sumatera Utara, aspek-aspek keagamaan khususnya Islam dan Kristen, suku-kelompok, wawasan kebangsaan, serta kebutuhan atas gagasan-gagasan pembaruan, selalu tampak mencuat kepermukaan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari dinamika kehidupan politik tersebut secara keseluruhan.

Sudah barang tentu, dinamika kehidupan politik yang demikian, memiliki pengaruh yang besar dan sangat erat kaitannya dengan keberadaan organisasi politik di Sumatera Utara. Secara sederhana, implikasinya yang paling nyata akan terlihat dengan jelas dalam kehadiran suatu organisasi politik di Sumatera Utara dan bagaimana penerimaan masyarakat terhadapnya. Dalam hal ini, jika hasil-hasil pemilihan umum dapat dijadikan sebagai refleksi dari kehadiran organisasi politik

tersebut dan penerimaan masyarakat terhadapnya, maka kecenderungan tadi akan terlihat dengan jelas

Pada pemilu 1955, misalnya, terlihat jelas bahwa yang cukup dominan di daerah pemilihan Sumatera Utara yang ketika itu juga meliputi daerah istimewa Aceh adalah tiga kekuatan politik utama di Indonesia saat itu. Yakni, Masyumi, PNI, dan PKI dengan persentase perolehan suara masing-masing 37,8, 15,8 dan 12,4 persen. Sedangkan partai lain seperti NU, hanya meraih 4,2 persen, Perti dan PSII 5,0 Persen, serta partai-partai Kristen meraih 0,6 persen.

Memang, khusus untuk keunggulan Masyumi, faktor masuknya DI Aceh sebagai bagian dari wilayah pemilihan Sumatera Utara, tentu cukup besar. Akan tetapi, walaupun diasumsikan bahwa setengah dari persentase perolehan suara tersebut berasal dari DI Aceh, maka Masyumi masih memiliki 18,9% suara di Sumatera Utara. Dengan demikian, posisi Masyumi di Sumatera Utara masih cukup kuat serta masih tetap menduduki peringkat pertama.

Tentu saja, tampilnya Masyumi, PNI, dan PKI sebagai kekuatan politik utama di Sumatera Utara pada pemilu 1955 serta relatif kecilnya perolehan partai-partai lain, cukup menjelaskan banyak hal jika dikaitkan dengan keberadaan organisasi politik di Sumatera Utara ketika itu. Untuk itu dengan memperhatikan karakteristik ketiga partai tersebut, kiranya cukup jelas tersirat bahwa pertama-tama berpengaruh dalam kehidupan politik di Sumatera Utara ketika itu adalah seberapa jauh organisasi politik tersebut memiliki komitmen yang besar terhadap gagasan-gagasan kemajuan dan pembaruan, pemihakan terhadap nasib rakyat banyak, serta keutuhan wawasan kebangsaan. Ketiga aspek ini, jelas dimiliki baik oleh Masyumi, PNI dan PKI.

Memang diantara ketiganya, memiliki kekhususan tersendiri dalam menyikapi aspek-aspek tersebut. Masyumi, misalnya, dikenal sebagai partai Islam yang memiliki komitmen kuat terhadap gagasan-gagasan kemajuan dalam pembaruan. PNI yang berideologi nasionalisme lebih kental dengan masalah wawasan kebangsaan, sementara PKI yang berideologi komunisme menampakkan diri sebagai partai yang ingin selalu berpihak kepada rakyat dengan tawaran-tawaran program yang terasa sangat pragmatis.

Selain itu, dari hasil Pemilu 1955 diatas, secara cukup jelas juga terlihat adanya kecendrungan tarik-menarik yang tinggi antara kelompok Islam dengan non-Islam (Kristen, Nasionalis, Sosialis, dan Komunis). Secara keseluruhan, perolehan suara partai-partai Islam adalah 47%, sementara partai-partai non Islam (diluar partai-partai perorangan) sebanyak 38,3%.Memang dalam hal ini, pengaruh agama diluar Islam (Kristen) tampak tidak cukup mencuat secara mencolok kepermukaan Hal ini antara lain disebabkan oleh, Pertama, masuknya DI Aceh yang memiliki penduduk beragama Islam sekitar 97% sebagai bagian dari daerah pemilihan Sumatera Utara sehingga persentase penduduk beragama Kristen menjadi kecil. Kedua, dikalangan penduduk beragama Kristen sendiri memang terlihat adanya kecendrungan yang unik. Pada pemilu 1955 tersebut,yakni mereka tidak secara otomatis menjadi pemilih partai Kristen sebagaimana yang terjadi pada sebagian besar kalangan Islam. Melainkan, mereka umumnya lebih banyak memilih PNI karena sejumlah tokoh partai ini di Sumatera Utara adalah dari kalangan Kristen.

Kecenderungan tarik-menarik antara kelompok Islam dan non-Islam tersebut, semakin jelas lagi terlihat pada pemilu-pemilu berikut. Bahkan, pada pemilu 1971 yang merupakan pemilu pertama dimasa Orde Baru kecendrungan ini nampak berkembang kearah polarisasi antara kelompok Islam dan kelompok Kristen. Memang secara keseluruhan, partai-partai Islam masih tetap unggul dibanding partai-partai Kristen. Yakni dengan total perolehan suara 15.82% berbanding 6.17%. Akan tetapi dibandingkan dengan hasil pemilu 1955, angka-angka tersebut jelas telah bergeser banyak. Selengkapnya perolehan suara masing-masing organisasi politik

pada pemilu 1971 adalah, Golongan Karya (Golkar) tampil sebagai peraih suara terbanyak. Yaitu sebanyak 1.786.028 atau sekitar 70.13% dari 2.546.564 suara yang sah. Sementara itu, empat partai Islam-Parmusi, NU, PSII, dan Perti yang tampil pada Pemilu 1971 tersebut, berturut-turut meraih 187.038 (7.34%), 136.488 (5.35%), 69.837 (2.74%), dan 9.503 suara (0.39%). Sisanya (14.05%), sebanyak 166.135 (6.25%) suara untuk PNI, 111.988 (4.40%) untuk Parkindo, 44.067 (1.73%) untuk Partai Katolik, 31.272 (1.22%) untuk IPKI, dan 34.208 (0.18%) untuk Murba.

Selanjutnya ketika empat partai Islam kemudian berfusi menjadi PPP dan partai non-Islam menjadi PDI pada Pemilu 1977, suara terbanyak masih tetap diraih Golkar. Yaitu sebanyak 2.112.550 (66,46%) dari 3.178.776 suara sah yang masuk. Kemudian menyusul PPP sebanyak 706.289 (22.22%), dan PDI 359.937 (11.32%). Pada Pemilu 1982, Golkar masih tetap unggul dengan perolehan 2.843.427 (72,55%) dari 3.919.563 suara sah yang masuk. Adapun PPP meraih 801.296 (20,44%) suara, sedang PDI 274.840 (7,01%). Pada Pemilu 1987,



perolehan suara Golkar menjadi 3.274.533 (72,76%) dari 4.500.345 suara sah yang masuk, PDI meraih 619.195 (13,76%) suara. Terakhir pada Pemilu 1992, Golkar meraih 3.622.891 (71,30%) dari 5.081.703 suara sah yang masuk, PDI meraih 904.966 (17,80%), dan PPP sebanyak 553.846 atau sekitar 10,90%.

Begitulah baik pada Pemilu 1955 maupun pada lima kali pemilu dimasa Orde Baru, kecenderungan tarik-menarik antara kelompok Islam dan non-Islam, selalu tampak mewarnai kehidupan politik di Sumatera Utara. Bahkan, pada Pemilu 1971, kecenderungan sempat diwarnai oleh polarisasi antara kelompok Islam dan kelompok

Kristen yang cukup menonjol. Sementara itu, dikalangan kelompok partai-partai Islam sendiri, juga terlihat adanya polarisasi lain yang cukup menarik pada Pemilu 1971 tersebut. Hal ini terutama menyangkut perbandingan perolehan suara antara NU dan Parmusi. Seperti diketahui, Parmusi adalah partai baru digelombang politik Indonesia pada Pemilu 1971 tersebut. Partai ini tadinya diharapkan akan menjadi pengganti Masyumi sempat berusaha untuk menghidupkan kembali partai itu. Namun, usaha tersebut mengalami kegagalan. Sebagai gantinya, kemudian lahirlah Parmusi.

Ternyata, harapan bahwa Parmusi akan mampu menggantikan posisi Masyumi, tidak sepenuhnya terakbul. Meski begitu, di Sumatera Utara kehadiran partai ini sebenarnya tidak terlalu mengecewakan meskipun tidak pula tergolong mengembirakan. Setidaknya, diantara empat partai Islam yang ada ketika itu, Parmusi mampu tampil sebagai peraihsuara terbesar. Rupanya, masih ada "sisa-sisa" pendukung Masyumi yang menaruh harapan cukup besar terhadap Parmusi. Dengan demikian, jika dikaitkan dengan hasil Pemilu 1955, konstalasi peta politik diantara

partai-partai Islam sebenarnya tidak banyak berubah. Hanya saja, memang seiring dengan tak cukup meyakinkan performance Masyumi, persentase perolehan suara NU tampak sedikit meningkat. Dan hal ini pada dasarnya adalah gejala yang lazim kendatipun dibalik naiknya persentase perolehan suara NU tersebut tidak secara otomatis dapat dikatakan karena eks pemilih Masyumi beralih ke NU.

Kembali kepada kecenderungan tarik-menarik tadi, dari data diatas terlihat bahwa setelah berlangsungnya fusi, PPP dan PDI tampaknya benar-benar terlibat pertarungan yang seru dimana PPP unggul pada dua pemilu pertama, sementara PDI

di dua pemilu terakhir. Fenomena lain yang agak unik adalah yang terjadi pada PDI. Dari Pemilu 1977 ke Pemilu 1982, perolehan suara PDI tampak mengalami penurunan. Namun, pada Pemilu 1987, PDI tiba-tiba saja naik hampir seratus persen dari Pemilu sebelumnya. Kenaikan ini terus berlanjut hingga Pemilu 1992, meskipun dengan persentase yang lebih kecil. Gejala turunnya perolehan suara PDI dari Pemilu 1977 ke Pemilu 1982, dan kemudian tiba-tiba melonjak pada Pemilu 1987, terutama menjadi unik karena hanya terjadi di Sumatera Utara. Daerah lain pada umumnya justru mengalami hal yang sebaliknya. Yakni sejak Pemilu 1982 terus meningkat. Atau, walaupun ada gejala serupa yang terjadi di daerah lain maka hal itu hanya terlihat di Jawa Tengah. Itupun masih sedikit berbeda karena dari Pemilu 1982 ke Pemilu 1987, PDI tidaklah mencatat kenaikan yang drastis.

Mengapa justru perolehan suara PDI merosot pada Pemilu 1982 sementara pada saat yang sama persentase perolehan suara PPP sebenarnya juga turun, maka untuk menjelaskannya tampaknya perlu sedikit menoleh kebelakang, yakni pada pemilu sebelumnya. Dari data diatas, ternyata membawa dampak yang cukup positif

bagi PPP pada pemilu 1977. Perolehan suaranya dibanding yang diraih empat partai Islam unsur fusi pada Pemilu 1971, jelas lebih baik. Yaitu sebanyak 22,22% atau naik sekitar tujuh persen dibanding perolehan total empat partai Islam pada pemilu 1971 yang hanya 15,82%. Naiknya perolehan suara PPP tersebut, tentu saja mengakibatkan turunnya perolehan suara OPP lain. Golkar, misalnya turun sekitar empat persen, sementara PDI kurang lebih tiga persen dibanding perolehan suara lima partai unsur fusi pada Pemilu 1971. Golkar yang meraih suara lebih 70% pada Pemilu 1971, tampaknya cukup terhenyak karena penurunan itu. Sebab, meski penurunan itu relatif

tidak terlalu besar, namun mengingat keberhasilannya langsung meraih lebih 70% suara pada Pemilu 1971 di Sumatera Utara, penurunan sekecil apa pun pada Pemilu 1977 pastilah terasa menyentak.

Itulah yang tampak terjadi pada Golkar. Penurunan suara sekitar 4% pada Pemilu 1977 dibanding Pemilu 1971, rupanya telah mendorong organisasi politik berlambang pohon beringin ini melakukan konsolidasi besar-besaran menjelang Pemilu 1982. Seluruh kekuatan dihimpun dan setiap peluang untuk meraih suara lebih besar dimanfaatkan. Hasilnya cukup mengembirakan. Setelah turun sekitar empat persen dari Pemilu 1971 ke Pemilu 1977, maka pada Pemilu 1982 perolehan suara Golkar naik sebanyak enam persen. Kenaikan tersebut tentu saja membawa akibat-akibat terjadinya penurunan suara bagi OPP lainnya. Dan, yang paling parah merasakan akibat tersebut adalah PDI yang turun sampai sekitar tiga setengah persen. Cukup tajamnya penurunan suara PDI dibanding PPP, terutama karena sejak berlangsungnya fusi, partai berlambang banteng ini seolah-olah seperti kehilangan akar di Sumatera Utara. Dari lima partai unsur fusi, dapat dikatakan, praktis hanya

tiga yang tampak masih setia membela panji-panji PDI. Dua lainnya, yakni Parkindo dan Partai Katolik, ternyata lebih banyak berpihak kepada Golkar sebagaimana terbukti dari besarnya perolehan suara Golkar di daerah-daerah yang selama ini menjadi kantong partai-partai Kristen.

Tentu saja, disamping kecenderungan tarik-menarik tersebut, yang juga tak kalah menariknya disimak dalam kaitannya dengan kehidupan politik dan keberadaan organisasi politik di Sumatera Utara adalah bagaimana Golkar tampil sebagai kekuatan politik yang dominan. Dengan persentase perolehan suara selalu 70% keatas pada setiap pemilu kecuali pada Pemilu 1977, maka dapat disimpulkan bahwa Golkar di Sumatera Utara cukup mapan dan mendapat penerimaan yang memadai dari masyarakat. Pertanyaannya kemudian adalah apa yang melatarbelakangi keberhasilan Golkar di Sumatera Utara meraih keberhasilan itu? Dalam hal ini, maka tampaknya ada tiga faktor utama yang saling kait mengkait. Pertama adalah kecenderungan kehidupan politik di Sumatera Utara yang seperti telah disebutkan diatas memang relatif cukup terbuka dengan cirinya yang inovatif sehingga kondusif bagi tawaran-tawaran pembaruan dan kemajuan. Kedua, kondisi sosial ekonomi hampir sebagian besar masyarakat Sumatera Utara yang memprihatinkan akibat ketidakstabilan politik pada masa Orde Lama. Ketiga, sikap dasar Golkar sebagai sebuah organisasi politik yang tidak terikat pada salah satu ideologi tertentu berupa kelompok maupun agama. Atau dengan kata lain, Golkar adalah organisasi politik yang netral terhadap ideologi keagamaan maupun kelompok, sehingga memiliki kemampuan pemihakan yang sama terhadap setiap agama atau kelompok.

Begitulah, dengan kondisi kehidupan politik yang tidak cukup stabil serta kehidupan sosial-ekonomi sebagian besar masyarakat yang kurang mengembirakan. Golkar tampil memberi jawaban. Disamping itu, dengan posisi sebagai motor penggerak sekaligus eksponen utama Orde Baru, maka jawaban-jawaban yang ditawarkan Golkar pada dasarnya adalah juga suara Orde Baru. Dalam hal ini dapat dikatakan, Golkar sesungguhnya identik dengan Orde Baru itu sendiri. Dan sebagaimana halnya Orde Baru penampilan Golkar dipanggung Pemilu memang tampak jauh berbeda dari OPP lain. Organisasi ini sama sekali tak pernah bicara

tentang ideologi yang berkaitan dengan isme keagamaan atau kelompok akan tetapi lebih menonjolkan diri pada tawaran-tawaran program yang kongkret. Bagi Golkar panggung kampanye adalah arena untuk bicara tentang usaha-usaha pembangunan. Sehingga meskipun kegiatan tersebut pada dasarnya adalah peristiwa politik, namun sebenarnya muatan politisnya cenderung kecil

Meski begitu, Golkar tidaklah serta merta melupakan aspirasi kelompok atau agama. Bahkan sebaliknya aspirasi itu ditangkap dengan baik dan mendapat perhatian yang besar. Tapi karena sejak semula Golkar memang menghindari diri dari urusan-urusan ideologi kepartaian, aspirasi itu tidak didekati secara ideologis. Itu sebabnya dalam tubuh Golkar setiap kelompok cukup mendapat posisi yang sama. Bahkan dapat dikatakan kekuatan utama Golkar adalah pada berhimpunnya kelompok-kelompok yang merupakan golongan-golongan kekarayaan dimasyarakat. Dengan demikian, Golkar praktis tak menghadapi hambatan-hambatan ideologis yang lazim berlaku bagi partai politik, serta dengan mudah bisa diterima dan menerima kelompok manapun dalam masyarakat. Demikianlah Golkar hadir di Sumatera Utara

dalam lima kali Pemilu berlangsung sepanjang Orde Baru. Selanjutnya, tentang PDI yang tampak mulai bangkit sejak Pemilu 1987, dan PPP yang terus merosot sejak Pemilu 1982, agaknya harus kembali dilihat pada performance kedua partai ini.

Dalam hal kebangkitan PDI, maka faktor yang terutama tampak menonjol adalah strategi baru yang dilancarkan partai ini. Seperti diketahui pada dua pemilu sebelumnya, PDI biasanya cenderung lebih banyak melontarkan isu berbau ideologis seraya melontarkan kritik demi kritik sehingga partai ini terkesan sebagai oposan. Bagi masyarakat Sumatera Utara yang telah terbiasa dengan dunia politik, jelas hal itu tidak akan dengan mudah diterima begitu saja. Sebab dalam kenyataannya yang dilakukan PDI hanya sebatas mengkritik dan belum pernah memperlihatkan bukti-bukti kongkret tentang hal-hal yang dikritiknya. Malahan kepengurusan partai ini sempat mengalami perpecahan berkepanjangan. Kenyataan-kenyataan demikian tentu saja dilihat masyarakat terhadap partai ini tidaklah membaik malahan sebaliknya makin merosot.

Akan tetapi, pada Pemilu 1987, PDI tampak meninggalkan cara-cara lama itu. Kritik dan isu berbau ideologi ditinggalkan serta diganti dengan tawaran-tawaran program dan komitmen-komitmen kerakyatan yang kongkret. Seiring dengan itu PDI juga melakukan peremajaan besar-besaran dengan menampilkan lebih banyak tokoh-tokoh muda, sehingga persentase antara kelompok tua dan kelompok muda, menjadi lebih berimbang. Perubahan ini tampaknya cukup mengundang simpati masyarakat Sumatera Utara, sehingga perolehan suara PDI pada Pemilu 1987 langsung melonjak tajam. Hal ini bahkan terus pada Pemilu 1992. Sebaliknya dengan PPP tampak masih terus mempertahankan cara-cara berpolitik yang lama. Isu keagamaan masih selalu

mewarnai penampilan partai ini. Disamping itu kegemarannya melancarkan kritik demi kritik seraya cenderung bersikap oposan, juga terus dipertahankan.

Sayangnya, dipihak lain sikap dan kesadaran politik masyarakat telah banyak berubah. Mereka bukan saja tak mudah lagi dipukau oleh pandangan-pandangan politik yang serba mengawang-ngawang tanpa pijakan program yang kongret, tapi juga telah mampu melihat performance sesuatu organisasi politik. Dan PPP hingga Pemilu 1987 berlangsung ternyata masih belum mampu mengatasi kemelut internalnya. Hal ini kemudian masih diperparah lagi oleh ketidakmampuan partai ini merumuskan gagasan-gagasan berpolitiknya secara kongkret dalam uraian program-program yang nyata untuk masyarakat. Tak heran jika dari pemilu ke pemilu perolehan suara PPP terus merošot. Bahkan, yang lebih memprihatinkan pada pemilu 1992, ketidakpopuleran PPP semakin menjadi-jadi di Sumatera Utara. Padahal, secara Nasional maupun di beberapa daerah, PPP justru mampu menambah perolehan suara. Agaknya, dari pengalaman yang sudah-sudah masyarakat Sumatera Utara belum sepenuhnya kembali percaya kepada PPP. Dipihak lain penampilan PDI yang cukup memikat (apalagi belakangan juga mulai mendekati kalangan Islam), sementara ini telah menjadi semacam alternatif bagi masyarakat.

### 2.3. Pemilu 1987 dan 1992

Setelah melihat keberadaan organisasi politik di Sumatera Utara secara umum sejak Pemilu 1955 hingga 1992, tentunya menarik pula disimak lebih lanjut keberadaan organisasi politik secara khusus di daerah-daerah tingkat II berdasarkan hasil-hasil Pemilu 1987 dan 1992.

Tabel 1

#### PEROLEHAN SUARA KETIGA OPP PADA PEMILU 1987 DAN 1992

KAB/KODYA DAERAH TINGKAT II	1987			1992		
	PPP	GOLK AR	PDI	PPP	GOLKAR	PDI
Kab Deli Serdang	90.736	463.458	141.917	65.896	423.826	156.457
Kab Karo	1.983	103.379	16.087	1.934	115.952	17.959
Kab Langkat	51.346	246.554	68.404	53.615	240.341	93.884
Kab Tapanuli Tengah	4.153	85.899	4.396	2.248	96.251	4.843
Kab Simalungun	23.223	316.989	55.974	19.595	323.313	61.622
Kab Labuhan Batu	25.389	253.653	35.803	16.965	339.338	22.268
Kab Dairi	3.354	105.007	9.789	2.236	111.912	10.899
Kab Tapanuli Utara	890	307.121	14.894	1.604	270.728	40.958
Kab Tapanuli Selatan	103.856	284.943	21.246	101.182	337.295	42.498
Kab Asahan	73.675	244.452	79.798	60.602	314.758	69.437
Kab Nias	1.014	265.367	4.204	266	286.673	3.640
Kodya Medan	185.185	451.453	132.868	155.676	465.549	245.667
Kodya Tebing Tinggi	10.983	35.079	4.497	8.237	37.787	11.698
Kodya Binjai	8.565	26.501	6.186	13.562	46.444	27.278
Kodya Pematang Siantar	9.246	46.201	14.820	9.758	60.4666	28.706
Kodya Tanjung Balai	3.996	15.462	4.544	14.397	25.789	10.632
Kodya Sibolga	4.217	22.620	2.191	4.384	24.028	3.906

Sumber : Anonymous ( 1992 ), Profil Provinsi Sumatera Utara



Seperti diketahui, dua Pemilu terakhir ini dapat dikatakan agak berbeda dibanding Pemilu sebelumnya. Paling tidak ada dua alasan pokok mengapa dua Pemilu ini disebut berbeda dengan Pemilu sebelumnya. Pertama, pada Pemilu 1987-lah ketiga Organisasi Peserta Pemilu (OPP) untuk pertama kalinya tampil dengan satu asas yang sama Pancasila menyusul diberlakukannya UU No.3 1985 tentang Partai politik dan Golongan Karya. Artinya, dengan demikian praktis suatu organisasi politik tak lagi memiliki peluang bermain-main dengan ideologi dalam mendekati masa, melainkan harus lebih kepada program-program. Kedua, keluarnya NU dan PPP menyusul keputusan organisasi tersebut untuk kembali ke Khittah '26, yakni garis dasar perjuangan NU ketika pertama kali didirikan. Keputusan tersebut diambil dalam Muktamar Situbondo. Dengan demikian mulai Pemilu 1987, NU tak lagi terlibat dalam kegiatan politik praktis (melalui PPP) dan kemudian membebaskan warganya untuk memilih OPP yang disukai.

Sudah barang tentu tidak semua daerah diseluruh Indonesia ketidakterlibatan NU sebagai lembaga dalam politik praktis secara langsung (melalui wadah PPP) akan membawa dampak terhadap kehidupan berpolitik dan keberadaan suatu organisasi politik secara keseluruhan di daerah-daerah tersebut. Hal ini terutama untuk daerah-daerah tertentu yang selama ini memang menjadi basis NU. Namun, berlakunya UU No 3/1985, jelas membawa dampak yang tidak sedikit. Memang secara khusus mungkin tidak terlalu mengubah peta kehidupan politik pada umumnya, sebab sebagian besar ketentuan yang ada pada UU No.3 1975 juga masih tercantum dalam UU No.3 1985. Akan tetapi, pada bagian yang lain misalnya menyangkut konsepsi

massa mengambang yang terasa lebih dipertegas jelas membawa dampak terhadap kehidupan dan kegiatan berpolitik didaerah-daerah.

Begitulah dalam semangat satu asas serta tidak tampilnya lagi NU dibawah panji-panji PPP, pemilu 1987 dan 1992 berlangsung. Untuk daerah pemilihan Sumatera Utara, kedua hal tersebut dapat dikatakan tidak terlalu banyak berpengaruh terhadap konstalasi politik secara keseluruhan. Memang perolehan suara PPP pada pemilu 1987 tampak merosot tajam, sementara PDI mengalami kenaikan yang drastis. Akan tetapi dilihat dari posisi Golkar, dapat dikatakan nyaris tidak ada perubahan. Persentase perolehan suara Golkar dibanding Pemilu 1982, prakti tidak banyak berubah baik berupa penurunan maupun kenaikan. Sedangkan pada pemilu 1992, Golkar turun sekitar 2% dari keadaan Pemilu 1987. Dominasi Golkar tersebut juga terlihat didaerah-daerah tingkat II, baik pada Pemilu 1987 maupun 1992.

### BAB III

## PROSES PENYELENGGARAAN SERTA PEMANFAATAN JARINGAN POLITIK CALON DAN ANGGOTA DPD DALAM MERAIH KEMENANGAN PEMILU 2004

### 3.1 PEMILU 2004 DAN KEBERADAN DPD

MILIK PERPUSTAKAAN  
UNIMED

Dalam Negara Republik Indonesia yang majemuk, dan berwawasan kebangsaan, partai politik (Parpol) merupakan saluran utama untuk memperjuangkan kehendak atau aspirasi masyarakat, bangsa dan negara. Selain itu partai politik (Parpol) juga sebagai wadah kaderisasi dan rekrutmen kepemimpinan Nasional dan penyelenggaraan negara.

Oleh karena itu setiap pesta demokrasi ( pemilihan umum ) masyarakat tidak dapat menyalurkan aspirasinya terhadap figur seorang tokoh yang dikehendaki oleh rakyat. Hal ini disebabkan partai politik (Parpol) yang berhak menentukan wakil-wakil rakyat untuk duduk di DPR dan DPRD apabila partainya menang dalam pemilihan umum.

Akan tetapi keresahan masyarakat yang pada masa pemilu sebelumnya tidak bisa menyalurkan aspirasinya atas kehendak yang diinginkannya, terlaksana pada pesta demokrasi ( pemilihan umum ) tahun 2004 yang lalu, dimana rakyat menentukan sendiri wakil-wakilnya atau secara langsung dipilih oleh rakyat.

Selain itu pada pesta demokrasi ( pemilihan umum ) tahun 2004 rakyat juga menentukan wakilnya untuk duduk menjadi anggota DPD (Dewan Perwakilan Daerah), yang pada pemilu sebelumnya tidak ada karena yang menjadi anggota MPR

adalah anggota DPR ditambah dengan utusan golongan dan utusan daerah. Sedangkan pada pemilu 2004 yang menjadi anggota MPR adalah anggota DPR ditambah dengan anggota DPD yang diwakili oleh setiap provinsi di Indonesia sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Keberadaan DPD (Dewan Perwakilan Daerah) di lembaga negara adalah untuk mengakomodasi aspirasi daerah, maka dipilihlah anggota DPD (Dewan Perwakilan Daerah) untuk memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang pesertanya adalah perseorangan atau bukan melalui kendaraan partai politik (parpol) tertentu.

Hal ini dilaksanakan agar sesuai dengan amanat Reformasi, penyelenggaraan pemilihan umum harus dilaksanakan secara lebih berkualitas agar lebih menjamin derajat kompetisi yang sehat, partisipatif, mempunyai derajat keterwakilan yang lebih tinggi dan memiliki mekanisme pertanggung jawaban yang jelas.

### **3.1.1. Pengertian**

- A. Dewan perwakilan Daerah (DPD), adalah wakil-wakil daerah provinsi, yang dipilih dari calon perserongan melalui pemilihan umum (Pemilu).
- B. Sebagai Dewan Perwakilan Daerah, kedudukannya adalah merupakan bagian tak terpisahkan dengan keberadaan lembaga parlemen di Indonesia yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, selanjutnya disebut MPR-RI.

Hal ini adalah sesuai dengan isi UUD'45 yang telah diamandemen pada BAB II tentang "Majelis Permusyawaratan Rakyat" (pasal 2) ayat i, menyatakan bahwa, "Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah, yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang".

C. Guna pemahaman kita tentang keberadaan DPD, UUD 45 dalam isi pasal-pasal nya menguraikan bahwa :

1. Bunyi BAB VII A tentang Dewan Perwakilan Daerah , pasal 22 C, menggaris bawahi sebagaimana bunyi :

- Ayat 1. Bahwa anggota DPD dipilih dari setiap propinsi melalui pemilihan umum.
- Ayat 2. Anggota DPD dari setiap provinsi, jumlahnya sama dan jumlah anggota DPD itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota DPR.
- Ayat 3. DPD bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.
- Ayat 4. Susunan dan kedudukan DPD diatur dengan Undang-Undang.

2. Dapat memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan Undang-Undang tentang :

- a. Anggaran pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
- b. Hal-hal yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama.

3. Dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai :

- a. Otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah.
- b. Hubungan pusat dan daerah.
- c. Pengelola Sumber daya alam dan ekonomi.
- d. Pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan dan agama.

Yang kesemuanya itu dibebani kewajiban yaitu :

- menyampaikan hasil pengawasannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat, untuk menjadi bahan pertimbangan dan ditindaklanjuti.
- sebagai anggota DPD, mereka adalah peserta pemilihan umum yang terdiri dan mencalonkan diri selaku perorangan dari provinsi tempatnya berdomisili, yang untuk berbagai persyaratannya diatur dalam Undang-Undang.

### 3.1.2. Ketentuan menjadi Calon anggota DPD.

Pada pemilihan Umum 2004 keberadaan DPD adalah suatu hal yang baru bagi masyarakat Indonesia. Oleh karena itu masyarakat diberi kesempatan untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPD tanpa diaakung oleh partai-partai politik.

Dengan kesempatan yang telah diberikan kepada masyarakat, maka pada pemilihan umum tahun 2004 di Sumatra Utara terdaftar 49 orang yang berhak dan telah memenuhi syarat menjadi calon anggota DPD. Dari 49 orang ini yang akan diambil menjadi anggota DPD sebanyak 4 orang.

Langkah pertama yang dilakukan calon anggota DPD peserta pemilu dari perseorangan harus memenuhi syarat dukungan dengan ketentuan undang-undang

BAB II Peserta Pemilu Umum, pasal 11 yang berbunyi :

- (1) a. Provinsi yang berpenduduk sampai dengan 1.000.000 (satu juta) orang harus di dukung sekurang-kurangnya oleh 1.000 (seribu) orang pemilih.
- (2) b. Provinsi yang berpenduduk lebih dari 1.000.000.(satu juta) orang sampai dengan 5.000.000 (lima juta) orang harus didukung sekurang-kurangnya oleh 2.000 (dua ribu) orang pemilih.
- c. Provinsi yang berkependuduk lebih dari 5.000.000 (lima juta) orang sampai dengan 10.000.000 (sepuluh juta) orang harus didukung sekurang-kurangnya oleh 3.000 (tiga ribu) orang pemilih
- d. Provinsi yang berkependuduk lebih dari 10.000.000 (sepuluh juta) orang sampai dengan 15.000.000 (lima belas juta) orang harus didukung sekurang-kurangnya oleh 4.000 (empat ribu) orang pemilih.
- e. Provinsi yang berkependuduk lebih dari 15.000.000 (lima belas juta) orang harus didukung sekurang-kurangnya oleh 5.000 (lima ribu) orang pemilih..
- (3) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebar sekurang-kurangnya 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah 7 kabupaten di provinsi yang bersangkutan.

- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan tanda tangan dan foto kopi kartu tanda penduduk (KTP) atau identitas lain yang sah.
- (5) Seorang penduduk tidak diperbolehkan memberikan dukungan kepada lebih satu orang calon anggota DPD.
- (6) Dukungan yang diberi kepada lebih dari satu orang calon anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan batal.

Adapun jumlah penduduk Provinsi Sumatera Utara menurut Kabupaten/ Kota tahun 1961 - 2000 dapat dilihat pada tabel dibawah :



**Tabel 2**  
**Jumlah Penduduk Provinsi Sumatera Utara menurut**  
**Kabupaten/Kota Tahun 1961 – 2000**

Kabupaten/Kota	1961	1971	1980	1990	2000
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Nias	314.829	370.825	468.375	589.184	633.416
2. Mandailing Natal	-	-	254.342	308.782	359.843
3. Tapanuli Selatan <sup>1)</sup>	495.06	628.394	502.817	645.55	734.364
4. Tapanuli Tengah	100.795	135.857	167.161	214.467	244.679
5. Tapanuli Utara <sup>2)</sup>	560.384	622.535	390.939	406.244	407.711
6. Toba Samosir	-	-	291.493	289.533	304.125
7. Labuhan Batu	255.997	360.153	547.171	733.521	844.924
8. Asahan	403.006	593.534	775.653	884.534	935.853
9. Simalungun	496.236	862.257	759.024	805.365	855.802
10. Dairi	138.276	184.829	241.765	276.98	262.857
11. Karo	147.673	182.156	219.204	257.981	283.713
12. Deli Serdang	971.821	1.430.965	1.241.190	1.802.749	1.959.488
13. Langkat	341.615	519.459	732.059	812.229	906.665
14. Sibolga	38.658	42.223	59.897	71.895	82.311
15. Tanjung Balai	29.152	33.604	41.894	108.202	132.438
16. Perm. Siantar	114.87	129.232	150.376	219.328	241.524
17. Tebing Tinggi	26.228	30.314	92.087	116.767	125.006
18. Medan	479.098	635.562	1.378.955	1.730.752	1.905.687
19. Binjai	45.235	59.882	76.464	181.904	213.76
<b>SUMATERA UTARA</b>	<b>4.964.734</b>	<b>6.621.831</b>	<b>8.360.894</b>	<b>10.256.027</b>	<b>11.513.973</b>

**Keterangan :** \*) Termasuk Penduduk Bertempat Tinggal tidak tetap

1) Masih termasuk Kabupaten Mandailing Natal

2) Masih termasuk Kabupaten Toba Samosir

**Sumber :** SP 2000, BPS Provinsi Sumatera Utara.

Dari tabel diatas dapat dilihat calon anggota DPD Sumatera Utara harus mengumpulkan 4000 (empat ribu) orang pemilih berdasarkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas lain yang sah agar bisa memenuhi syarat menjadi calon anggota DPD. Hal ini mengingat jumlah penduduk Sumatera Utara lebih dari 10.000.000 (Sepuluh juta ) sampai dengan 15.000.000 (Lima belas juta) orang.

### 3.2. JARINGAN POLITIK CALON DAN ANGGOTA DPD

Pola jaringan politik calon dan anggota DPD (Dewan Perwakilan Daerah) pada dasarnya tidak jauh berbeda, namun strategi yang dijalankan nampaknya menjadi tolak ukur kegagalan dan keberhasilan calon tersebut, sebab strategi calon dan anggota DPD ini lebih didasari kepada kemampuan untuk merekrut massa pendukung.

Sedangkan penentuan keberhasilan calon anggota DPD untuk duduk hanya didasarkan kepada peringkat jumlah suara terbanyak yang diperoleh pada pemilihan umum tahun 2004. Hal ini berbeda dengan penentuan calon anggota legislatif yang berasal dari partai politik (parpol) tertentu, sebab penentuan calon legislatif didasarkan kepada nomor urut caleg yang telah ditetapkan oleh partainya masing-masing.

Oleh karena itu calon anggota DPD harus mampu merekrut massa pendukung dari setiap Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. Data jumlah calon pemilih menurut Jenis Kelamin di Sumatera Utara sampai 31 Desember 2003 perempuan sebanyak 3.839664 orang, laki-laki sebanyak 3.733713 orang. Sedangkan perkiraan TPS (Tempat Pemungutan Suara) menurut Kabupaten-Kota sebanyak 28.063. Adapun jumlah calon pemilih menurut jenis kelamin dan jumlah perkiraan TPS menurut Kabupaten/Kota di Sumut dapat dilihat pada tabel dibawah :

**Tabel 3**  
**Jumlah Calon Pemilih menurut jenis kelamin dan jumlah**  
**Perkiraan TPS menurut Kabupaten/Kota**

NO.	Kabupaten/Kota	Pemilih			TPS
		Laki-Laki	Perempuan	Total	
01	Nias	112787	127913	240702	1022
02	Mandailing Natal	100101	111476	211577	869
03	Tapanuli Selatan *	227504	238589	466093	2275
04	Tapanuli Tengah	78759	79368	158127	585
05	Tapanuli Utara	72308	78001	150309	614
06	Toba Samosir	85179	89132	174311	704
07	Labuhan Batu	282364	276169	558533	1987
08	Asahan	312467	312729	625264	2220
09	Simahungun	255133	261026	516159	1876
10	Dairi	72496	75789	148285	559
11	Karo	98508	102684	201192	800
12	Deli Serdang	666140	670396	1336536	4776
13	Langkat	311118	305029	616147	2170
14	Nias Selatan	72354	75979	148333	610
15	Humbang Hasundutan	42456	44945	87401	335
16	PakPak Barat	9833	9723	19556	97
17	Sibolga	26462	26367	52829	184
18	Tanjung Balai	44318	44536	88854	315
19	Pematang Siantar	70462	76643	147105	515
20	Tebing Tinggi	43350	45623	88973	311
21	Medan	675309	709831	1385140	4714
22	Binjai	74305	77646	151951	525
<b>TOTAL</b>		<b>3733713</b>	<b>3839664</b>	<b>7573377</b>	<b>28063</b>

**Keterangan** : Tapanuli Selatan dan Padang Sidempuan

**Sumber** : BPS Sumatera Utara dan KPU Provinsi SUMUT 20 Januari 2004

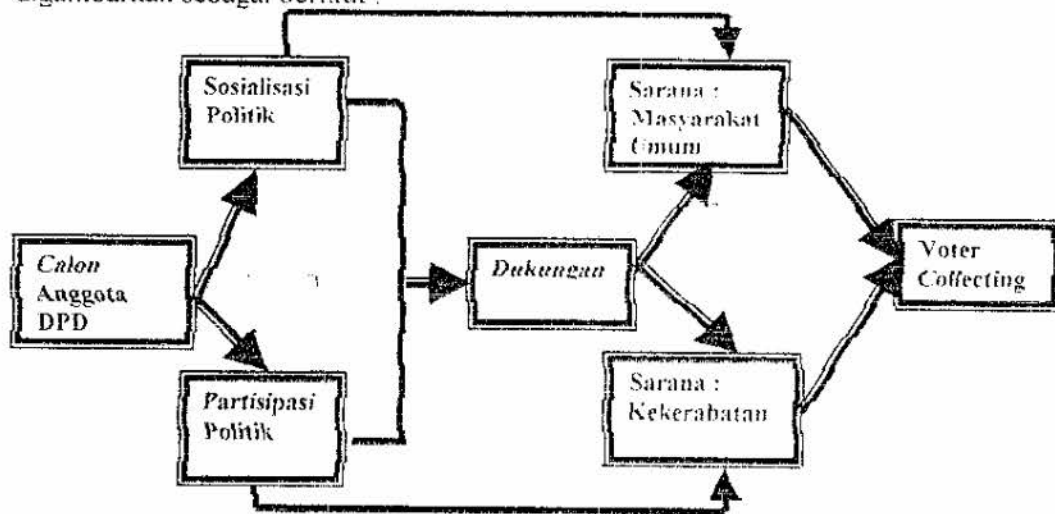
Tabel diatas merupakan jumlah calon pemilih menurut jenis kelamin dan jumlah perkiraan TPS (Tempat Pemungutan Suara) menurut Kabupaten/Kota. Dengan adanya jumlah calon pemilih akan memudahkan untuk mengetahui pola jaringan calon dan anggota DPD di Sumatera Utara.

### 3.2.1. Jaringan Politik Calon Anggota DPD Yang Belum Berhasil

Pada dasarnya calon anggota DPD memanfaatkan jaringan politik antara lain berdasarkan hubungan kekerabatan, agama, political cost dan keterlibatan tim sukses (TS) dalam meraih dukungan suara pada pemilihan umum tahun 2004. Akan tetapi perolehan suara yang diperoleh calon anggota DPD ini sepertinya tidak signifikan di Kabupaten/Kota yang ada di Sumatera Utara.

Oleh karena itu, walaupun calon anggota DPD ini memanfaatkan jaringan politik berdasarkan kategori hubungan kekerabatan, agama, political cost dan tim sukses namun calon anggota DPD belum berhasil menjadi anggota legislatif, sebab jaringan politik yang dilakukan dalam meraih dukungan suara pada pemilu 2004 sepertinya belum maksimal.

Jaringan politik calon anggota DPD yang gagal duduk sebagai anggota DPD untuk mewakili Sumatera Utara pada pemilu 2004 secara garis besar dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1 Strategi jaringan politik calon anggota DPD ( Model 1 )

Jaringan politik calon anggota DPD pada pemilu 2004 dapat dilihat seperti gambar 1 diatas. Jaringan politik calon anggota DPD ini dilakukan melalui cara. *Pertama*, melalui Sosialisasi Politik yaitu dengan mencari dukungan kepada masyarakat umum yang sudah mengenal maupun yang belum mengenal calon anggota DPD ini. Sosialisasi Politik yang yang dilakukan anggota DPD ini juga dengan berbagai cara, misalnya dengan temu ramah dan diskusi dengan tujuan untuk menyampaikan visi dan misinya apabila berhasil duduk menjadi anggota DPD. Hal ini seperti yang dikatakan Bapak Bachtiar Djafar melalui wawancara sebagai berikut :

**“Pertanyaan :** “Bagaimana usaha Bapak untuk mensosialisasikan diri agar dipilih masyarakat?  
**Jawab :** “Saya mengundang mereka kerumah untuk temu ramah dan diskusi.

Selain menyampaikan visi dan misi, agar mudah dikenal masyarakat calon anggota DPD ini juga membagikan spanduk, gambar-gambar dan kalender kepada masyarakat. Oleh karena itu Sosialisasi Politik seperti diatas meyakinkan mereka bahwa masyarakat akan memilihnya. *Kedua*, melalui Partisipasi Politik yaitu dengan mencari dukungan dari kerabat seperti kerabat dekat antara lain keluarga, kerabat berdasarkan hubungan satu daerah dan marga yang sama. Partisipasi Politik yang dilakukan calon anggota DPD ini juga dengan berbagai cara karena menurut mereka hubungan kekerabatan merupakan modal setiap orang untuk memperoleh dukungan terlebih juga halnya dalam berpolitik.

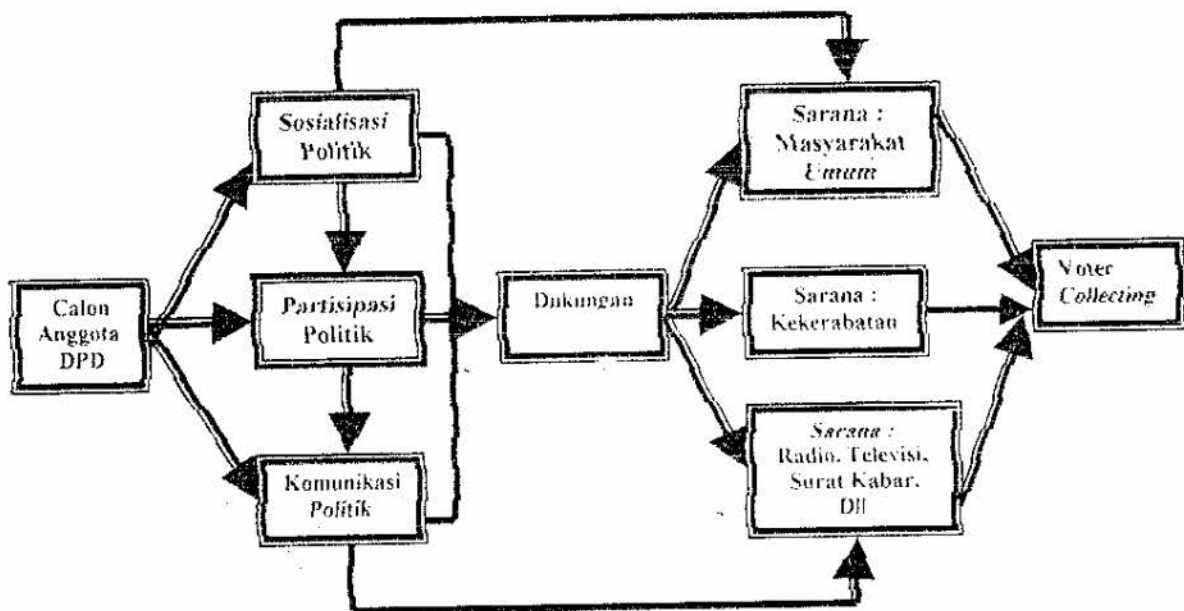
Seperti yang dikatakan Bapak Ali Khotib Hrp melalui wawancara sebagai berikut :

**“Pertanyaan :** “Apakah Bapak memanfaatkan hubungan kekerabatan dalam meraih dukungan dalam Pemilu?”

**Jawab :** Ya, karena lebih mudah dalam langkah-langkah pendekatan sasaran”.

Selanjutnya menurut Ali Khotib Hrp, dengan Partisipasi Politik berdasarkan hubungan kekerabatan tersebut beliau memperoleh dukungan suara dominan seperti di Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Labuhan Batu, Kabupaten Madina, Kabupaten Asahan dan Kabupaten Deli Serdang.

Strategi jaringan politik calon anggota DPD juga dapat digambarkan sebagai berikut :



**Gambar 2** Strategi jaringan politik calon anggota DPD ( Model 2 )

Dari gambar 2 diatas terlihat bahwa jaringan politik calon anggota DPD dilakukan melalui tiga tahapan. *Pertama*, melalui Sosialisasi Politik yaitu dengan mencari dukungan kepada masyarakat umum melalui visi, misi, ketokohan dan

bergaul dengan masyarakat. Hal seperti ini tidak sulit dilakukan mengingat calon anggota DPD sudah banyak dikenal masyarakat. *Kedua*, melalui Partisipasi Politik yaitu dengan memperoleh dukungan kerabat dekat dan teman sejawat. Partisipasi Politik calon anggota DPD berdasarkan hubungan kekerabatan yang telah terbina dari sejak awal dan bukan hanya ketika mereka mencalonkan diri sebagai calon anggota DPD pada waktu itu. Disamping itu juga faktor kedekatan emosional juga mempengaruhi pemilih dalam menentukan pilihannya terhadap calon.

Hal ini seperti yang dikatakan Sulben Siagian melalui wawancara sebagai

berikut :

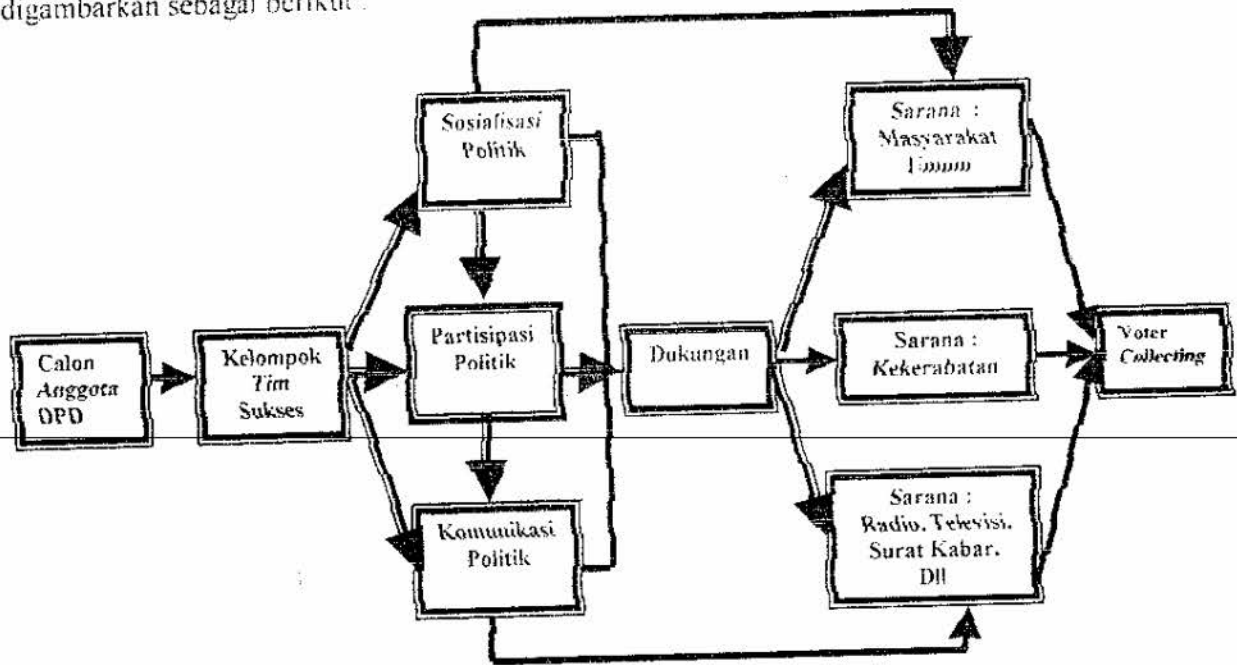
**"Pertanyaan :** "Apakah hubungan kekerabatan itu terjalin ketika Bapak mau mencalonkan diri sebagai anggota DPD saja? (maksudnya, walaupun pemilih tidak mengenal Bapak tetapi memilih karena etnis yang sama).

**Jawab :** "Ya", karena saya sudah dikenal sebagai wartawan,red".

Selanjutnya menurut Sulben Siagian perolehan dukungan suara dengan melibatkan hubungan kekerabatan tersebut sekitar 75% dari daerah beliau berasal dan dukungan keluarga, teman dan kerabat. *Ketiga*, melalui Komunikasi Politik yaitu memperoleh dukungan suara berdasarkan sering tampilnya di media massa dan elektronik seperti radio, televisi dan surat kabar. Komunikasi Politik seperti ini sangat menguntungkan calon karena menurut informan, faktor ketokohan dan seringnya muncul di media menjadi dikenal masyarakat walaupun kita belum mengenal mereka.

Dengan demikian, cara ini akan menguntungkan apabila masyarakat belum bisa menentukan pilihannya. Seperti yang dilakukan Sulben Siagian yang mensosialisasikan diri melalui media, sehingga dukungan suara yang diperoleh beliau juga significant seperti di Kabupaten Asahan, Medan dan Deli Serdang.

Strategi jaringan politik calon anggota DPD ( Dewan Perwakilan Daerah ) juga dapat digambarkan sebagai berikut :



**Gambar 3 Strategi jaringan politik calon anggota DPD ( Model 3 )**

Dari gambar 3 diatas terlihat bahwa strategi jaringan politik calon anggota DPD lainnya yang belum berhasil duduk diparlemen sebenarnya menunjukkan langkah yang strategis. *Pertama*, calon anggota DPD ini bersama dengan Tim Sukses mereka saling bekerjasama dalam mensukseskan calon. Adapun keterlibatan Tim Sukses dalam mendulang suara yang akan dikumpulkan bukan dari satu Kabupaten/ kota, namun diseluruh Kabupaten/ Kota yang ada di Sumatera Utara. Langkah pertama yang dilakukan oleh calon anggota DPD tersebut adalah dengan Sosialisasi Politik yaitu dengan mencari dukungan masyarakat terhadap si calon. Sosialisasi Politik ini dijalankan pada dasarnya untuk memperjuangkan agar calon dipilih oleh rakyat , karena dengan Sosialisasi Politik bisa menyampaikan visi dan



misi si calon dengan menyampaikan sebuah keinginan. Akan tetapi, Sosialisasi Politik yang harus dilakukan kesetiap Kabupaten Kota yang ada di Sumatera Utara tidaklah mudah, karena sangat membutuhkan uang, waktu dan tenaga si calon, sebab calon anggota DPD ini harus berjuang sendiri tanpa disupport oleh kendaraan partai politik. Untuk itu keterlibatan Tim Sukses (TS) sangat diharapkan guna membantu si calon dalam mensosialisasikan diri.

Hal ini seperti yang dikatakan Robert Valentino Tarigan melalui wawancara sebagai berikut :

**“Pertanyaan : “Bagaimana usaha Bapak untuk mensosialisasikan diri agar dipilih masyarakat?”**  
**Jawab : “Saya serahkan semua kepada rakyat dan Tim Sukses yang mensosialisasikan saya sebagai Direktur BIMA yang cabang-cabangnya ada disetiap Kabupaten / Kota di Sumut”.**

*Kedua*, calon anggota DPD dan juga dibantu oleh Tim Sukses ( TS ) mereka melakukan langkah Partisipasi Politik yaitu dengan mendekati diri kepada keluarga, kerabat, teman dengan menyampaikan keinginan akan menjadi calon anggota DPD ( Dewan Perwakilan Daerah ). Namun usaha pendekatan kepada keluarga, kerabat, teman seperti ini bukan hanya terjalin ketika akan menjadi calon anggota DPD saja, sebab pada dasarnya masyarakat sendiri sudah mengenal calon sebelumnya. Jadi faktor hubungan kekerabatan bukan hanya semata-mata menjadi tolak ukur dalam memperoleh dukungan, dan apabila karena faktor hubungan kekerabatan masyarakat memilih calon terkadang mereka sendiri kecewa dengan ketidakmampuan seseorang yang mereka dukung tersebut dalam melakukan sebuah perubahan.

Dan yang lebih menarik apa yang dikatakan oleh Robert Valentino bahwa beliau tidak memanfaatkan hubungan kekerabatan dalam meraih dukungan dalam Pemilu, karena menurutnya masyarakat memilih beliau karena dianggap cerdas dan membawa aspirasinya. Akan tetapi kenyataannya di Kabupaten Karo perolehan suara Robert Valentino sangat significant bahkan beliau mendapatkan suara tertinggi dari Kabupaten Karo yaitu 61.008 suara.

Hal ini ditanyakan kepada beliau dan mengatakan bahwa, "Orang Karo memilih saya itu hak mereka, tapi saya tidak pernah memanfaatkan marga saya bahkan saya tak pandai bahasa Karo". Apa yang mendasari pemilih khususnya masyarakat Karo terhadap Robert Valentino, menurutnya hasil perolehan suara yang menempatkan beliau menjadi urutan ke-8 dari 48 orang calon anggota DPD ( Dewan Perwakilan Daerah ) adalah usaha dari diri pribadi dan Tim Suksesnya.

Dengan demikian sebenarnya hubungan kekerabatan bukan semata-mata mudah dalam mencari dukungan, namun hubungan seperti ini sudah menjadi alasan pemilih yang terbawa kedalam kepekaan emosional dirinya dalam menentukan pilihannya. *Ketiga*, calon anggota DPD ini berusaha untuk melakukan Komunikasi Politik yaitu mencari dukungan masyarakat dengan tampilnya ke media massa. Hal ini dilakukan supaya masyarakat mengenal dan mengetahui visi dan misi si calon.

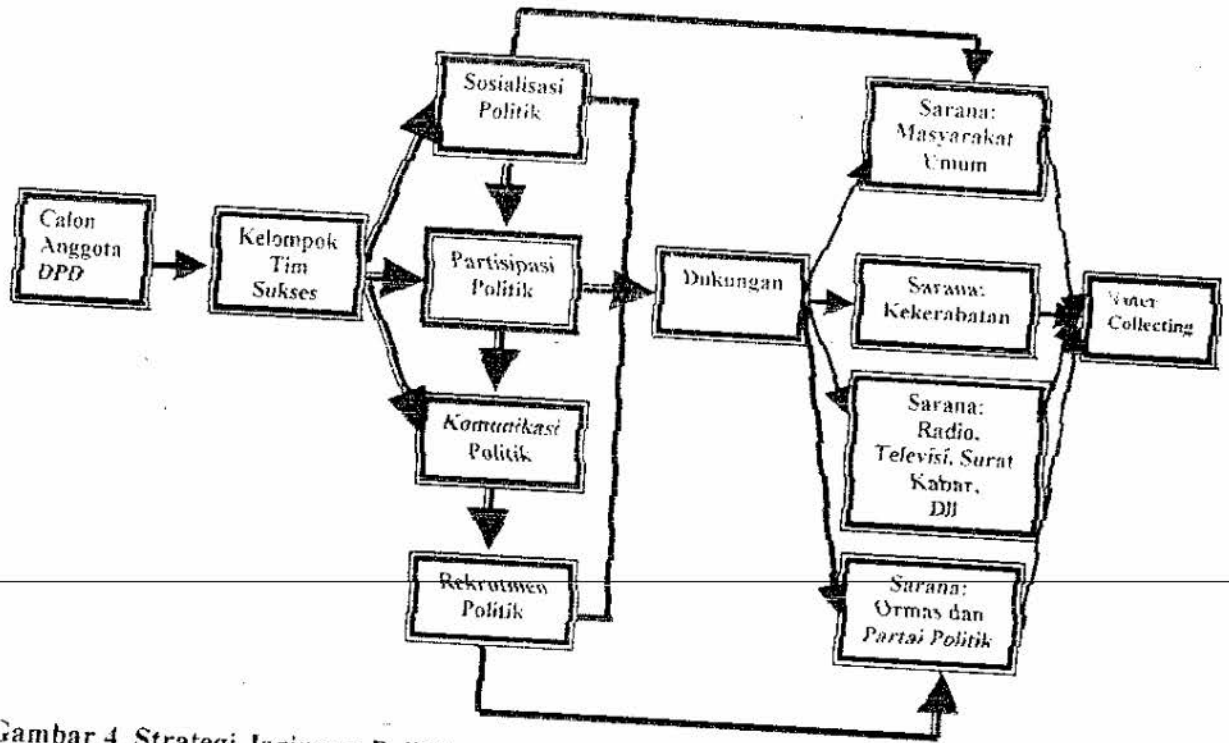
Komunikasi Politik seperti ini juga sangat menguntungkan apabila ketika ada dialog khusus masyarakat dengan si calon, sebab pemilih itu tergolong kedalam tiga karakteristik antara lain, pemilih rasional, pemilih tradisional dan pemilih emosional. Ketika Komunikasi Politik dilakukan di media televisi masyarakat telah menilai apa yang akan dilakukan oleh si calon dengan visi dan misinya. Oleh sebab itu pemilih rasional akan mendengar apa yang disampaikan olehnya. Untuk itu ketika si calon mencari dukungan lewat Komunikasi Politik seperti ini bisa saja usaha tersebut berhasil.

Langkah yang dilakukan lewat Komunikasi Politik seperti ini yang dilakukan oleh calon anggota DPD pada pemilihan umum 2004 yang lalu berdasarkan penelitian yang didapatkan.

### **3.2.2. Jaringan Politik Calon Anggota DPD Yang Berhasil**

Jaringan Politik anggota DPD yang berhasil duduk di parlemen sebenarnya hanya sedikit berbeda dari strategi yang dilakukan oleh calon anggota yang belum berhasil menjadikan mereka sebagai anggota DPRD ( Dewan Perwakilan Daerah )

Jaringan politik anggota DPD yang berhasil duduk sebagai anggota DPRD untuk mewakili Sumatera Utara pada Pemilihan Umum 2004 secara garis besar dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 4 Strategi Jaringan Politik Anggota DPD

Dari gambar 4 diatas jelas terlihat bahwa jaringan politik anggota DPD tidak jauh berbeda dengan calon anggota DPD, namun satu strategi ternyata sangat berpengaruh dalam memperoleh dukungan suara terhadap calon.

Adapun strategi jaringan politik anggota DPD ini dimulai dari bekerjasama dengan Tim Sukses (TS) yang solid dalam mensukseskan calonnya, sebab keterlibatan Tim Sukses yang bekerja keras dalam memperjuangkan calon yang di dukung ternyata membawa anggota DPD tersebut menjadi anggota legislatif dalam Pemilihan Umum 2004. Langkah-langkah yang dilakukan Tim Sukses (TS) mereka ini tidak sulit untuk mempopulerkan calon sebab masyarakat pada umumnya sudah mengenal mereka.

Pemanfaatan jaringan politik anggota DPD ini bersama-sama dengan Tim Sukses masing-masing dilakukan dengan empat cara. *Pertama*, jaringan anggota DPD dilakukan melalui Sosialisasi Politik yaitu mencari dukungan dari masyarakat umum. maksudnya melakukan Sosialisasi kepada masyarakat dengan cara perkenalan diri, silaturahmi, temu ramah, diskusi dan menyampaikan visi dan misi mereka. Sosialisasi ini dilakukan pada umumnya kepada masyarakat yang belum mengenal maupun yang sudah mengenal mereka. Sosialisasi Politik merupakan langkah awal anggota DPD dan Tim Suksesnya untuk meraih dukungan suara.

Dalam mensosialisasikan diri kepada masyarakat langkah yang diambil anggota DPD ini berbeda satu sama lain. Misalnya anggota DPD A, dalam mensosialisasikan diri kepada masyarakat pada umumnya dengan bersilaturahmi dan mengadakan pengajian-pengajian kepada masyarakat, kemudian dengan ruang lingkup yang lebih besar anggota DPD A ini mengadakan tabligh akbar dalam rangka mensosialisasikan diri agar masyarakat mengenalnya. Selain itu, langkah Sosialisasi Politik yang dilakukan anggota DPD ini adalah dengan membuat gambar-gambar, kalender yang dibagikan kepada masyarakat, anggota DPD A dan Tim Suksesnya tidak lupa menuliskan kata-kata atau visi dan misinya supaya masyarakat mengenal dan mengetahui asal usul calon yang akan dipilih masyarakat itu. Dengan demikian diharapkan masyarakat memilih anggota DPD ini karena sudah mengetahuinya.

Berbeda halnya dengan anggota DPD B dalam mensukseskan diri. Anggota DPD B ini cenderung mensosialisasikan diri dengan menonjolkan program-program yang akan dilakukan apabila terpilih menjadi anggota DPD. Disamping itu juga

dengan membuat gambar-gambar dan tulisan-tulisan yang menarik perhatian masyarakat, sehingga masyarakat yang belum mengenal mereka menjadi kenal melalui gambar-gambar yang di pasang sebagai alat dan sarana kampanye mereka. Sosialisasi Politik seperti ini adalah salah satu langkah politik yang mereka ambil dan dimantaatkan, sebab masyarakat itu sendiri terkadang belum menentukan pilihannya, karena tidak tahu siapa yang akan dipilih. Namun dengan cara demikian masyarakat memilih mereka.

*Kedua.* jaringan politik anggota DPD diperoleh melalui Partisipasi Politik yaitu mendapatkan dukungan suara melalui jaringan kekerabatan antara lain kerabat dekat, kerabat satu marga kerabat asal daerah yang sama, kerabat dari pertemanan, kerabat dari profesi, dan lain-lain. Pada dasarnya jaringan politik anggota DPD pada Pemilihan Umum 2004 menggunakan langkah-langkah strategis dalam berpolitik, sebab mereka memanfaatkan jaringan politik berdasarkan hubungan genealogis (kekerabatan), agama, popularitas, jabatan dan lain-lain

Menurut Myron Weiner dalam Colin (1978:42) terdapat lima hal yang menyebabkan timbulnya gerakan kearah partisipasi lebih luas dalam proses politik ini.

1. Modernisasi, komersialisasi pertanian, industrialisasi, urbanisasi yang meningkat, penyebaran kepandaian baca tulis, perbaikan pendidikan, dan pengembangan media komunikasi massa. Ketika penduduk Kota baru yaitu buruh, pedagang dan kaum profesional merasa bahwa mereka ternyata dapat mempengaruhi nasib mereka sendiri, mereka makin banyak menuntut untuk ikut dalam kekuasaan politik

2. Perubahan-perubahan struktur kelas sosial. Begitu terbentuk suatu kelas pekerja baru dan kelas menengah yang meluas dan berubah selama proses industrialisasi dan modernisasi, masalah tentang siapa yang berhak berpartisipasi dalam pembuatan keputusan politik menjadi penting dan mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pola partisipasi politik
3. Pengaruh kaum intelektual. Kaum intelektual, sarjana, filosof, pengarang dan wartawan sering mengemukakan ide-ide seperti egaliterisme dan nasionalisme kepada masyarakat umum untuk membangkitkan tuntutan akan partisipasi massa yang luas dalam pembuatan keputusan politik. Sistem-sistem transportasi dan komunikasi modern memudahkan dan mempercepat penyebaran ide-ide baru. Kaum intelektual telah sejak lama menjadi pembuat dan penyebar ide-ide yang mampu merubah sikap-sikap dan tingkah laku dari kelas sosial lain.
4. Konflik diantara kelompok-kelompok pemimpin politik, kalau timbul kompetisi memperebutkan kekuasaan, strategi yang bisa digunakan oleh kelompok-kelompok yang saling berhadapan adalah mencari dukungan rakyat. Dalam hal ini mereka tentu menganggap sah dan memperjuangkan ide-ide partisipasi massa dan akibatnya menimbulkan gerakan-gerakan yang menuntut agar "hak-hak" ini dipenuhi. Jadi, kelas-kelas menengah dalam memperjuangkannya melawan kaum aristokrat telah menarik kaum buruh dan membantu memperluas hak pilih rakyat.
5. Keterlibatan pemerintah yang meluas dalam urusan sosial ekonomi dan kebudayaan. Perluasan kegiatan pemerintah dalam bidang-bidang kebijaksanaan baru biasanya berarti bahwa konsekuensi tindakan-tindakan pemerintah menjadi semakin menyusup ke segala segi kehidupan sehari-hari rakyat. Tanpa hak-hak

sah atas partisipasi politik individu-individu tidak berdaya menghadapi dan dengan mudah cepat dipengaruhi oleh tindakan-tindakan pemerintah yang mungkin dapat merugikan kepentingannya. Maka dari itu meluasnya ruang lingkup aktivitas pemerintah sering merangsang timbulnya tuntutan-tuntutan yang terorganisir akan kesempatan untuk ikut serta dalam pembuatan keputusan politik.

Dengan demikian terlihat bahwa partisipasi politik itu sangat luas dan bukan hanya faktor genealogis rakyat memilih calon yang dikehendaki nuraninya. Akan tetapi partisipasi politik juga bisa didapatkan dari kaum intelektual dan profesionalisme lainnya. Hal seperti ini menunjukkan pula bahwa jaringan politik anggota DPD dalam Pemilu 2004 yang lalu dari segi partisipasi politik rakyat dalam memilih mereka cukup significant.

*Ketiga*, jaringan politik anggota DPD dilakukan melalui Komunikasi Politik. Cara seperti ini dilakukan melalui media massa dan elektronik. Dalam jaringan demikian Halim Harahap mengatakan:

**“Langkah yang dilakukan dalam jaringan politik adalah melalui komunikasi, komunikasi sudah saya bangun sebelum Pemilu karena keberadaan saya sebagai Da’i sehingga sering melakukan komunikasi lewat kegiatan formal maupun kegiatan in formal”.**

Jaringan politik melalui Komunikasi Politik seperti ini sering dijalankan oleh tokoh-tokoh elit politik sebab dengan komunikasi melalui pers, radio, televisi dan bahkan komunikasi tatap muka langsung ( direct face to face communication ) umumnya dikuasai oleh elit politik. Komunikasi politik merupakan strategi anggota DPD ini dalam meraih dukungan suara dalam Pemilu dan dengan komunikasi politik lewat



media ternyata dianggap sebagai sarana mencari dukungan suara agar bisa dengan mudah dikenal masyarakat. Menurut Colin (1978:114), media massa televisi dan pers merupakan industri yang besar dan kompleks. Televisi dan radio adalah saluran-saluran komunikasi politik yang sangat terpusat tetapi kompetitif. Dan masyarakat umum mempercayai kejujuran media siaran ini.

Jaringan politik melalui komunikasi politik lewat media televisi juga dilakukan oleh anggota DPD lainnya yaitu dengan cara mensosialisasikan diri lewat reklame televisi dan mengatakan slogan-slogan mereka agar dipilih oleh rakyat. Cara

seperti ini adalah strategi calon anggota DPD dalam memenangkan dan menjabat sebagai anggota DPD periode 2004 sampai 2009 sekarang ini.

*Kempat,* jaringan politik anggota DPD juga dilakukan melalui proses Rekrutmen Politik. Dalam proses pengumpulan suara seperti ini anggota DPD melibatkan dukungan organisasi yang bersifat keagamaan maupun organisasi politik misalnya dukungan dari partai-partai politik. Cara seperti ini mereka lakukan mengingat pemilihan umum 2004 sangat berbeda dengan sebelumnya, maksudnya pada pemilihan 2004 rakyat juga menentukan wakilnya untuk duduk di lembaga legislatif, dengan cara memilih langsung orang yang dianggap mampu menyampaikan aspirasi rakyat. Oleh sebab itu walaupun di dukung oleh partai politik yang besar namun calon tidak dikenal rakyat bisa saja calon tersebut kalah.

Jaringan melalui proses rekrutmen politik sebenarnya sangat menguntungkan calon, sebab organisasi religius dan organisasi politik di Indonesia cukup banyak, sehingga dukungan dari organisasi bisa menjadikan dukungan bagi calon. Hal seperti ini yang dilakukan anggota DPD Sumatera Utara, Jaringan melalui dukungan

organisasi politik dan keagamaan yang diperoleh calon anggota DPD ini cukup significant. Hal tersebut terungkap dari wawancara dengan Halim Harahap kepada penulis melalui wawancara sebagai berikut :

**“Pertanyaan :** “Apakah Bapak memanfaatkan organisasi-organisasi keagamaan untuk meraih dukungan ?

**Jawab :** “Ya”. Seperti Al-wasliyah (secara khusus) Muhammadiyah (secara tertulis), Warispa (secara tertulis, dan ormas-ormas Islam (secara tersirat)”.

**“Pertanyaan :** “Organisasi apa saja yang berkoalisi dengan Bapak dan sejauhmana keberhasilan Bapak dengan melibatkan organisasi keagamaan dan organisasi politik tersebut?

**Jawab :** “PKS dan PAN namun dukungannya secara informal dan keberhasilannya kira-kira 80 %”.

Dengan demikian, jaringan politik anggota DPD melalui proses rekrutmen politik juga dilakukan anggota DPD yang berhasil lainnya. Hal ini seperti yang penulis tanyakan kepada Yopie Batubara, melalui wawancara sebagai berikut :

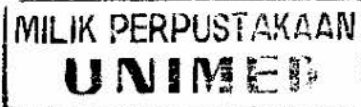
**“Pertanyaan :** “Apakah Bapak memanfaatkan organisasi-organisasi keagamaan untuk meraih dukungan?”

**Jawab :** “Ya”. Misalnya melalui Partai agama dan Etnis secara tertulis dan dukungan”.

Dalam melakukan proses rekrutmen politik dengan melibatkan organisasi-organisasi seperti ini tujuannya adalah untuk memperoleh dukungan suara sebab pada dasarnya organisasi-organisasi di Sumatera Utara dalam menentukan pilihannya akan melakukan rapat pleno dalam kepengurusannya. Dengan adanya dukungan dari organisasi keagamaan dan organisasi politik bisa memperoleh suara yang dominan karena jumlah kepengurusan dari organisasi –organisasi ini cukup banyak dan massa mereka juga significant.

Upaya anggota DPD dalam proses jaringan melalui partisipasi organisasi politik dan keagamaan seperti ini disebabkan anggota DPD ini juga terlibat dalam organisasi yang sudah lama terbentuk dan anggota DPD ini juga merupakan pengurus yang memperoleh jabatan strategis dari sebuah organisasi yang mereka pimpin. Oleh sebab itu anggota DPD akan melibatkan organisasi-organisasi mereka dalam mendulang suara pada pemilihan umum 2004 yang lalu. Cara ini dilakukan tidak sulit karena untuk merekrut suara di Kabupaten / Kota anggota DPD ini melibatkan Tim Sukses (TS) yang solid dalam mengkonsolidasikan mereka kepengurus-pengurus di cabang-cabang Kabupaten / Kota di Sumatera Utara.

**BAB IV**  
**ANALISIS JARINGAN POLITIK ANGGOTA DPD BERDASARKAN**  
**HUBUNGAN KEKERABATAN DAN AGAMA PADA**  
**KABUPATEN/KOTA DI SUMATERA UTARA**



Jaringan politik anggota DPD tidak terbatas hanya pada satu Kabupaten/Kota saja, sebab suara yang harus dikumpulkan berdasarkan jumlah keseluruhan dari Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. Hal ini dilakukan mengingat mereka duduk sebagai anggota DPD adalah untuk mewakili aspirasi seluruh masyarakat Sumatera Utara agar kepentingan masyarakat Sumatera Utara bisa diwujudkan dan didengar oleh pemerintah pusat. Dalam melakukan strategi pengumpulan suara di Kabupaten/Kota anggota DPD ini bekerjasama dengan Tim Sukses (TS) masing-masing. Untuk menganalisis jaringan politik anggota DPD pada Kabupaten/Kota di Sumut dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 4**  
**Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota Dewan Perwakilan Daerah**  
**Provinsi Sumatera Utara**

Nomor dan Nama Calon DPD Peserta Pemilu	KOMISI PEMELIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA							
	Medan	Bekasdarang	Tebing tinggi	Asahan	Tapakuli selatan	Tapakuli utara	Simatungun	Karo
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Drs. Abd. Halim Harahap	58.713	104.190	11.235	101.524	23.883	1.396	48.176	3.934
2. H. Nuraini Lampunan	32.385	49.334	1.753	12.862	3.965	15.828	5.845	3.650
3. Karna Indra Siragay	40.694	22.100	3.774	13.823	32.130	4.351	10.505	2.252
4. Drs. Yosef Rahuba	29.166	43.643	1.147	12.755	22.112	338	7.765	2.430

Sumber : KPU Provinsi Sumatera Utara

Tabel diatas merupakan hasil penghitungan suara anggota Dewan Perwakilan Daerah(DPD) pada Kabupaten Kota di Sumatera Utara. Penganalisaan jaringan politik anggota DPD hanya dilakukan pada Kabupaten/Kota yang sesuai dengan tujuan penelitian. Dengan adanya jumlah perolehan suara akan memudahkan dalam menganalisis strategi jaringan politik anggota DPD pemenang Pemilu pada Kabupaten Kota di Sumatera Utara

#### **4.1. Jaringan Politik Anggota DPD di Kota Medan**

Perolehan suara terbanyak pada hasil Pemilu tahun 2004 di Kota Medan seperti terlihat pada tabel 4 untuk anggota DPD yang menang diperoleh Drs. H. Abd. Halim Harahap sebanyak 188,713 suara, kemudian Drs. Yopie Batubara sebanyak 58,166 suara, Raja Inal Siregar 40.694 suara dan terakhir Ir. Nurdin Tampubolon sebanyak 32.585 suara.

Dari hasil perolehan suara anggota DPD di Kota Medan terlihat bahwa jaringan politik anggota DPD ini dilakukan dengan langkah-langkah politik yang strategis yaitu dengan memanfaatkan jaringan politik berdasarkan faktor hubungan kekerabatan, agama, etnis, uang, jabatan dan Tim Sukses. Hal ini dapat dikatakan mengingat di Kota Medan masyarakatnya pluralitas dan majemuk. Oleh sebab itu upaya yang dilakukan harus melalui langkah yang terorganisir.

Bila dilihat dari Tabel 4 perolehan suara terbanyak diperoleh Drs. H. Abd. Halim Harahap sebesar 188.713 orang, upaya untuk memperoleh dukungan suara di Kota Medan tidak begitu sulit karena beliau adalah ustad yang pada umumnya sudah dikenal oleh masyarakat khususnya yang beragama Islam. Dengan mengadakan ceramah yang

diundang oleh masyarakat beliau menyempatkan diri menyampaikan tujuannya yaitu akan mencalonkan diri sebagai anggota DPD (Dewan Perwakilan Daerah) pada pemilu 2004

Untuk menganalisis lebih lanjut jaringan politik, Drs H. Abd Halim Harahap di Kota Medan berdasarkan faktor hubungan kekerabatan dan agama dapat dilihat pada tabel 5 diatas berikut :

**Tabel 5**  
**Jumlah Penduduk Kota Medan menurut Suku Bangsa, Agama**  
**Dan Jumlah Calon Pemilih**

Etnik (1)	Jumlah (2)	Agama (3)	Jumlah (4)	Pemilih (5)	Jumlah (6)
Melayu	125.557	Islam	1.291.751	Laki-Laki	675309
Karo	78.129				
Simalungun	13.078	Khatolik	55.012		
Yapanuli/Toba	365.758				
Mandailing	178.308	Protestan	345.310		
Pak-Pak	6.509				
Nias	13.159	Hindu	12.888	Perempuan	709831
Jawa	628.898				
Minang	163.774	Budha	197.986		
Cina	202.839				
Aceh	53.011				
Lainnya	75.253	Lainnya	1.336		
Jumlah	1.904.273	Jumlah	1.904.273	Jumlah	1.385.140

**Catatan** - Melayu mencakup semua suku Melayu di Pulau Sumatera  
 - Mandailing mencakup suku Mandailing dan Angkola  
 - Termasuk dalam suku Jawa adalah suku lain yang ada di Pulau Jawa  
 - Warga negara asing tercakup dalam lainnya

**Sumber** : BPS Sumut dan KPU Provinsi Sumatera Utara

Jumlah pemilih seluruhnya di Kota Medan sebesar 1.385140 orang sedangkan jumlah etnik Mandailing sebesar 178.308 orang dan jumlah masyarakat yang beragama Islam sebanyak 1.291. 751 orang. Dengan demikian pemilih yang mendukung Halim Harahap di Kota Medan lebih didominasi masyarakat yang beragama Islam. Hal ini dapat

dikatakan karena Halim Harahap didukung oleh Partai-Partai Islam seperti PKS (Partai Keadilan Sosial) dan PAN (Partai Amanat Nasional) yang pendukungnya mayoritas beragama Islam. Disamping itu Halim Harahap adalah pengurus organisasi Al-Wasliyah Sumatera Utara, yang seperti kita ketahui organisasi ini adalah organisasi Islam

Selanjutnya bila dilihat dari hubungan kekerabatan dari etnis sepertinya tidak significant walaupun jumlah etnik Mandailing sebesar 178.308 orang dan ini belum tentu pemilih yang beretnis Mandailing memilih beliau. Hal ini juga dinyatakan Halim Harahap kepada penulis bahwa perolehan suara berdasarkan hubungan kekerabatan yang diperoleh di Sumatera Utara kira-kira 10%.

Jadi, perolehan suara Halim Harahap di wilayah Kota Medan bila ditinjau dari hubungan geneologis tidak demikian dibandingkan perolehan suara berdasarkan agama dan keterlibatan Tim Sukses serta popularitas beliau yang sudah dikenal masyarakat sebagai da'i dan Pengurus Organisasi AL-Wasliyah di wilayah kota Medan

Selanjutnya dari tabel 4 perolehan suara kedua diperoleh Drs. H.Yopie Batubara sebanyak 58.166 orang. Dalam mengumpulkan suara di wilayah Kota Meda, upaya yang dilakukan oleh Yopie Batubara sepertinya juga tidak begitu sulit sebab beliau cukup dikenal masyarakat Kota Medan sebagai Pengusaha yang berhasil. Disamping itu Yopie Batubara adalah Ketua Kadin (Kamar Dagang dan Industri) Sumatera Utara, perolehan suara yang diperoleh menurut beliau merupakan kerja keras dari Tim sukses (TS) nya.

Namun untuk menganalisis jaringan politik Drs. H.Yopie Batubara di Kota Medan berdasarkan faktor kekerabatan dan agama sepertinya tidak significant bahkan pemilih yang bukan dari etnis dan agama juga kemungkinan memilih beliau.

Hal ini dikatakan beliau kepada penulis bahwa perolehan suara yang diperoleh berdasarkan hubungan kekerabatan 20% sedangkan dari faktor agama 10% untuk seluruh Kabupaten-Kota di Sumatera Utara. Jadi upaya pemanfaatan jaringan politik Yopie Batubara di Kota Medan dilakukan melalui kerja keras Tim Sukses dan kepopuleritasan beliau. Disamping itu keterlibatan organisasi pendukung juga merupakan faktor keberhasilan beliau menjadi anggota DPD. Karena bila ditinjau dari hubungan kekerabatan dari keempat calon anggota DPD yang berhasil, tiga orang berasal dari etnis dan agama yang sama. Oleh sebab itu dapat diketahui bahwa perolehan suara Yopie

Batubara di Kota Medan lebih banyak diperoleh dari kerja keras Tim Sukses. Hal ini seperti yang dikatakan Yopie Batubara melalui wawancara dengan penulis yang mengatakan bahwa keberhasilan yang diperoleh kelompok Tim Sukses (TS) dalam memenangkan beliau mencapai sekitar 70%.

Selanjutnya perolehan suara terbanyak di Kota Medan diperoleh Raja Inal Siregar, sebanyak 40,694 orang. Perolehan suara raja Inal Siregar tidak begitu dominan di Kota Medan. Namun beliau sudah dikenal masyarakat kota Medan sebagai mantan Gubernur Sumatera Utara. Proses sosialisasi tidak sulit untuk dijalankan dalam mendulang suara, untuk itu upaya yang dilakukan lebih ditekankan kepada penyampaian visi dan misi. Dalam hal ini ternyata popularitas dan melibatkan kerja keras Tim Sukses merupakan langkah yang diambil beliau dalam mengumpulkan suara di Kota Medan.



Jaringan politik dengan melibatkan kerabat dekat, kerabat satu marga, dan asal daerah merupakan strategi yang dilakukan dalam mengumpulkan suara pendukung, walaupun terlihat bahwa jumlah etnik Mandailing di Kota Medan sebanyak 178.308 orang, belum tentu memilih beliau.

Selanjutnya perolehan suara urutan keempat diperoleh Ir. Nurdin Tampubolon, sebanyak 32.585 orang. Jaringan politik Nurdin Tampubolon di Kota Medan pada dasarnya melibatkan hubungan kekerabatan, agama dan kerja keras Tim Suksesnya. Bila dilihat dari tabel 5 bahwa etnik Tapanuli Toba di Kota Medan cukup significant yaitu

265.758 orang, sedangkan yang beragama Kristen Protestan sebanyak 345.310 orang. Hal ini menunjukkan usaha dalam pengumpulan suara berdasarkan faktor diatas adalah merupakan jaringan politik Nurdin Tampubolon, sebab popularitas beliau tidak dikenal masyarakat Kota Medan pada umumnya. Selain itu perolehan suara Nurdin Tampubolon cukup mengejutkan karena walaupun dilahirkan di Sumatera Utara namun domisili beliau berada di Jakarta. Hal ini menunjukkan faktor geneologis, agama, Tim Sukses merupakan modal dalam meraih dukungan.

#### **4.2. Jaringan Politik Anggota DPD Di Kabupaten Deli Serdang**

Dalam menganalisis jaringan Politik anggota DPD di Kabupaten/Kota selanjutnya dibuat tabel dibawah ini :

**Tabel 6**  
**Jumlah Penduduk Deli Serdang**  
**Menurut Suku Bangsa, Agama, dan Jumlah Calon Pemilih**

Etnik (1)	Jumlah (2)	Agama (3)	Jumlah (4)	Pemilih (5)	Jumlah (6)
Melayu	145.040	Islam	1.559.368	Laki-Laki	666.140
Karo	136.104	Khatolik	58.829		
Simalungun	43.653	Protestan	295.740		
Tapanuli Toba	259.978				
Mandailing	105.069	Hindu	3.753	Perempuan	670.396
Pak-Pak	2.956				
Nias	7.121	Budha	39.931		
Jawa	1.066.752				
Minang	42.466				
Cina	31.372				
Aceh	17.180				
Lainnya	101.567	lainnya	1.637		
Jumlah	1.959.258	Jumlah	1.959.258	Jumlah	13.365.362

Sumber : BPS Sumut dan KPU Provinsi Sumatera Utara

Dari tabel 6 diatas terlihat bahwa etnik Jawa yang paling banyak di Deli Serdang yaitu 1.066.752 orang, kemudian Tapanuli Toba 259.978 orang, Melayu 145.040 orang, Karo 136.104 orang, Mandailing 105.069 orang, lainnya 101.567 orang, Simalungun 43.653 orang, Minang 42.466 orang, Cina 31.372 orang, Aceh 17.180 orang, Nias 7.121 orang, dan Pak-Pak 2.956 orang sedangkan agama yang paling banyak di Deli Serdang adalah Islam 1559.368 orang, Protestan 295.740, Khatolik 58.829, dan Budha 39.931 orang, Hindu 3.753, dan Lainnya 1.637 orang. Jumlah pemilih di Deli Serdang sebanyak 13.365.362 orang.

Akan tetapi bila dianalisis jaringan politik anggota DPD di Deli Serdang terlihat pada tabel 4 bahwa perolehan suara terbanyak diperoleh Halim Harahap 114.190 orang kemudian Yopie Batubara 45.943 orang, Raja Inal Siregar 22.190 orang dan Ir. Nurdin Tampubolon sebanyak 19.784 orang. Dari hasil perolehan suara di Deli Serdang terlihat bahwa jaringan politik yang dilakukan anggota DPD tersebut tidak jauh berbeda dengan

di Kota Medan. Hal ini juga seperti penjelasan yang disampaikan informan kepada penulis bahwa proses pengumpulan dukungan agar pemilih menentukan pilihannya terhadap mereka pada dasarnya karena usaha dan upaya mereka yang banyak dibantu oleh Tim Sukses.

Apabila dianalisis lebih lanjut, jaringan politik anggota DPD di Deli Serdang, nampaknya suara terpecah kepada calon anggota DPD lainnya sebab bila dilihat jumlah agama Islam di Deli Serdang cukup significant, namun mengingat calon anggota DPD banyak yang beragama Islam, oleh karena itu perolehan suara anggota DPD di Kabupaten Deli Serdang menjadi tidak significant.

Demikian juga halnya dengan faktor kekerabatan, sepertinya juga bukan mendasari pemilih memilih anggota DPD ini, sebab dari data yang diperoleh bahwa perolehan suara di Deli Serdang yang mayoritas etnis Jawa banyak yang memilih calon anggota DPD yang etnisnya sama. Hal ini menunjukkan hubungan kekerabatan memang melekat dihati pemilih yang belum menentukan pilihannya.

#### **4.3. Jaringan Politik Anggota DPD Di Kota Tebing Tinggi**

Selanjutnya dianalisis jaringan politik anggota DPD di Kota Tebing Tinggi. Dalam menganalisis jaringan politik anggota DPD pada kota Tebing Tinggi dilihat tabel dibawah ini

**Tabel 7**  
**Jumlah Penduduk Tebing Tinggi**  
**Menurut Suku Bangsa, Agama, dan Jumlah Calon Pemilih**

Etnik (1)	Jumlah (2)	Agama (3)	Jumlah (4)	Pemilih (5)	Jumlah (6)
Melayu	5.440	Islam	96.824	Laki-Laki	43350
Karo	1.680				
Simalungun	8.791	Khatolik	2.228		
Tapanuli/Toba	18.131				
Mandailing	13.083	Protestan	14.328		
Pak-Pak	111				
Nias	541	Hindu	261	Perempuan	45623
Jawa	50.194				
Minang	11.154	Budha	11.213		
Cina	11.846				
Aceh	774				
Lainnya	3.234	lainnya	125		
<b>Jumlah</b>	<b>124.979</b>	<b>Jumlah</b>	<b>124.979</b>	<b>Jumlah</b>	<b>88973</b>

Sumber : BPS Sumut dan KPU Provinsi Sumatera Utara

Dari tabel 7 diatas terlihat bahwa di Tebing tinggi etnik yang paling banyak adalah Jawa 50.194 orang, Tapanuli/Toba 18.131 orang, Mandailing 13.083 orang Cina 11.846 orang Minang 11.154 orang, Simalungun 8.791 orang, Melayu 5.440 orang, lainnya 3.234 orang, Karo 1.680 orang, Aceh 774 orang, Nias 541 orang, dan Pak-Pak 111 orang sedangkan agama yang paling dominan antara lain Agama Islam 96.824 orang, Protestan 14.328, Budha 11.213, Khatolik 2.228, dan dan lainnya 125 orang. Kemudian jumlah pemilih di Tebing Tinggi sebanyak 88973 orang

Perolehan suara anggota DPD terbanyak di tebing Tinggi seperti yang terlihat pada tabel 4 diperoleh Halim Harahap 11.235, Raja Inal Siregar 3.701, Nurdin Lampubolon 1.751, dan Yopie Batubara 1047. Dari hasil perolehan suara anggota DPD di kota Tebing Tinggi terlihat tidak signifikan

Apabila dianalisis lebih lanjut perolehan suara Halim Harahap di tebing tinggi dapat dihubungkan dengan pemilih yang beragama Islam dan hubungan kekerabatan, sebab kedua faktor ini bisa menentukan pilihan rakyat yang dikategorikan sebagai pemilih tradisional. Bila ditinjau Halim Harahap adalah tokoh agama sehingga mampu menarik simpati masyarakat dengan mengadakan ceramah, dan tabligh akbar, beliau mensosialisasikan diri. Dalam hal lain dari segi organisasi yang jaringannya juga ada di Kota Tebing Tinggi mampu membuat Halim Harahap dipilih masyarakat Kota Tebing Tinggi.

Dari hasil pengumpulan data untuk wilayah Kota tebing Tinggi yang mendapat suara terbanyak sehabis Halim Harahap antara lain calon anggota DPD yang belum berhasil yaitu Hj. Rohani Darus sebanyak 8.670. Dengan demikian dapat dikatakan faktor hubungan kekerabatan adalah modal bagi calon yang sudah dikenal masyarakat, khususnya masyarakat Tebing Tinggi, sehingga beliau tidak asing bagi masyarakat Tebing Tinggi. Dari segi hubungan kekerabatan asal, dilihat hasil yang diperoleh calon anggota DPD yang belum berhasil juga yaitu Dr. Indra Wahidin, yang memperoleh suara terbanyak yaitu 4.476. Perolehan suara Dr. Indra Wahidin di Kota Tebing Tinggi tidak terlepas dari jumlah penduduk etnis Cina di Tebing Tinggi. Apabila dilihat pada tabel diatas bahwa jumlah etnis Cina di Tebing Tinggi cukup banyak. Hal ini bisa menentukan kemenangan Indra Wahidin di Tebing Tinggi. Dengan kata lain peranan agama, jalinan kekerabatan, popularitas, jabatan bisa menjadikan seseorang dengan mudah meraih simpati masyarakat.

#### 4.4. Jaringan Politik Anggota DPD Di Kabupaten Asahan

Selanjutnya dianalisis jaringan politik anggota DPD di Kabupaten Asahan. Untuk menganalisis jaringan politik anggota DPD di Kabupaten Asahan dibuat tabel dibawah ini.

**Tabel 8**  
**Jumlah Penduduk Asahan**  
**Menurut Suku Bangsa, Agama, dan Jumlah Calon Pemilih**

Etnik (1)	Jumlah (2)	Agama (3)	Jumlah (4)	Pemilih (5)	Jumlah (6)
Melayu	156.513	Islam	822.808	Laki-Laki	312467
Karo	3.581				
Simalungun	4.397	Khatolik	13.705		
Tapanuh/Toba	208.261				
Mandailing	25.087	Protestan	89.559		
Pak-Pak	246				
Nias	1.032	Hindu	409	Perempuan	312797
Jawa	488.858				
Minang	10.468	Budha	8.538		
Cina	6.659				
Aceh	4.198				
Lainnya	26.353	lainnya	634		
Jumlah	935.653	Jumlah	935.653	Jumlah	625264

Sumber : BPS Sumut dan KPU Provinsi Sumatera Utara

Dari tabel 8 diatas terlihat bahwa di Asahan, etnik yang paling banyak adalah Jawa 488.858, Tapanuli/Toba 208.261, Melayu 156.513, lainnya 26.353, Mandailing 25.087, Minang 10.468, Cina 6.659, Simalungun 4.397, Aceh 4.198, Karo 3.581, Nias 1.032, dan Pak-Pak 246. Sedangkan agama yang paling banyak adalah Islam yaitu 822.808, Protestan 89.559, Khatolik 13.705, Budha 8.538, Lainnya 634 dan Hindu 409. Adapun jumlah pemilih sebanyak 625264 orang

Perolehan suara anggota DPD yang paling banyak di Kabupaten Asahan seperti yang dilihat pada tabel 4 diperoleh Halim Harahap sebanyak 191.524, kemudian Raja Inal Siregar 13.23, Nurdin Tampubolon 12.882 dan Yopie Batubara 12.755. Dari hasil

perolehan suara anggota DPD di Kabupaten Asahan dapat dianalisis bahwa jaringan politik anggota DPD nampaknya juga menggunakan jaringan melalui hubungan kekerabatan, agama, popularitas. Hal ini dapat dikatakan apabila dianalisis lebih lanjut bahwa kemenangan Halim Harahap di Kabupaten Asahan banyak dibantu oleh Tim Sukses yang bekerja keras. Halim Harahap bukan berasal dari Asahan namun seperti kita lihat agama mayoritas di Kabupaten Asahan adalah Islam. dan dengan mensosialisasikan diri sebagai "Ustad" dan keterlibatan dengan organisasi Al-Wasliyah beliau mampu menarik simpati masyarakat di Kabupaten Asahan.

Selanjutnya dari data yang dikumpulkan perolehan suara terbanyak di Kabupaten Asahan diperoleh calon anggota DPD yang belum berhasil antara lain Arifin Kamdi sebanyak 31.157. Ini menunjukkan bahwa selain agama, strategi jaringan hubungan kekerabatan merupakan faktor calon dipilih rakyat di Kabupaten Asahan tersebut. Perolehan suara Arifin Kamadi di Asahan sepertinya tidak terlepas dari banyaknya etnis Jawa di kabupaten Asahan sebab Arifin Kamdi merupakan tokoh dari organisasi Pujakesuma sehingga masyarakat sudah mengenal beliau seperti etnis Jawa pada umumnya. Contoh lain, perolehan suara peringkat ketiga di Kabupaten Asahan diperoleh Sulben Siagian sebanyak 16.708. Hal ini disebabkan Sulben Siagian berasal dari Kabupaten Asahan dan sudah dikenal masyarakat di sana.

#### **4.5. Jaringan Politik Anggota DPD Di Kabupaten Tapanuli Selatan**

Selanjutnya dianalisis jaringan politik anggota DPD di Kabupaten Tapanuli Selatan. Hal ini untuk mengetahui sejauhmana peranan hubungan kekerabatan dan agama dalam mensukseskan anggota DPD tersebut. Untuk menganalisisnya dapat digambarkan pada tabel dibawah ini :

**Tabel 9**  
**Jumlah Penduduk Tapanuli Selatan**  
**Menurut Suku Bangsa, Agama, dan Jumlah Calon Pemilih**

Etnik (1)	Jumlah (2)	Agama (3)	Jumlah (4)	Pemilih (5)	Jumlah (6)
Melayu	996	Islam	671.158	Laki-Laki	227504
Karo	496				
Simalungun	40	Khatolik	5.912		
Tapanuli/Toba	195.309				
Mandailing	463.096	Protestan	56.007		
Pak-Pak	129				
Nias	12.797	Hindu	53	Perempuan	238589
Jawa	40.891				
Minang	6.976	Budha	906		
Cina	842				
Aceh	505				
Lainnya	12.111	lainnya	152		
Jumlah	34.188	Jumlah	734.188	Jumlah	466093

Sumber : BPS Sumut dan KPU Provinsi Sumatera Utara

Dari Tabel 9 diatas terlihat bahwa di Tapanuli Selatan etnik yang paling banyak adalah Mandailing 463.096 orang, kemudian Tapanuli/Toba 195.309 orang, Minang 6.976 orang, Melayu 996 orang, Cina 842 orang, Aceh 505 orang, Karo 496 orang, Pak-Pak 129 orang, dan Simalungun 40 orang. Sedangkan agama yang paling dominan antara lain Agama Islam 671.158 orang, Protestan 56.007 orang, Khatolik 5.912 orang, Budha 906 orang, Lainnya 152 orang, dan Hindu 53 orang. Jumlah pemilih di Tapanuli Selatan sebanyak 466093 orang.

Perolehan suara anggota terbanyak di tapanuli Selatan seperti yang terlihat pada tabel 4 diperoleh Raja Inal Siregar 82.140 orang, kemudian Halim Harahap 23.883 orang, Yopie Batubara 22.112 orang dan Nurdin Tampubolon 2177 orang. Dari hasil perolehan suara tersebut terlihat bahwa faktor genealogis, agama, popularitas berperan dalam kemenangan yang diperoleh anggota DPD di Kabupaten Tapanuli Selatan.



Perolehan suara yang diperoleh Raja Inal Siregar di Tapanuli Selatan tak terlepas dari kerja keras selama ini dan keterlibatan Tim Suksesnya. Apabila ditinjau lebih lanjut peranan hubungan kekerabatan memang menjadi tolak ukur dalam kemenangan Raja Inal Siregar di Tapanuli Selatan. Popularitasnya sudah tidak diragukan di daerah Tapanuli Selatan ditambah jabatannya sebagai mantan orang nomor satu di Sumatera Utara. Menurut informan pembangunan yang selama ini di daerah Tapanuli Selatan banyak dibantu oleh Raja Inal Siregar ditambah sarana pendidikan dengan pendirian sekolah yang menjadi favorit juga tak lepas dari partisipasi Raja Inal Siregar, sehingga masyarakat banyak yang tahu dan mengenal sosok Raja Inal Siregar. Hal ini bisa menjadi ukuran perolehan suara yang diperoleh beliau di Tapanuli Selatan.

Dari sudut pandang agama juga sangat berpengaruh. Seperti kita lihat di Tapanuli Selatan pada umumnya Islam adalah agama yang mayoritas, sehingga fanatisme agama dalam pemilihan umum terlebih bagi pemilihan anggota DPD setidaknya terbawa oleh keinginan masyarakat Tapanuli Selatan tersebut. Namun faktor agama bukan semata-mata menjadi tolak ukur, sebab ketiga anggota DPD tersebut berasal dari daerah yang sama. Jadi, penanaman modal awal dalam membina hubungan dengan masyarakat sejak dini juga bisa menjadi politik balas budi bagi rakyat. Hal ini yang dilakukan Raja Inal Siregar menurut informan.

Popularitas memang menjadi suatu kesempatan apabila kita ingin dipilih rakyat. Hal ini dapat dilihat dari perolehan suara Nurdin Tampubolon di Tapanuli Selatan. Perolehan suara Nurdin Tampubolon sebanyak 5.963 di Tapanuli Selatan lebih sedikit dibandingkan suara Lundu Panjaitan sebanyak 12.194, padahal kedua calon anggota DPD ini berasal dari agama yang sama dan di Tapanuli Selatan penganut agama Kristen juga

tidak sedikit. Hal demikian menunjukkan agama bukan faktor utama rakyat memilih wakilnya, namun faktor kedekatan dengan rakyat juga bisa menjadi kesempatan dalam memperoleh dukungan suara.

#### 4.6. Jaringan Politik Anggota DPD Di Kabupaten Tapanuli Utara

Selanjutnya dianalisis jaringan politik anggota DPD di Kabupaten Tapanuli Utara. Seperti diketahui di Tapanuli Utara pada umumnya masyarakat beretnis Toba dan mayoritas penganut agama Kristen. Dalam hal ini yang ingin diketahui sejauhmana peranan hubungan kekerabatan dan agama dalam jaringan politik anggota DPD tersebut. Untuk menganalisisnya dapat digambarkan pada tabel dibawah ini :

**Tabel 10**  
**Jumlah Penduduk Tapanuli Utara**  
**Menurut Suku Bangsa, Agama, dan Jumlah Calon Pemilih**

Etnik (1)	Jumlah (2)	Agama (3)	Jumlah (4)	Pemilih (5)	Jumlah (6)
Melayu	206	Islam	15903	Laki-Laki	72308
Karo	465				
Simalungun	251	Khatolik	35141		
Tapanuli/Toba	393.480				
Mandailing	568	Protestan	356040		
Pak-Pak	6253				
Nias	842	Hindu	29	Perempuan	78001
Jawa	1251				
Minang	584	Budha	136		
Cina	457				
Aceh	66				
Lainnya	3287	lainnya	461		
Jumlah	407710	Jumlah	407710	Jumlah	150309

Sumber : BPS Sumut dan KPU Provinsi Sumatera Utara

Dari tabel 10 diatas terlihat bahwa di Tapanuli utara etnik yang paling banyak adalah Tapanuli/Toba 393.480, Pak-Pak 6253, Lainnya 3287, Jawa 1251, Nias 842, Minang 584, Mandailing 568, Karo 465, Cina 457, Simalungun 251, Melayu 206, dan

Aceh 66. Sedangkan agama yang paling banyak adalah Protestan 356040, Khatolik 35141, Islam 15903, Lainnya 461, Budha 136, dan Hindu 29.

Perolehan suara anggota DPD terbanyak di Kabupaten Tapanuli Utara seperti yang terlihat di tabel 4, diperoleh Nurdin Tampubolon 13.829, Raja Inal Siregar 4351, Halim Harahap 1360, dan Yopie Batubara 338. Dari hasil perolehan suara tersebut terlihat peranan hubungan kekerabatan dan agama sangat menonjol. Seperti halnya perolehan suara Nurdin Tampubolon di Kabupaten Tapanuli Utara jauh lebih banyak dari anggota DPD lainnya. Hal ini menunjukkan pengaruh agama bisa menjadi pendorong pemilih untuk mendukung calon tersebut. Di Kabupaten Tapanuli Utara ini agama yang mayoritas adalah Kristen Protestan, sedangkan calon anggota DPD yang lebih banyak mengumpulkan dukungan suara berasal dari agama Kristen, namun tidak cukup significant mengingat calon banyak yang berasal dari agama yang sama

Untuk mengetahui lebih lanjut dari data yang diperoleh, perolehan suara terbanyak diperoleh calon anggota DPD yang gagal menjadi anggota DPD yaitu Lundu Panjaitan sebanyak 33895. Hal ini menunjukkan faktor genealogis dan popularitas juga mendorong masyarakat memilih calon tersebut. Seperti halnya perolehan suara Lundu Panjaitan di Tapanuli Utara, Perolehan suara beliau di Tapanuli Utara tidak luput dari hubungan kekerabatan mengingat selain mantan wakil Gubernur yang sudah dikenal masyarakat Tapanuli Utara Lundu Panjaitan juga berasal dari daerah tersebut. Disamping itu isteri beliau juga berasal dari Tapanuli Utara. Hal ini menunjukkan kedekatan berdasarkan genealogis sangat menuntungkan calon tersebut.

Perolehan suara calon anggota DPD yang gagal juga lebih banyak dibandingkan anggota DPD pada Kabupaten Tapanuli Utara, misalnya perolehan suara Pdt. Budiman Hutagalung sebanyak 7634 dan Rekson Silabab sebanyak 7866. Ini menunjukkan peranan hubungan genealogis sangat berpengaruh dalam mengumpulkan massa pendukung pada pemilihan umum tahun 2004 di Kabupaten Tapanuli Utara. Selain itu juga popularitas dan pendekatan kepada masyarakat merupakan salah satu usaha dalam memperoleh keberhasilan khususnya di Kabupaten Tapanuli Utara tersebut.

#### 4.7. Jaringan Politik Anggota DPD Di Kabupaten Simalungun

Selanjutnya dalam menganalisis jaringan politik anggota DPD pada Kabupaten Simalungun berikutnya digambarkan pada tabel dibawah ini :

**Tabel 11**  
**Jumlah Penduduk Kabupaten Simalungun**  
**Menurut Suku Bangsa, Agama, dan Jumlah Calon Pemilih**

Etnik (1)	Jumlah (2)	Agama (3)	Jumlah (4)	Pemilih (5)	Jumlah (6)
Melayu	3692	Islam	499741	Laki-Laki	255133
Karo	11283				
Simalungun	135396	Khatolik	49708		
Tapanuli Toba	265984				
Mandailing	15108	Protestan	302054		
Pak-Pak	574				
Nias	1536	Hindu	287	Perempuan	261026
Jawa	398203				
Minang	3870	Budha	2683		
Cina	549				
Aceh	1199				
Lainnya	18389	lainnya	1310		
Jumlah	855783	Jumlah	855783	Jumlah	516159

Sumber : BPS Sumut dan KPU Provinsi Sumatera Utara

Dari tabel 11 diatas terlihat bahwa di Kabupaten Simalungun etnik yang paling banyak adalah Jawa 398203, Tapanuli Toba 265984, Simalungun 135396, Lainnya

18389, Mandailing 15108, Karo 11283, Melayu 3692, Minang 3870, Nias 1536, Aceh 1199, Pak-Pak 574 dan Cina 549. Sedangkan agama yang paling banyak adalah Islam 499741, Protestan 302054, Khatolik 49708, Budha 2683, Lainnya 1310, dan Hindu 287. Jumlah pemilih di Kabupaten Simalungun 516159 orang

Perolehan suara anggota DPD terbanyak di Kabupaten Simalungun seperti yang terlihat tabel 4 diperoleh Halim Harahap 48176, Nurdin Tampubolon 37845, Raja Inal Siregar 10505, dan Yopie Batubara 7765. Dari hasil perolehan suara tersebut juga terlihat bahwa pengaruh hubungan kekerabatan dan agama menjadi tolak ukur keberhasilan anggota DPD ini khususnya di Kabupaten Simalungun. Seperti yang terlihat pada tabel diatas etnik paling banyak di Kabupaten Simalungun adalah etnis Jawa, Toba, dan Simalungun, sedangkan agama Islam dan Protestan merupakan agama yang paling banyak, sehingga dari data tersebut dapat dikatakan bahwa perolehan suara yang diperoleh Halim Harahap merupakan pengaruh banyaknya penganut agama Islam yang juga merupakan Islam Al-Wasliyah di Kabupaten Simalungun tersebut. Kemudian perolehan suara Nurdin Tampubolon juga ada pengaruh berdasarkan hubungan kekerabatan dan agama. Seperti yang diketahui Nurdin berasal dari Pematang Siantar dan beragama Kristen Protestan. Hal ini menunjukkan perolehan suara beliau bisa dihubungkan dengan faktor-faktor tersebut.

Dari data yang diperoleh dari lapangan perolehan suara terbanyak setelah Halim Harahap di Kabupaten Simalungun diperoleh calon anggota DPD yang gagal yaitu Parlindungan Purba sebanyak 38448. Bila dihubungkan dengan beliau unsur genealogis memang sangat berpengaruh mengingat beliau berasal dari etnis Simalungun dan etnis Simalungun juga dominan di Kabupaten tersebut. Bila dianalisis lebih lanjut calon

anggota DPD lainnya yang berasal dari Simalungun juga memperoleh suara lebih banyak dibandingkan calon anggota DPD lainnya seperti Rajamin Sirait sebanyak 14229 dan Mansen Purba 9314. Ini menunjukkan kesamaan marga dan daerah asal bisa merupakan faktor pendorong pemilih memilih calon anggota DPD tersebut.

Seperti dilihat bahwa perolehan suara etnis yang berlatarbelakang dari marga dan daerah yang sama dari calon anggota DPD ini sangat jauh berbeda. Hal ini disebabkan peran aktif dari Tim Sukses(TS) calon anggota DPD ini. Disamping itu popularitas mereka yang lebih dikenal masyarakat Simalungun pada umumnya. Seperti halnya Parlindungan Purba, beliau adalah mantan Ketua Umum DPP Himpunan Mahasiswa dan Pemuda Simalungun. Dengan demikian faktor hubungan kekerabatan, agama, popularitas, jabatan merupakan calon anggota DPD ini meraih dukungan suara di Kabupaten Simalungun.

#### **4.8. Jaringan Politik Anggota DPD Di Kabupaten Karo**

Selanjutnya dianalisis jaringan politik anggota DPD di Kabupaten Karo. Dalam menganalisis jaringan politik anggota DPD di Kabupaten karo di buat tabel dibawah ini :

Tabel 12  
**Jumlah Penduduk Kabupaten Karo**  
**Menurut Suku Bangsa, Agama, dan Jumlah Calon Pemilih**

Etnik	Jumlah	Agama	Jumlah	Pemilih	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Melayu	563	Islam	68267	Laki-Laki	98508
Karo	212417				
Simalungun	4002	Khatolik	47303		
Tapanuli/Toba	314433				
Mandailing	1178	Protestan	163667		
Pak-Pak	1275				
Nias	1077	Hindu	496	Perempuan	102684
Jawa	23613				
Minang	1672	Budha	1703		
Cina	1212				
Aceh	1552				
Lainnya	3719	Lainnya	2279		
<b>Jumlah</b>	<b>283713</b>	<b>Jumlah</b>	<b>283713</b>	<b>Jumlah</b>	<b>201192</b>

Sumber : BPS Sumut dan KPU Provinsi Sumatera Utara

Dari tabel 12 diatas terlihat di Kabupaten Karo etnik yang paling banyak adalah Karo 212.417, Tapanuli-Toba 31.433, Jawa 23.613, Simalungun 4.002, lainnya 3.719, Minang 1.672, Aceh 1552, Pak-Pak 1275, Cina 1212, Mandailing 1178, Nias 1077, dan Melayu 563, sedangkan agama yang paling banyak adalah Protestan 163.667, Islam 68.267, Khatolik 47.301, lainnya 2.279, Budha 1.702 dan Hindu 496. Jumlah Penduduk di Kabupaten Karo sebanyak 201192 orang.

Dari hasil perolehan suara DPD di Kabupaten Karo seperti yang terlihat pada tabel 4, yang memperoleh suara terbanyak adalah Halim Harahap 3.934, Nurdin Tampubolon 3030, Yopie Batubara 2440 dan Raja Inai Siregar 2.252. Namun perolehan suara anggota DPD yang berhasil ini tidak significant bila dilihat dari keseluruhan jumlah pemilih di Kabupaten Karo.

Dari data yang diperoleh dari lapangan menunjukkan bahwa pengaruh hubungan kekerabatan dan agama sangat menentukan perolehan suara calon dan anggota DPD di

Kabupaten Karo. Perolehan suara terbanyak di Kabupaten Karo ternyata bukan dari anggota DPD yang telah berhasil. Perolehan suara terbanyak diperoleh Robert Valentino Tarigan sebanyak 61.008, kemudian Pdt Aswin Perangin-angin sebanyak 8.177 dan Tjipta Sitepu sebanyak 7.058. Hal ini menunjukkan pengaruh ikatan kekerabatan sangat melekat dihati pemilih di Kabupaten Karo. disamping kepedulian calon terhadap daerah asalnya memilih calon anggota DPD ini. Seperti halnya Robert Valentino yang menyatakan kepada peneliti bahwa beliau tidak memanfaatkan hubungan kekerabatan, dan lebih bersifat nasionalis bahkan Robert Valentino tidak bisa berbahasa Karo. Namun kenyataan pengaruh kekerabatan itu sendiri sangat kental dalam pemilihan calon anggota DPD tahun 2004 di Kabupaten Karo.

Selain faktor hubungan kekerabatan itu, pengaruh agama juga mempengaruhi pilihan pemilih. Seperti yang dilihat dari tabel 12 diatas bahwa agama Kristen lebih banyak dibandingkan agama Islam. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh agama juga sangat menonjol di Kabupaten Karo, seperti perolehan suara Pdt. Aswin Perangin-angin yang cukup dominan di Kabupaten Karo. Bahkan perolehan suara Pdt. Aswin ini lebih banyak dibandingkan jumlah perolehan suara anggota DPD yang berhasil di Kabupaten Karo. Perolehan suara Pdt. Aswin Perangin-angin yang diperoleh di Kabupaten Karo menunjukkan pengaruh ikatan kekerabatan dan agama yang dimiliki beliau, disamping jabatannya sebagai Ketua Umum Persekutuan Injil Indonesia (PII) memudahkan pemilih di Kabupaten Karo menentukan pilihannya. Jadi, jelas terlihat bahwa pengaruh ikatan emosional sangat mempengaruhi pilihan rakyat terlebih halnya di Kabupaten Karo pada pemilihan calon anggota DPD Sumatera Utara.



Masyarakat sekarang ini pada umumnya sudah lebih memahami dunia politik, namun untuk terjun ke dunia politik masih sedikit. Hal ini disebabkan budaya masyarakat yang masih terbawa sampai kini, padahal perubahan zaman menuntut agar masyarakat harus lebih banyak belajar dan mengetahui isu yang berkembang, terlebih halnya dalam kancah politik. Kecenderungan masyarakat yang kurang berminat untuk terjun ke politik juga disebabkan pengaruh partai-partai politik yang dianggap masyarakat sebagai tempat untuk menekuni dunia politik.

Bila diperhatikan keberadaan partai politik di Indonesia tidak terlepas dari konflik-konflik intern dan extern. Hal ini sangat berpengaruh dengan perkembangan politik dan pandangan masyarakat terhadap partai politik tersebut. Menurut Duverger (Arbi Sanit : 1981) ada tiga tipe konflik dalam partai politik, pertama ialah konflik yang sama sekali tidak mempunyai dasar yang prinsipil, kedua ialah konflik yang timbul karena terdapat perbedaan mengenai bagian-bagian dari suatu prinsip, tapi tidak mengenai prinsip itu sendiri, dan yang ketiga ialah konflik sama sekali bertolak dari suatu prinsip dasar. Dalam hal ini masyarakat menjadi kurang berminat memasuki dunia politik melihat fenomena yang terjadi dalam kepengurusan politik tersebut.

Selain itu, persepsi masyarakat tentang dunia politik begitu sempit sebab menganggap politik itu sangat kejam dan hanya mengejar kekuasaan yang bisa merugikan orang lain. Oleh sebab itu rasa malas masyarakat untuk menekuni politik sudah tertanam dalam diri masyarakat itu. Selain itu kurangnya perhatian masyarakat terhadap politik juga disebabkan dari sejak pemilu pertama di Indonesia 1955 sampai

dengan 1999 partai politik merupakan kendaraan seseorang untuk memasuki dunia politik dalam mengejar jabatan di pemerintahan.

Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan tuntutan reformasi yang telah bergulir dalam mewujudkan aspirasi masyarakat telah terjadi sebuah perubahan pada tahun 2004. Adapun perubahan itu dalam menuju demokrasi yang diinginkan adalah pemilihan umum. Pada pemilihan umum tahun 2004 yang lalu rakyat sudah bisa bernafas lega tatkala rakyat bisa menentukan sendiri wakil-wakilnya dalam menyampaikan aspirasi kepada pemerintah.

Perubahan pada pesta demokrasi pemilihan umum tahun 2004 juga terjadi, dimana seseorang bisa mencalonkan diri menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku dengan tujuan membantu menyuarakan aspirasi masyarakat di daerah kepada pemerintah pusat. Dengan adanya kesempatan menjadi elit politik tanpa melalui partai politik membangkitkan semangat masyarakat Indonesia untuk terjun ke politik. Namun dari kesempatan itu masih sedikit dari jumlah masyarakat yang ingin menjadi anggota DPD (Dewan Perwakilan Daerah). Demikian juga halnya di Sumatera Utara. Seperti yang diketahui penulis dilapangan bahwa calon anggota DPD (Dewan Perwakilan Daerah) yang mendaftar di KPU Provinsi Sumatera Utara untuk menjadi calon anggota DPD sebanyak 151 orang, setelah diverifikasi KPU SUMUT dari persyaratan yang sudah ditentukan dalam Undang-Undang yang bisa menjadi calon anggota DPD Sumatera Utara pada pemilihan umum tahun 2004 sebanyak 48 orang. Hal ini menunjukkan bahwa minat masyarakat untuk terjun ke dunia politik masih relatif rendah.

Dalam pemilihan umum tahun 2004 yang lalu, calon anggota DPD ini harus mengumpulkan suara sebanyak-banyaknya dari jumlah keseluruhan dari Kabupaten Kota di Sumatera Utara. Hal ini berbeda dengan calon legislatif yang melalui kendaraan partai politik. Dengan kata lain, calon anggota DPD ini harus berjuang dan mengatur strategi untuk merekrut suara di Kabupaten/Kota yang ada di Sumatera Utara, sebab dalam pemilihan umum tahun 2004 yang lalu mereka harus mampu menjaring dukungan langsung dari masyarakat.

Dalam penelitian ini dibahas tentang jaringan politik calon dan anggota DPD pada pemilihan umum tahun 2004 di Sumatera Utara. Pembahasannya diawali dari strategi jaringan politik calon dan anggota DPD dalam meraih dukungan masyarakat di Sumatera Utara. Dalam pembahasan ini difokuskan sesuai dengan pokok permasalahan penelitian ini antara lain jaringan politik calon dan anggota DPD berdasarkan hubungan kekerabatan (*genealogy*), agama, political cost dan keterlibatan Tim Sukses masing-masing.

#### **5.1. Jaringan Politik Calon dan Anggota DPD Berdasarkan Hubungan Kekerabatan**

Salah satu langkah yang dilakukan calon dan anggota DPD dalam mengumpulkan dukungan suara pada pemilihan umum adalah dengan memanfaatkan hubungan kekerabatan antara lain keluarga, teman sejawat, semarga dan daerah asal. Pemanfaatan jaringan politik melalui hubungan kekerabatan merupakan langkah yang sangat sederhana karena strategi seperti ini tidak begitu sulit dilakukan dalam mengumpulkan dukungan suara. Ada beberapa alasan yang dapat dikemukakan mengenai jaringan politik calon dan anggota DPD dalam meraih dukungan suara melalui hubungan kekerabatan **Pertama**, sosialisasi politik (*political socialization*) tidak sulit dilakukan sebab pada dasarnya melalui hubungan kekerabatan calon sudah dikenal pemilih, terlebih halnya

dalam lingkungan keluarga dekat. Demikian juga dengan teman sejawat. dimana selama ini ada hubungan antara atasan dan bawahan (patron client) bahkan faktor kedekatan selama ini juga merupakan modal dalam pengumpulan suara calon dan anggota DPD ini dalam pemilihan umum. Selain itu faktor satu marga dan daerah asal tak luput dari strategi jaringan politik calon dan anggota DPD untuk dimanfaatkan dalam proses pendulangan suara pada pemilihan umum tahun 2004 yang lalu. **Kedua, Partisipasi Politik (Political Participation)** masyarakat melalui hubungan keluarga dan kerabat lebih mudah didapatkan sebab rasa kepedulian dan keinginan untuk memperoleh kesempatan menjadi seseorang yang mempunyai kekuasaan pada dasarnya timbul dari keinginan keluarga dan kerabat itu sendiri.

**Ketiga, Komunikasi Politik (Political Communication)** lebih mudah dibangun sebab kedekatan dan sikap saling mengenal selama ini menjadi tolak ukur keberhasilan pengumpulan dukungan suara calon dan anggota DPD tersebut. Komunikasi politik gunanya untuk menghubungkan pikiran politik yang hidup dalam masyarakat.

Mengenai komunikasi politik ini, Bogardus dalam Rusadi (1983 : 64)

"Almost synonymous with the term interaction is another communication. Communication is the first and all the time nothing if it is not interaction. Communication is interaction particularizes. It is interaction in terms of particular stimuli and counter stimuli. It is interaction through the specific use of symbols and their meanings, that is, of symbols that are stimuli and that are responded to according to their meanings for the observers and listeners. In turn these meaning are new stimuli and thus the process of interaction goes on. Communication is the use by one individual of symbols whose meanings are understood by other person".

(Yang hampir sama arti dengan istilah interaksi ialah Komunikasi. Komunikasi bukan apa-apa kalau bukan interaksi. Komunikasi adalah interaksi secara khusus, yaitu stimuli kontra stimuli. Komunikasi adalah interaksi melalui penggunaan symbol atau makna yang secara khas, yaitu merupakan rangsangan yang mendapat tantangan sesuai dengan maknanya bagi pengamat dan pendengar yang bersangkutan. Sebaliknya makna ini merupakan rangsangan baru dan dengan demikian proses interaksi terus berjalan. Komunikasi adalah pemakaian simbol oleh individu, yang makna atau artinya dimengerti oleh orang lain).

Dengan adanya hubungan yang sudah terbina melalui komunikasi dengan keluarga dan kerabat ternyata memudahkan calon untuk mengenalkan diri sebagai calon dan anggota DPD dengan harapan pemilih menyalurkan aspirasinya melalui interaksi secara khusus terhadap calon pada pemilihan umum. Keempat, rekrutmen politik dengan melibatkan keluarga dan kerabat lebih efisien sebab keberadaan pemilih sebagai keluarga dan kerabat calon juga mempunyai kepentingan terhadap jaringan politik calon dan anggota DPD itu.

Dari keempat alasan peneliti kemukakan diatas terlihat bahwa jaringan politik calon dan anggota DPD (Dewan Perwakilan Daerah) sudah terbentuk sedemikian halnya karena faktor ikatan yang melekat melalui hubungan genealogis sangat erat.

## **5.2. Jaringan Politik Calon dan Anggota DPD melalui Peranan Agama**

Seperti diketahui bahwa sejak pemilu 1955 sampai dengan 1999 agama tidak terlepas dari jembatan elit politik dan partai politik dalam mewujudkan harapan menjadi seorang yang mempunyai kekuasaan (power). Demikian halnya pada pemilihan umum pada tahun 2004 yang lalu, dimana sistem pemilu adalah proporsional terbuka yaitu pemilih langsung memilih wakilnya berdasarkan tanda gambar yang ada dilembar kertas surat suara. Selain itu hal yang berbeda pada pemilu yang dilaksanakan pada tanggal 5 April 2004 yang lalu adalah Dewan Perwakilan Daerah. Dalam pemilihan Dewan Perwakilan Daerah rakyat juga memilih langsung wakil yang dikehendaki, sehingga para calon anggota DPD ini harus mampu menarik simpati masyarakat melalui strategi politik yang dijalankan.

Strategi jaringan politik calon dan anggota DPD selain melibatkan hubungan genealogis juga tidak terlepas dari pengaruh agama yang dianut para calon. Walaupun sebahagian calon dan anggota DPD ini mengklaim dirinya sebagai orang yang bersifat nasionalis, namun realita yang diperoleh peneliti dari lapangan pengaruh agama masih mewarnai pemilihan anggota DPD pada pemilihan umum tahun 2004 yang lalu.

Seperti diketahui bahwa di Sumatera Utara persentase penduduk menurut agama Islam sebesar 65,45%, Protestan 26,62%, Khatolik 4,78%, Budha 2,82%, Hindu 0,019% dan lainnya 0,14%. Sementara itu calon anggota DPD yang dipilih pada pemilu legislatif 2004 sebanyak 48 orang dan menganut agama yang berbeda-beda. Dari hasil perolehan suara calon dan anggota DPD terlihat bahwa jaringan politik yang dilakukan calon dan anggota DPD di Kabupaten/Kota menunjukkan bahwa calon yang didukung masyarakat yang agamanya sama dan mayoritas di satu Kabupaten/Kota akan memperoleh suara terbanyak walaupun belum significant, sebab calon anggota DPD itu banyak berasal dari agama yang sama.

Strategi jaringan politik calon dan anggota DPD selain melibatkan hubungan genealogis juga tidak terlepas dari pengaruh agama. Pemanfaatan jaringan politik melalui peranan agama dilakukan dengan berbagai cara. Pertama, melalui spanduk, gambar-gambar yang menampakkan identitas calon anggota DPD bagi masyarakat yang seiman dengan calon. Dengan melakukan sosialisasi diri melalui spanduk dan gambar-gambar ditujukan kepada masyarakat pemilih yang belum mengenal calon dan belum menentukan pilihannya. Kedua, melalui pendekatan agama, baik dalam acara formal maupun informal. Dalam acara formal calon anggota DPD yang berkedudukan sebagai penceramah agama biasanya melakukan ceramah dan sekaligus mensosialisasikan diri

kepada umatnya bahwa beliau adalah calon dan anggota DPD ini hanya sebagai tamu apabila ada undangan dari masyarakat dan Tuan rumah yang memperkenalkan mereka. Ketiga, melalui pendekatan dengan tokoh-tokoh agama atau pemuka agama yang dianggap sangat berpengaruh dikalangan masyarakat, sebab tokoh agama dan pemuka agama menjadi contoh dalam kehidupan masyarakat yang masih tradisional, sehingga dengan pendekatan kepada tokoh-tokoh ini diharapkan mampu mendulang suara. Keempat, melalui organisasi-organisasi keagamaan itu juga turut serta mendukung calon anggota DPD ini. Kelima, melalui pendekatan dengan partai-partai politik yang berlandaskan keagamaan. Hal ini dilakukan agar massa pendukung partai politik yang pengaruhnya sampai kedaerah-daerah juga mendukung calon anggota DPD tersebut.

Dari kelima alasan yang dikemukakan diatas terlihat bahwa jaringan politik calon dan anggota DPD melalui peranan agama juga dimanfaatkan oleh elit politik ini. Pengaruh agama bisa mempengaruhi pemilih dalam menentukan pilihannya. Menurut Soefihara (2005 : 59) pemilih muslim (Islamic Voters) sangat strategis untuk mendongkrak perolehan suara terlebih halnya dalam perolehan suara partainya. Rekrutmen merupakan indikator paling nyata Islam masih menjadi kekuatan pengumpul suara partai. Itu sebabnya, dalam setiap pemilu, suara pemilih muslim selalu diperebutkan oleh banyak partai.

Oleh sebab itu, jelas terlihat bahwa pemanfaatan jaringan politik calon dan anggota DPD yang berasal dari agama yang berbeda juga memanfaatkan pengaruh agama dalam proses strategi penjangkaran massa pendukung dalam pemilihan umum tahun 2004. Strategi seperti ini dimanfaatkan mengingat calon anggota DPD ini, bersifat independent sehingga bisa mempengaruhi calon melalui pengaruh agama.

### 5.3. Jaringan Politik Calon dan Anggota DPD Dalam Mensosialisasikan Diri Dengan Pembiayaan Politik (Political Cost)

Dalam berpolitik tidak terlepas dari pembiayaan politik (political cost). Hal ini yang dilakukan calon dan anggota DPD dalam pemilihan umum tahun 2004 Untuk meraih dukungan suara pada Kabupaten/Kota di Sumatera Utara pada pemilihan umum tahun 2004 bukan hal yang mudah untuk dilakukan, dimana calon belum semua dikenal oleh rakyat. Oleh karena itu calon anggota DPD ini harus mensosialisasikan diri kepada masyarakat pemilih terlebih halnya pada masyarakat yang awam. Dalam proses mensosialisasikan diri kepada masyarakat, calon anggota DPD ini membutuhkan dana untuk mengatur strategi dalam mencari dukungan masyarakat. Langkah politik yang dilakukan. **Pertama**, pengenalan melalui gambar-gambar dan spanduk atau alat dan prasarana lainnya. Hal ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit mengingat calon anggota DPD ini adalah utusan perorangan. Selain itu dukungan suara yang dikumpulkan adalah dari seluruh masyarakat pada Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. **Kedua**, dalam menarik simpati masyarakat, calon anggota DPD ini ada yang memberikan sumbangan kepada rakyat sebagai wujud kepeduliannya terhadap ekonomi rakyat yang tidak mampu. Wujud kepedulian itu diperlihatkan melalui pembangunan sarana dan prasarana pada daerah yang masyarakat miskin dan tertinggal. Hal ini juga membutuhkan dana. **Ketiga**, untuk mensosialisasikan diri kepada masyarakat sebahagian dari calon anggota DPD ini melakukan komunikasi politik melalui media massa dan elektronik. Dalam melakukan komunikasi politik seperti ini calon anggota DPD ini tidak sedikit mengeluarkan biaya agar mudah dikenal oleh public atau masyarakat.



**Keempat**, salah satu strategi dalam jaringan politik adalah melalui lobi-lobi politik. Dalam melakukan lobi-lobi politik ini calon dan anggota DPD ini juga mendanai tim-tim lobi politik yang bekerja keras agar calon yang dilobi bisa berhasil memperoleh suara terbanyak.

Dengan demikian, pemanfaatan jaringan politik calon dan anggota DPD pada pemilihan umum tidak terlepas dari pengaruh uang yang dimiliki calon dalam usaha mengumpulkan dukungan suara dari masyarakat. Hal ini seperti yang terlihat dari langkah-langkah yang dilakukan seperti yang telah dipaparkan penulis diatas.

#### **5.4. Jaringan Politik Calon Dan Anggota DPD Melalui Pelibatan Tim Sukses**

Dalam pelaksanaan pemilihan umum tahun 2004, dimana rakyat selain memilih partai politik juga memilih calon anggota DPD. Dalam hal ini calon anggota DPD tersebut harus melakukan strategi penjaringan dukungan melalui langkah-langkah politik yang diambil diantaranya melibatkan hubungan kekerabatan, agama, uang dan membentuk Tim Sukses.

Dalam jaringan politik pelibatan Tim Sukses untuk mencari dukungan kepada masyarakat merupakan langkah strategis, sebab kelompok Tim Sukses ini adalah kelompok yang bisa disebut sebagai kelompok strategis dalam proses pelaksanaan pengumpulan suara dalam pemilu. Menurut Evers (1992 : 12) kelompok strategis mempunyai arti yang penting untuk perkembangan politik, situasi konflik, reformasi ataupun revolusi dalam masyarakat masing-masing. Secara aktif mereka mewakili tujuan politiknya sendiri. Mereka cenderung menunjang kegiatan-kegiatan pemimpinnya yang muncul dari kalangan sendiri, atau pemimpin yang dianggap mewakili keinginannya.

Peranan kelompok yang dibentuk demi kepentingan politik sangat penting dalam mengatur strategi untuk memenangkan calon dalam setiap pemilihan terlebih halnya dalam pemilihan umum tahun 2004, dimana rakyat memilih langsung figur-figur elit politik yang mampu mewakili aspirasinya.

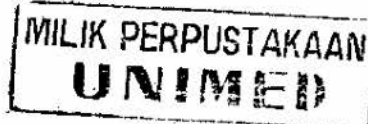
Jaringan politik anggota DPD ini dengan melibatkan Tim Sukses mempunyai alasan sebagai berikut. **Pertama**, lebih mudah menjangkau dan merekrut massa pendukung yang berada di luar tempat domisili calon tersebut. Hal ini dilakukan karena pengumpulan dukungan suara tidak hanya pada satu Kabupaten Kota saja melainkan dari seluruh Kabupaten Kota di Sumatera Utara. **Kedua**, dalam merekrut dukungan suara pada Kabupaten/Kota lebih efisien dan terorganisir, maksudnya dalam proses pengumpulan suara yang berada pada Kabupaten Kota bisa diketahui sejauhmana masyarakat pemilih mendukung calon itu atau bisa diketahui berdasarkan data base dari peta kekuatan politik yang dibuat Tim Sukses. **Ketiga**, dalam penggunaan dana yang dikeluarkan lebih terarah, sebab calon sudah bisa memperhitungkan biaya yang akan dikeluarkan dalam agenda acara-acara yang berkaitan dengan proses mensosialisasikan calon pada masyarakat. **Keempat**, dengan melibatkan Tim Sukses berarti membuka strategi untuk melakukan pendekatan terhadap simbol-simbol massa atau dengan komunitas pemilih tertentu. Strategi pendekatan politik kepada pemilih bisa dilakukan dengan partai-partai politik, organisasi politik, kaum intelektual, kaum profesional, dan kelompok lainnya. Jaringan politik seperti ini tidaklah mudah untuk dilakukan apabila tidak melibatkan out group (kelompok luar) dari keberadaan calon. Dalam hal ini adalah keterlibatan Tim Sukses dalam proses rekrutmen dukungan suara dalam pemilihan umum, dimana calon sebagai peserta perorangan.

Dari hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan, strategi jaringan politik yang banyak melibatkan Tim Sukses dalam meraih dukungan suara dilakukan oleh anggota DPD yang berhasil duduk. Sedangkan calon anggota DPD yang gagal tidak banyak melibatkan Tim Sukses mereka dan lebih banyak melakukan sosialisasi melalui pendekatan pribadi kepada masyarakat.

Oleh sebab itu, dari hasil perolehan data di lapangan menunjukkan bahwa dengan melibatkan Tim Sukses sebagai salah satu strategi jaringan politik anggota DPD ini ternyata mampu mendulang dukungan suara pada Kabupaten/Kota di Sumatera Utara.

## KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

### A. KESIMPULAN



Berdasarkan pada penelitian dan pembahasan hasil penelitian yang telah peneliti paparkan pada uraian terdahulu maka disini akan dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Jaringan politik calon anggota DPD yang gagal duduk sebagai anggota DPD untuk mewakili Sumatera Utara pada pemilu 2004 dilakukan melalui cara Pertama, melalui sosialisasi politik dan partisipasi politik tanpa melibatkan Tim Sukses. Dalam hal ini Tim Sukses hanya sebagai formalitas untuk mendaftarkan persyaratan kampanye di KPUD SUMUT. Kedua, melalui sosialisasi politik, partisipasi politik dan komunikasi politik. Jaringan melalui cara demikian hanya dilakukan calon anggota DPD tanpa banyak melibatkan Tim Suksesnya. Ketiga, strategi jaringan politik calon anggota DPD dilakukan melalui sosialisasi politik, partisipasi politik dan komunikasi politik. Proses penjaringan dukungan suara melalui cara demikian tidak semata-mata dilakukan calon anggota DPD itu, namun dibantu Tim Sukses yang turut memperjuangkan keberhasilan calon anggota DPD tersebut.

2. Jaringan politik anggota DPD yang berhasil duduk sebagai anggota DPD untuk mewakili Sumatera Utara pada pemilihan umum tahun 2004 dilakukan dengan satu cara yaitu melalui sosialisasi politik, partisipasi politik, komunikasi politik, dan rekrutmen politik. Strategi jaringan politik yang dijalankan anggota DPD yang berhasil lebih banyak dibantu oleh Tim Sukses yang solid dalam memenangkan calon yang mereka dukung. Proses pengumpulan suara yang direkrut oleh Tim Sukses anggota DPD yang berhasil ini yaitu dengan mensosialisasikan visi misi calon kepada masyarakat pada Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. Proses pensosialisasian diri calon kepada masyarakat juga tidak terlepas dari kinerja Tim Sukses yang terorganisir dari tingkat Provinsi ke daerah-daerah pemilihan di Sumatera Utara.
3. Pemanfaatan jaringan politik calon dan anggota DPD pada pemilu pada Kabupaten/Kota di Sumatera Utara tidak terlepas dari usaha pendekatan melalui hubungan genealogis yang dimulai dari pendekatan dengan keluarga, pendekatan emosional melalui pertemanan (*emotional friendship*), pendekatan dengan marga yang sama dan pendekatan dengan yang berasal dari satu daerah yang sama.
4. Pemanfaatan jaringan politik calon dan anggota DPD pada Kabupaten/Kota di Sumatera Utara juga dilakukan melalui pendekatan agama antara lain dengan masyarakat yang seiman, tokoh-tokoh pemuka agama, organisasi-organisasi keagamaan sampai kepada pendekatan dengan partai-partai politik yang berhaluan keagamaan.

5. Strategi jaringan politik calon dan anggota DPD ini dilakukan dengan pembiayaan politik (political cost) yang tidak sedikit. Hal ini dilakukan untuk proses mensosialisasikan diri kepada masyarakat melalui penyampaian visi, misi dengan mengundang masyarakat dalam berdiskusi dan temu ramah.
6. Proses perjaringan pendulangan dukungan suara dari tingkat provinsi ke daerah-daerah merupakan usaha yang tidak mudah, sehingga calon dan anggota DPD ini harus dibantu oleh Tim Sukses masing-masing calon. Namun kegagalan calon yang tidak berhasil duduk menjadi anggota DPD salah satunya adalah kurang melibatkan Tim Sukses yang handal.

## **B. IMPLIKASI**

Sebetulnya, banyak hal positif yang bisa dijadikan sebagai langkah menjalankan proses pencalonan, dan diyakini unsur kekerabatan, daerah asal, pelibatan kelompok, peran agama dan pendekatan-pendekatan public lewat informasi langsung atau tidak langsung penyuguhan program, visi dan misi serta lain sebagainya.

Akan tetapi, bisa dimaklumi bahwa tergantung pada niat awal serta terlepas dari sebuah kepentingan jika tujuan seseorang dalam pencalonan di lembaga-lembaga tertentu, memang semula dan seterusnya adalah bagi kepentingan sesama serta memomorkanduakan kepentingan kelompok, golongan atau pribadi maka langkah-langkah positif yang bisa dilakukan adalah berdasarkan sikap, perilaku, dan usaha kebersamaan, semangat kebersamaan, dan menjunjung tinggi nilai moral dan nilai-nilai kebersamaan itu sendiri.

Jika sebaliknya, maka hasil yang didapat lambat atau cepat mungkin atau tidak adalah sesuatu yang bisa terjadi diluar kemampuan manusia sebagai makhluk sosial dan beragama. Ujung dari harapan segenap komunitas Bangsa Indonesia dalam pemberlakuan Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu dan UU No. 22 Tahun 2003 khusus Bab IV dalam pasal-pasal nya tentang susunan dan keanggotaan DPD adalah sebuah sukses. Tugas dan tanggung jawab maupun kewajiban anggota DPD sebenarnya amatlah strategis, sehingga tertumpu harapan terealisasinya suatu momentum prinsip bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan akan dapat menjadi kenyataan

Dari kesimpulan yang telah disebutkan diatas diperoleh beberapa implikasi yaitu:

1. Pemanfaatan Jaringan politik dengan melibatkan hubungan genealogis, agama dan Tim Sukses harus dipertahankan dalam pemilihan agar bisa berhasil duduk pada lembaga dan institusi negara.
2. Untuk memperoleh dukungan dari masyarakat dalam setiap pemilihan langsung diperlukan sosialisasi dan komunikasi dari sejak awal dan bukan hanya ketika ingin mencalonkan diri sebagai calon anggota DPD saja.
3. Di dalam strategi jaringan politik, popularitas bisa menjamin calon akan dipilih oleh rakyat.

### C. SARAN

1. Dalam setiap pemilihan langsung seperti pemilihan anggota DPD di Sumatera Utara, sebaiknya calon anggota DPD lebih konsentrasi di daerah-daerah, terlebih halnya pada Kabupaten/Kota yang penduduknya banyak. Dengan adanya strategi politik seperti ini bisa menjadikan calon berhasil memperoleh kemenangan.
2. Untuk mengumpulkan dukungan dari masyarakat, seperti halnya dalam pemilihan anggota DPD di Sumatera Utara, sebaiknya peran serta Tim Sukses lebih ditingkatkan. Dengan adanya keterlibatan Tim Sukses mampu membantu calon dalam merekrut dukungan pada setiap Kabupaten/Kota di Sumatera utara yang ada.
3. Diharapkan kepada anggota DPD yang berhasil duduk di lembaga negara mampu menjalankan tugas sebaik-baiknya selaku amanat dari rakyat yang berada di daerah dan bukan merupakan tugas dan kewajibannya serta melupakan kontrak politik dengan rakyat di daerah demi kepentingan individu dan golongan.



## DAFTAR PUSTAKA

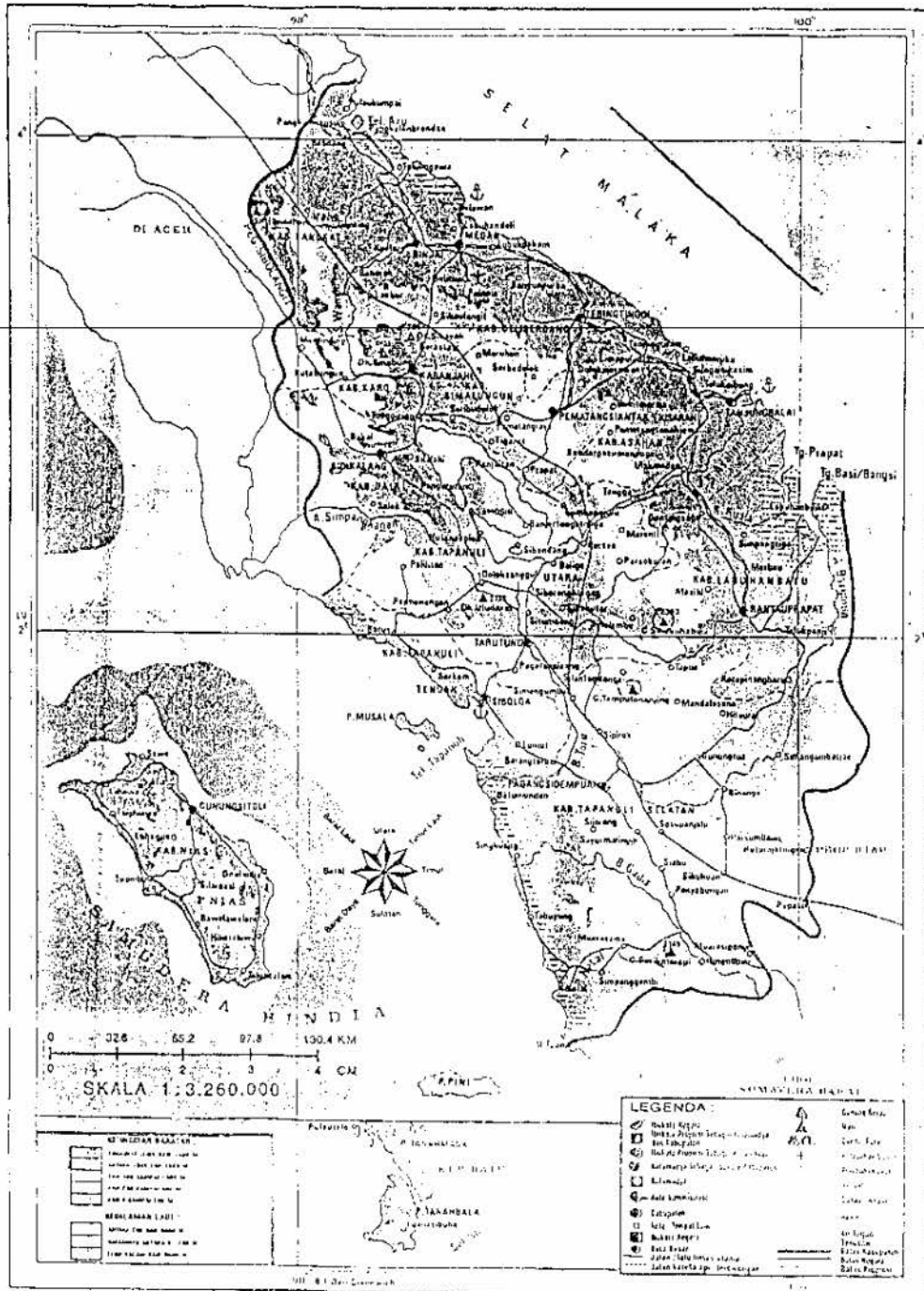
- Balandier, Georges. (2002), *Antropologi Politik* (Ed. Bungaran Antonius Simanjuntak), Medan.
- Blau, Peter M.(1971), *Birokrasi Dalam Masyarakat Modern* (Terj. Gary Jusuf), Jakarta : UI -Press
- Budiarjo, Miriam. (2003). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka.
- Claessen Henri J.M. (1978), *Political Anthropology*. Mouton Publishes, Newyork.
- Duyerger, Maurice. (2003), *Sosiologi Politik* (Terj. Daniel Dhakidae), Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Etzioni, Amitai. (1985). *Organisasi-Organisasi Modern*, Jakarta : UI Press.
- Evers, Hans.(1992), *Kelompok-Kelompok Strategis*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia
- Fadhil, Nur Ahmad. (2000), *Agama Sebagai Sistem Kultural*, Penelusuran terhadap Metodologi Clifford Geertz dan Ilmu social Interparatif, Medan : IAIN PRESS.
- Geertz, Clifford. (2003), *Kebudayaan dan Agama* (Terj. Budi Hardiman), Jakarta : Kanisius
- [Http://www.Transparansi.or.id/majalah.html](http://www.Transparansi.or.id/majalah.html)
- Kantaprawira, Rusadi. (1983), *Sistem Politik Indonesia* : Sinar Baru Bandung.
- Koentjaraningrat. (1985), *Pokok-Pokok Antropologi Sosial*, Jakarta : Dian Rakyat
- \_\_\_\_\_ : (1987), *Sejarah Teori Antropologi I*, Jakarta : UI PRESS
- \_\_\_\_\_ . (1990), *Sejarah Teori Antropologi II*. Jakarta : UI PRESS

- Kondisi Kesejahteraan Rakyat dan Ekonomi Propinsi Sumatera Utara Tahun 1999 –2003, BPS Propinsi Sumatera Utara.
- Maarif, Syafii. dkk. (2004). **Muhammadiyah, Eksperimen Politik dalam Pemilu Presiden 2004**, Jakarta : Rineka Cipta.
- Maliki, Zainuddin. (2000). **Agama Rakyat Agama Penguasa**, Konstruksi Tentang Realitas Agama dan Demokratisasi. Yogyakarta : Galang Press.
- Masoed, Mochtar dan Colin. (1978). **Perbandingan Sistem Politik**, Gajah Mada University Press.
- Mauss, Marcel. (1992), **Pemberian, Bentuk dan Fungsi Perukaran Di Masyarakat Kuno** (Terj. Parsudi Suparlan), Jakarta : Yayasan Obor Indonesia
- Media Gebrak, Edisi Tanggal 12-19 Mei 2004
- Media Warta Kita, Edisi Tanggal 11 Mei 2004
- Miftahuzzaman. (2000), **Solusi Krisis Islam Politik atau Jamaah Islam**: CV. Aneka Solo.
- Poloma, Margaret M. (1992). **Sosiologi Kontemporer**, Jakarta : Rajawali Press.
- Profil Propinsi Republik Indonesia Sumatera Utara. (1992), Jakarta : Yayasan Bhakti Wawasan Nusantara.
- Profil Sumatera Utara (1988). Sumatera Utara: Biro Humasy Pemerintah Daerah Tingkat I Sumatera Utara.
- Sanit, Arbi. (1981), **Sistem Politik Indonesia, Kestabilan Peta Kekuatan Politik dan Pembangunan**, Jakarta : Rajawali Pers.
- Seligman, Lester G. (1989), **Elite dan Modernisasi** (Penyunting, Aidit Alwi dan Zainal), Yogyakarta : Liberty
- Soefihara, Endin AJ. (2005), **Merebut Nurani Rakyat, Koalisi, konflik, dan Etika Politik**, Sebuah Analisis mutakhir tentang praktis politik di Indonesia, Jakarta : Blantika

- Sokanto, Surjono. (1990). **Sosiologi Suatu Pengantar**, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Sukandarrumidi. (2002). **Metodologi Penelitian**: Gajah Mada University Press.
- Supriyanto, Didik Dan Topo Santoso.(2004). **Mengawasi Pemilu Mengawal Demokrasi**, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Tahqiq, Nanang. (2004). **Politik Islam**, Jakarta : Kencana.
- Tanja, Victor I. (1998). **Pluralisme Agama dan Problema Sosial** . Jakarta: Pustaka Cisedindo
- Tanter, Richard dan Kenneth Young. (1989). **Politik Kelas Menengah Indonesia**, Jakarta : PT. Pustaka LP3ES.
- Turner, Bryan S. (1992). **Sosiologi Islam. Suatu Telaah Analisis Atas, Tesa, Sosiologi Weber** (Terj. G.A. Ticoalu, Jakarta : Rajawali Pers.
- Usman, Husaini, Dr. (2004). **Metodologi Penelitian Sosial**. Bandung : Bumi Aksara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 (2003). **Tentang Pemilu, Anggota DPR, DPD dan DPRD**, Jakarta : BP Panca Usaha
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2003 **Tentang Susunan Dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, Dan DPRD**, Jakarta : Pustaka Pergaulan.

LAMPIRAN I

PETA  
PROPINSI SUMATERA UTARA





LAMPIRAN 3

LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK  
PROPINSI SUMATERA UTARA MENURUT  
KAB/KOTA 1961-2000

Kabupaten/Kota	1961-1971	1971-1980	1980-1990	1990-2000
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01. Nias	1,67	2,60	2,32	1,55
02. Mandailing Natal	-	-	1,94	1,60
03. Tapanuli Selatan <sup>1)</sup>	2,44 <sup>*)</sup>	2,07 <sup>*)</sup>	2,54	1,34
04. Tapanuli Tengah	3,06	2,30	2,52	1,37
05. Tapanuli Utara <sup>2)</sup>	1,07 <sup>**)</sup>	1,01 <sup>**)</sup>	0,12	0,04
06. Toba Samosir	-	-	0,29	0,51
07. Labuhan batu	3,51	4,70	2,97	1,47
08. Asahan	3,83	2,98	1,32	0,58
09. Simalungun	2,96	1,51	0,59	0,63
10. Dairi	2,97	3,00	1,37	0,58
11. Karo	2,14	2,06	1,64	0,99
12. Deli Serdang	3,99	-1,55	2,59	2,10
13. Langkat	4,32	3,37	1,47	1,14
14. Sibolga	0,90	3,92	1,84	1,41
15. Tanjung Balai	1,45	2,45	9,95	2,11
16. Pematang Siantar	1,20	1,68	3,85	1,00
17. Tebing Tinggi	1,47	2,69	2,40	0,71
18. Medan	2,90	12,99	2,30	1,00
19. Binjai	2,87	2,72	9,05	1,68
SUMATERA UTARA	2,95	2,60	2,06	1,20

Catatan : Termasuk penduduk yang tidak bertempat tinggal tetap (tuna wisma, awak kapal, penghuni perahu/rumah terapung, dan masyarakat terpencil).

Keterangan : \*) Masih termasuk Tapanuli Selatan dan Mandailing Natal

\*\*) Masih termasuk Tapanuli Utara dan Toba Samosir

sumber : SP 2000, BPS Propinsi Sumatera Utara

## LAMPIRAN 4

PRESENTASE PENDUDUK PROPINSI SUMATERA UTARA  
MENURUT AGAMA DAN KAB/KOTA TAHUN 2000

Kabupaten/Kota	Agama						Jumlah
	Islam	Khatolik	Protestan	Hindu	Budha	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
01. Nias	4,43	14,13	81,20	0,01	0,06	0,17	100,00
02. Mand. Natal	97,40	0,33	2,25	0,01	0,00	0,01	100,00
03. Tapanuli Selatan <sup>1)</sup>	91,42	0,81	7,63	0,01	0,12	0,02	100,00
04. Tapanuli Tengah	42,25	13,34	43,93	0,01	0,05	0,42	100,00
05. Tapanuli Utara <sup>2)</sup>	3,90	8,62	87,33	0,01	0,03	0,11	100,00
06. Toba Samosir	3,16	23,21	72,95	0,00	0,04	0,64	100,00
07. Labuhan batu	83,71	2,10	13,08	0,06	1,01	0,04	100,00
08. Asahan	87,94	1,46	9,57	0,04	0,91	0,07	100,00
09. Simalungun	58,40	5,81	35,30	0,03	0,31	0,15	100,00
10. Dairi	17,16	11,25	71,30	0,02	0,09	0,18	100,00
11. Karo	24,06	16,67	57,69	0,17	0,60	0,80	100,00
12. Deli Serdang	79,59	3,00	15,09	0,19	2,04	0,08	100,00
13. Langkat	90,00	1,06	7,56	0,09	0,95	0,34	100,00
14. Sibolga	58,46	5,21	32,36	0,14	3,67	0,15	100,00
15. Tanjung Balai	81,99	1,06	7,78	0,08	9,07	0,03	100,00
16. Pematang Siantar	42,86	5,06	45,14	0,23	6,67	0,04	100,00
17. Tebing Tinggi	77,47	1,78	11,46	0,21	8,97	0,10	100,00
18. Medan	67,83	2,89	18,13	0,68	10,40	0,07	100,00
19. Binjai	85,11	1,66	6,89	0,43	5,89	0,03	100,00
SUMATERA UTARA	85,11	4,78	26,62	0,19	2,82	0,14	100,00

Sumber : SP 2000, BPS Propinsi Sumatera Utara

## LAMPIRAN 5

**PERSENTASE PENDUDUK PROPINSI SUMATERA UTARA  
MENURUT SUKU BANGSA DAN KAB/KOTA TAHUN 2000**

Kabupaten/Kota	Suku Bangsa												Jumlah
	Melayu	Karo	Simalungun	Tapanuli /Toba	Mandailing	Pak- Pak	Nias	Jawa	Minang	Cina	Aceh	Lainnya	
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
01. Nias	0,55	0,01	0,00	0,35	0,06	0,04	95,31	0,08	0,41	0,19	0,09	2,90	100,00
02. Mandailing Natal	6,74	0,03	0,02	3,02	80,20	0,01	0,26	6,30	1,13	0,00	0,07	2,22	100,00
03. Tapanuli Selatan <sup>1)</sup>	0,14	0,07	0,01	26,60	63,08	0,02	1,74	5,57	0,95	0,11	0,07	1,65	100,00
04. Tapanuli Tengah	0,65	0,23	0,17	73,09	3,16	2,10	9,91	6,42	1,78	0,07	0,51	1,90	100,00
05. Tapanuli Utara <sup>2)</sup>	0,05	0,11	0,06	96,51	0,14	1,53	0,21	0,31	0,14	0,11	0,02	0,81	100,00
06. Toba Samosir	0,05	0,14	0,11	96,72	0,08	0,04	0,35	0,85	0,22	0,04	0,07	1,35	100,00
07. Labuhan Batu	3,97	0,44	0,20	30,21	14,85	0,03	0,75	45,50	0,81	0,93	0,21	2,10	100,00
08. Asahan	16,73	0,38	0,47	22,26	2,68	0,03	0,11	52,25	1,12	0,71	0,45	2,82	100,00
09. Simalungun	0,43	1,32	15,82	31,08	1,77	0,07	0,18	46,53	0,45	0,06	0,14	2,15	100,00
10. Dairi	0,05	8,61	1,52	66,70	0,20	19,79	0,18	1,48	0,27	0,13	0,14	0,92	100,00
11. Karo	0,20	74,87	1,41	11,08	0,42	0,45	0,38	8,32	0,59	0,43	0,55	1,31	100,00
12. Deli Serdang	7,40	6,95	2,23	13,27	5,36	0,15	0,36	54,45	2,17	1,60	0,88	5,18	100,00
13. Langkat	14,93	10,22	0,10	4,50	2,54	0,16	0,12	56,87	1,29	0,88	2,29	6,10	100,00
14. Sibolga	2,91	0,52	0,36	55,93	5,65	0,20	7,70	6,47	10,76	4,23	3,20	2,07	100,00
15. Tanjung Balai	15,41	0,73	0,09	42,47	8,39	0,01	0,15	17,06	3,58	9,33	1,11	1,68	100,00
16. Pematang Siantar	0,66	1,78	6,69	47,54	5,64	0,10	0,44	25,47	2,40	3,90	0,29	5,09	100,00
17. Tebing Tinggi	4,35	1,34	7,03	14,51	10,47	0,09	0,43	40,16	8,92	9,48	0,62	2,59	100,00
18. Medan	6,59	4,10	0,69	19,21	9,36	0,34	0,69	33,03	8,60	10,65	2,78	3,95	100,00
19. Binjai	6,32	6,03	0,23	7,45	9,31	0,11	0,23	52,43	7,06	6,10	1,50	3,24	100,00
SUMATERA UTARA	5,86	5,09	2,04	25,62	11,27	0,73	6,36	33,40	2,66	2,71	0,97	3,29	100,00

Catatan : - Melayu mencakup semua Suku Melayu di Pulau Sumatera (Melayu Deli, Melayu Langkat, Melayu Asahan, Melayu Riau, dll)  
 - Mandailing mencakup suku Mandailing dan Angkola  
 - Termasuk dalam suku Jawa adalah suku lain yang ada di Pulau Jawa (Betawi, Banten, Sunda, Jawa, dan Madura)  
 - Warga Negara Asing tercakup dalam lainnya.

Sumber : SP2000, BPS Propinsi Sumatera Utara.



## RIWAYAT HIDUP

Rosramadhana, lahir di Negeri Lama, Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara pada tanggal 26 Agustus 1978. Anak keenam dari keluarga Almarhum Raja Oslek Nasution dan Rahimah Hasibuan. Menyelesaikan Sekolah Dasar (SD) Negeri 064014 di Medan dan tamat 1990. Kemudian masuk Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) di Medan dan tamat tahun 1993. Selanjutnya melanjut ke Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) di SMA Negeri 14 Medan dan tamat tahun 1996. Kemudian melanjut ke perguruan tinggi Universitas Negeri Medan (UNIMED) jurusan Sejarah dan tamat tahun 2001.

Setelah menyelesaikan program S1, bekerja sebagai guru pada Sekolah Menengah Atas (SMA) Panca Budi Medan dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2004. Pada tahun 2002 melanjutkan program magister antropologi sosial Universitas Negeri Medan dan tamat tahun 2005. Dan sekarang masih aktif sebagai wakil sekretaris pada Organisasi Pergerakan Perempuan Kebangkitan Bangsa (PPKB) periode 2002-2007. Pada tahun 2000 menikah dengan Nasaruddin, BA di Medan dan sampai sekarang belum dikaruniai anak.



# UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

## PROGRAM PASCASARJANA

Wiliem Iskandar, Pasar V, Medan 20221. Telp. (061) 6636730, 6613276, 6618754, 6613365 Faks. (061) 6632183, 6613319

nomor : 542/J 39.22/PP/2005 06 April 2005  
1 : Izin Melakukan Penelitian Lapangan

pada Yth. : Ka. BALITBANG Pemerintahan Propinsi Sumatera Utara.  
di  
Tempat.

Dengan hormat,  
Yang membawa surat ini:

N a m a : Rosramadhana  
NIM : 025050082

adalah mahasiswa Semester V pada Program Studi Antropologi Sosial, Program Pascasarjana UNIMED.

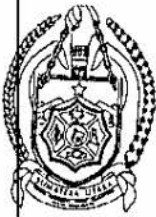
Mahasiswa ini akan melakukan penelitian untuk keperluan penyusunan tesis dengan judul "**Pemanfaatan Jaringan Politik Calon dan Anggota DPD (Dewan Perwakilan Daerah) Untuk Meraih Kemenangan Dalam Pemilihan Umum di Sumatera Utara**" Karena itu, kami mohon kiranya Saudara Rosramadhana ini dapat diterima untuk mendapatkan data di lingkungan instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Adapun data yang dibutuhkan untuk penelitian ini meliputi :

1. Studi Dokumentasi
2. Studi Lapangan
3. Wawancara

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan ijin yang Bapak berikan kami ucapkan terima kasih.

Asisten Direktur,  
  
Prof. Amrin Saragih, M.A., Ph.D.  
Asisten Direktur I  
NIP. 131119832



PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA UTARA  
**BADAN KESATUAN BANGSA  
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**  
Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 361 Telepon 4524894 - 4557009 - 4527480  
Fax : (061) 4527480 Medan 20119

**REKOMENDASI**

Nomor : 070-*074*/BKB-PM

1. Sehubungan dengan Surat Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Propinsi Sumatera Utara tanggal 26 April 2005 Nomor 070/96/Litbang/I/2005 Tentang Permintaan Rekomendasi atas Permohonan Izin Survei / Penelitian / KKN dan Sebagainya Oleh :
  - a. Nama : Rosramadhana
  - b. Alamat : Jl. Tanjung VIII No. 233 Perumnas Helvetia Medan.
  - c. Pekerjaan : Mahasiswa
  - d. NIP/NIM : 025050082
  - e. Judul : Pemanfaatan Jaringan Politik Calon dan Anggota DPD (Dewan Perwakilan Daerah) Untuk Meraih Kemenangan Dalam Pemilihan Umum di Sumatera Utara.
  - f. Daerah : Kota Medan
  - g. Lamanya : 2 (dua) Bulan
  - h. Peserta : Sendiri
  - i. Penanggung Jawab : Direktur Program Pascasarjana UNIMED.
2. Pihak Kami tidak menaruh keberatan atas pelaksanaan Survey/Riset/Penelitian/KKN dimaksud dengan catatan :
  - a. Untuk pengawasan, Surat izin yang dikeluarkan oleh Balitbang Propinsi Sumatera Utara kami diberi tembusannya.
  - b. Yang bersangkutan diwajibkan mematuhi ketentuan/peraturan yang berlaku dan menjaga ketertiban Umum di daerah setempat.
  - c. Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah penelitian, peneliti diwajibkan melaporkan hasilnya ke Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Propinsi Sumatera Utara.
3. Apabila ketentuan dimaksud pada butir 2 tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya maka Rekomendasi ini tidak berlaku.
4. Demikian untuk dimaklumi.

Medan, 2 Mei 2005



**Tembusan**

1. Walikota Medan
2. Direktur Program Pascasarjana UNIMED
3. Pertinggal. -



**PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA UTARA**  
**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

Jalan Sisingamangaraja Nomor 198 Telepon : (061) 7866225, 7866248, 7883016  
MEDAN - 20126

**SURAT REKOMENDASI / IZIN PENELITIAN**

No. 070/ *90* /Litbang/I/2005

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 060/1846.K/tahun 2003 tanggal 3 Juni 2003 dan setelah membaca / memperhatikan :

1. Surat dari Universitas Negeri Medan Program Pascasarjana tgl. 6 April 2005 No. 542/J39.22/PP/2005 tentang permohonan Izin Penelitian.
2. Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Prop.SU tgl. 2 Mei 2005 No. 070-864/BKB-PM tentang rekomendasi untuk hal tersebut di atas.

Badan Penelitian dan Pengembangan Prop.Sum.Utara dengan ini memberikan rekomendasi / Izin Untuk mengadakan Penelitian kepada :

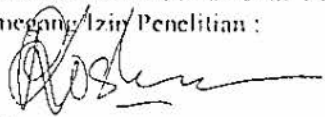
Nama	: Rosramadhana
Alamat	: Jln. Tanjung VIII No. 233 Perumnas Halvetia Medan
Pekerjaan	: Mahasiswa
Kebangsaan	: Indonesia
Judul Penelitian	: Pemampatan Jaringan Politik Calon dan Anggota DPD(Dewan Perwakilan Daerah) untuk Meraih Kemenangan Dalam Pemilihan UMUM di Sumut
Daerah Penelitian	: Kota Medan
lamanya	: 2 (dua) Bulan
Pengikut / Peserta	: Sendiri
Penanggung Jawab	: Direktur Program Pascasarjana UNIMED

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dalam jangka waktu 1 x 24 jam setelah tiba di tempat yang dituju, peneliti diwajibkan melapor kepada Kepala Daerah setempat.
2. Mentaati peraturan dan ketentuan Hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya di daerah penelitian.
3. Menjaga tata-tertib dan keamanan serta menghindari pernyataan baik lisan maupun tulisan yang dapat melukai / menyinggung perasaan atau menghina agama, bangsa dan negara.
4. Tidak diperkenankan menjalankan kegiatan diluar kegiatan penelitian ini.
5. Sesudah penelitian berakhir sebelum meninggalkan daerah setempat, diwajibkan melapor kepada Pemda setempat mengenai selesainya pelaksanaan penelitian.
6. Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah penelitian, peneliti diwajibkan melaporkan hasilnya kepada Badan Penelitian dan Pengembangan Propinsi Sumatera Utara.
7. Surat rekomendasi ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat rekomendasi ini tidak memenuhi ketentuan diatas.

Bersedia memenuhi ketentuan butir 1 s/d 7

Pemegang Izin Penelitian :

  
Rosramadhana

- Tembusan :
1. KPU Propinsi Sumatera Utara.
  2. Bakesbang Propinsi Sumatera Utara.
  3. Direktur Program Pascasarjana UNIMED

Dikeluarkan di : Medan

Pada tanggal : 2 Mei 2005

